

Monograph on  
**Politics &  
Government**

**PKS's Policy Behaviour**

**Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia**

ISSN 1979-0244

**PKS's Policy Behaviour**  
**Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia**  
MONOGRAPH *on* **Politics and Government**  
Vol. 2, No.2. 2008 (123-220)

## DAFTAR ISI

### BAB 1

PENGANTAR ..... 126

### BAB 2

SEJARAH DAN IDEOLOGI GERAKAN TARBIYAH INDONESIA..... 137

### BAB 3

METAMORFOSIS POLITIK GERAKAN TARBIYAH INDONESIA. .... 155

### BAB 4

POLICY ORIENTATIONS DAN DINAMIKA INTERNAL PARTAI ..... 198

DAFTAR PUSTAKA ..... 218

Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah dalam rangka ekspose tema-tema riset untuk didiskusikan lebih lanjut

NASKAH AKADEMIK

# PKS's Policy Behaviour

Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia



MONOGRAPH *on* **Politics and Government**

Vol. 2, No.2. 2008 (123-220)

# PKS's Policy Behaviour

## Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia

MONOGRAPH on **Politics and Government**  
Vol. 2, No.2. 2008 (123-220)

---

# PKS's Policy Behaviour

## Metamorfosa PKS dalam Kancah Politik Indonesia

### Pengantar

Pembicaraan tentang Demokrasi Modern saat ini hampir selalu bisa disederhanakan pada pembicaraan tentang partai politik. Meskipun demokrasi merupakan sebuah konsep yang lebih luas daripada partai politik, namun pembicaraan tentang demokrasi representatif, sebagai model demokrasi yang paling luas dianut di dunia saat ini, membawa pembicaraan tentang partai politik sebagai sesuatu yang nyaris mendekati keniscayaan.<sup>1</sup> Fakta ini memang harus diterima meskipun perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa publik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lain, mulai jenuh dengan partai politik dan mulai mencari saluran politik lain. Namun, walau demikian, upaya untuk mencari alternatif lain pada dasarnya didasarkan pada pemikiran untuk mencari skema yang sifatnya komplementer, atau melengkapi, dan bukan substitutif atau menggantikan peran yang selama ini sudah dijalankan oleh partai politik.

Salah satu karakter utama yang membuat partai politik menempati posisi sentral dalam diskursus tentang demokrasi modern, khususnya demokrasi representatif, dan membedakannya dari organisasi-organisasi lain adalah karakternya sebagai organisasi yang melakukan *agregasi kepentingan* dan representasi politik. Partai politik, secara normatif, menjadi saluran bagi publik untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasinya tentang siapa yang duduk dalam pemerintahan, bagaimana pemerintahan dijalankan, dan bagaimana kepentingan-kepentingan publik diakomodasi dalam pemerintahan tersebut. *Dus*, melalui karakter itu partai politik menjalankan tanggung jawabnya kepada publik untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan proses pemerintahan sesuai dengan kehendak publik.<sup>2</sup> Oleh sebab itulah, dalam konteks negara bangsa, produk khas jaman modern, partai politik, bagi hampir semua pendukung demokrasi, menjadi sebuah prasyarat yang harus dipenuhi untuk membangun dan mempertahankan sebuah rezim yang demokratis.<sup>3</sup>

---

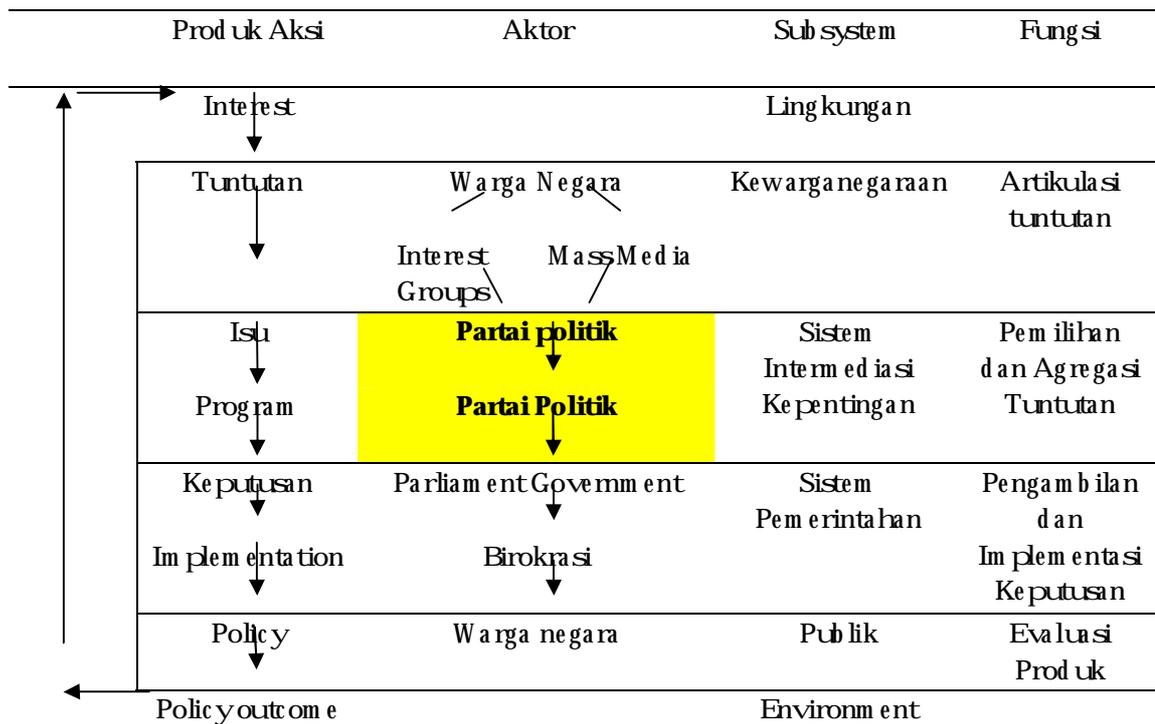
<sup>1</sup> Robertson, David (1967) *A Theory of Political Party Competition*, John Wiley&Sons, Ltd. Great Britain

<sup>2</sup> Klingemann, Hans-Dieter; Richard I. Hofferbert, dan Ian Budge (1994), *Parties, Policies, and Democracy*, Westview Press, Ltd., Colorado.

<sup>3</sup> Lihat juga E.E. Schatterschneider. 1942. *Party Government* New York: Holt, Rinehart and Winston, dikutip dalam Norris, Pippa (2004), *Building Political Parties*, Report Commissioned by the International IDEA

Dalam siklus sistemik dari demokrasi perwakilan, publik menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui partai politik. Aspirasi dan kepentingan publik konstituen ini kemudian oleh partai politik di bawa masuk ke dalam agenda kebijakan publik di ranah negara. *Output*-nya adalah kebijakan publik yang diambil oleh negara sebagai akomodasi dari kepentingan dan aspirasi publik yang tadi dibawa oleh partai politik. Kebijakan ini ditanggung dan dirasakan oleh publik sebagai pemenuhan dari aspirasi dan kepentingan mereka yang sebelumnya dipercayakan kepada partai politik untuk dibawa ke ranah negara.

**Skema I. MODEL FORMAL PROSES KEBIJAKAN**



*Diadaptasi dari Figure 1.2. dalam Klingeman et.al. 1994,*

Jadi secara normatif, partai politik berfungsi sebagai muara bagi aspirasi dan kepentingan publik dan kemudian partai politik menjadi hulu bagi semua kebijakan negara sebagai respon terhadap aspirasi dan kepentingan publik yang dipercayakan pada partai politik. Alur tersebut digambarkan dalam Skema I di atas.

## Partai Dan Kompetisi Politik Di Bawah Rezim Demokratis

Partai politik lahir dari sebuah keinginan untuk merebut kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Di bawah rezim yang demokratis, kekuasaan ini dikontestasikan secara berkala melalui sebuah skema penentuan pendapat umum, yang lazim disebut pemilihan umum. Dalam arena ini, publik menentukan kehendak mereka (menjalankan kekuasaan mereka) untuk menentukan siapa yang akan secara sah berkuasa memerintah atas mereka sampai pada pemilihan umum yang akan datang. Dalam arena ini pula partai politik memperlihatkan performa sebaik mungkin dan memoles diri seelok mungkin demi merebut hati publik akan partai tersebut dipilih untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Secara umum, partai politik berusaha menarik simpati dan dukungan dari publik dengan menunjukkan performanya dalam menjalankan fungsi agregasi dan saluran politik-nya. Dalam upaya unjuk performa yang menarik ini partai politik menawarkan paket-paket kebijakan, sebagai tawaran agar aspirasi dan kepentingan publik bisa terakomodasi dan terkelola dengan baik. Dus, pemilihan partai politik, dalam situasi dan kondisi yang dianggap normal, akan mengikuti pemilihan kepentingan dan aspirasi yang ada di publik, terutama publik pemilih. Kondisi ini menjadi jamak saat ini, ketika isu-isu yang muncul menjadi lebih bersifat lintas ideologi dan semua partai politik bermain di ranah isu yang berhimpitan<sup>1</sup> Dalam menentukan paket-paket kebijakan yang ditawarkannya, partai politik mengacu pada ideologi dan isu yang muncul di masyarakat. Dalam proses ini, partai politik menjaring isu yang bertebaran di masyarakat, menyusun isu-isu tersebut dalam skala prioritas. Selanjutnya, dengan mengacu pada ideologi yang dipilih oleh partai, memformulasikan sebuah desain kebijakan sebagai respon terhadap isu-isu yang menduduki skala prioritas atas, dan, akhirnya, menawarkan berbagai paket kebijakan itu untuk menarik dukungan politik dari publik. Semua ini dilakukan oleh partai politik sebagai upayanya untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan melalui mekanisme kontestasi politik. Secara eksistensial, tujuan inilah yang membuat partai politik berbeda dengan organisasi-organisasi lain.

Dalam proses itu, perilaku partai politik menentukan dan terekspresi dalam isu apa yang diangkat, bagaimana isu itu dikemas, paket kebijakan apa yang ditawarkan, siapa yang diajukan sebagai pengembang kebijakan itu jika partai memenangkan tampuk kekuasaan pemerintahan, dan bagaimana partai bekerja sepanjang seluruh proses itu. Perilaku ini muncul dan menjadi pilihan dalam sebuah struktur sosial, ekonomi, politik tertentu. Dua partai politik di negara yang berbeda, atau bahkan di satu negara yang sama, bisa jadi sama-sama menangkat isu yang sama, tetapi bisa jadi kemasan atau paket kebijakan yang ditawarkan sebagai respon

---

<sup>1</sup> Misal isu tenaga kerja. Isu ini adalah isu yang sensitif, seksi, dan menarik bagi semua orang, terutama di negara-negara dengan tingkat industrialisasi yang tinggi. Di negara semacam itu, hampir bisa dipastikan bahwa semua partai politik yang berkompetisi dalam pemilu akan mengangkat isu ini, melainkan dengan paket kebijakan yang berbeda, terutama pada level intervensi, namun mengikuti logika besar yang sama.

terhadap isu itu bisa jadi berbeda. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan ideologi antara kedua partai itu, bisa juga karena perbedaan aspirasi dan kepentingan publiknya, atau bisa juga kombinasi dari keduanya.

Saat ini, ketika batas ideologi semakin cair, publik semakin kritis, dan ekspektasi serta aspirasi politiknya mengalami perubahan ke arah yang bisa dikatakan lebih liberal, partai politik harus menyesuaikan perilakunya dengan situasi baru ini. Penyesuaian ini juga mau tidak mau berimbas pada keharusan untuk memberikan interpretasi dan operasionalisasi baru bagi ideologi masing-masing partai politik agar tetap relevan dengan lingkungan di mana partai politik itu ada.

### **Partai Politik Di Indonesia Pasca 2008**

Berangkat dari pemahaman di atas, kita akan akan nampak sekali bahwa situasi politik di Indonesia, terutama yang terkait dengan perilaku partai politik dan lingkungan di yang mempengaruhi perilaku partai politik tersebut, tidak jauh berbeda dengan gambaran yang dimunculkan melalui paparan di atas. Kondisi 'ideal' di mana partai politik serta publik pemilihnya mengedepankan rasionalitas untuk mengatasi problem riil ketimbang perbedaan ideologi, relatif jamak ditemui di negara-negara dengan sistem politik dan demokrasi yang mapan, dan hampir selalu telah mengalami fase industrialisasi lanjut. Sayangnya, apa yang dimiliki dan terjadi di negara-negara tersebut selalu dijadikan sebagai ukuran ke-normal-an dan, secara implisit, mendakwa kenyataan yang lain sebagai tidak normal. Namun, di banyak negara, pilihan publik dan tawaran paket kebijakan partai politik, bahkan isu publik, masih kuat ditentukan oleh pilihan ideologi-nya, serta di saat yang bersamaan tuntutan-tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan riil juga tidak kalah tinggi. Dalam situasi seperti ini, batas-batas ideologis, baik di level publik maupun di level partai politik sebagai representasi *political society*, masih sangat kentara dan menjadi faktor penting yang menentukan perilaku partai politik dalam proses pemenangan kontestasi politik. Namun, ideologi ini akan serta merta dihadapkan pada ujian riil untuk menyelesaikan permasalahan yang khas di negara-negara berkembang, seperti kemiskinan, pengangguran, instabilitas sosial-politik dsb. Karena itu, orthodoxy ideologis berada dalam ketegangan yang tinggi dengan pilihan-pilihan pragmatis yang diukur dari efektifitas dan efisiensi.

Partai politik dan publik di Indonesia, selama puluhan tahun sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden no. X tahun 1945 tentang Pendirian Partai Politik, berada dalam situasi di mana garis-garis pemilah ideologi begitu kental mewarnai hampir seluruh aspek kehidupannya. Secara umum, ada tiga garis ideologi besar yang menjadi acuan partai-partai politik di Indonesia, yaitu Nasionalisme, Agama; Islam di sini memberi warna paling dominan pada politik Indonesia, dan Komunisme/Sosialisme. Bagi sebagian kalangan, warna ideologi partai-partai politik di Indonesia ini dilihat sebagai cerminan dari garis pemilah yang ada di masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Clifford Geertz melihat bahwa ada tiga kelompok masyarakat besar di Jawa, yang mana masing-masing memiliki identitas kultural, okupasi dan strata ekonomi, serta, akhirnya, preferensi politik yang berbeda. Tiga kelompok masyarakat yang ada di Jawa ini adalah: Santri, Abangan, dan Priyayi.

Pilihan politik kelompok Santri biasanya jatuh pada partai-partai berideologi atau bernafaskan Islam; sementara Abangan, di masa sebelum 1965, pada PKI; dan kelompok Priyayi menjatuhkan pilihan politiknya pada partai-partai nasionalis, terutama PNI.<sup>2</sup>

Tentu saja situasi seperti ini sangat berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika konflik ideologi di level elit begitu kuat pada periode Demokrasi Liberal (1950 – 1959), ditandai dengan jatuh banggunya kabinet parlementer dan maraknya gerakan bersenjata di berbagai penjuru Indonesia. Wajar jika muncul kekuatan bahwa konflik di level elit ini akan merembet ke level massa akar-rumput dan pecah menjadi konflik kekerasan horizontal. Pada masa Demokrasi Terpimpin, situasi seperti ini berusaha diatasi dengan menjadikan Soekarno dan program Nasakom-nya sebagai acuan bersama seluruh ideologi yang ada di Indonesia. Namun upaya ini, oleh satu dan lain hal terbukti gagal, dan dipungkasi dengan kejatuhan Soekarno dan Demokrasi Terpimpin dan munculnya Soeharto dan Orde Baru di atas puing-puing PKI yang menandai berakhirnya ideologi Komunisme sebagai sebuah kekuatan politik riil di Indonesia.<sup>3</sup>

Kondisi publik dan partai politik di Indonesia yang terfragmentasi secara ideologis coba di atasi pada masa Soeharto dengan melakukan penyederhanaan partai dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi politik dan masyarakat.<sup>4</sup> Sembilan partai yang ada, selain Golkar, dipaksa berfusi. Partai-partai bernafas Islam berfusi dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan-PPP dan partai-partai beraliran nasionalis, ditambah Partai Kristen Indonesia dan Partai Katholik, berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia-PDI. Pendekatan penguasa yang cenderung bersifat represif serta keberhasilan (semu) pembangunan ekonomi, sedikit banyak berhasil membawa publik Indonesia untuk bergerak melupakan aspirasi-aspirasi ideologis-nya, dan cenderung mendasarkan preferensi-preferensi politik-nya pada pertimbangan-pertimbangan ekonomi modernis, yang celakanya juga digunakan oleh rezim Orde Baru untuk menjustifikasi dan melegitimasi kekuasaannya. Selama kurang lebih 25 tahun sejak penyederhanaan partai politik di Indonesia, skenario ini berhasil mempertahankan kekuasaan Rezim Orde Baru dan Soeharto. Pada periode ini, di Indonesia hanya ada tiga partai politik, dengan Golkar sebagai mesin politik rezim yang berkuasa dan dua partai politik lain sebagai 'pelengkap – penderita'.

Pasca runtuhnya Rezim Orde Baru dan Soeharto dari tampuk kekuasaan kran kebebasan politik mulai terbuka kembali. Bersamaan dengan itu, partai-partai politik mulai banyak kembali bermunculan, di samping 'tiga besar' yang bertahan selama periode Rezim Orde Baru. Bersamaan dengan kemunculan partai-partai politik ini, pertarungan ideologi juga mulai hidup kembali di Indonesia, meskipun pada periode itu keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi indikator yang tetap penting. Hal ini

---

<sup>2</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*.

<sup>3</sup> Walaupun ide-nya tersebar dalam banyak pemikiran yang diusung oleh berbagai kalangan di Indonesia, termasuk dari kalangan partai-partai yang berbeda secara ideologis.

<sup>4</sup> Sebetulnya langkah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin dan Nasakomnya.

bisa dimaklumi mengingat Indonesia, di samping berupaya membangun kehidupan politik yang lebih demokratis, juga berusaha pulih dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Selain itu, pengalaman kejayaan ekonomi pada masa Soeharto juga membentuk preseden sebagian besar masyarakat Indonesia tentang kondisi ideal yang menjadi ekspektasinya.

Demokrasi juga akhirnya menjadi satu-satunya pilihan untuk naik ke tampuk kekuasaan pemerintahan. Pada saat yang sama, rezim demokratis yang muncul pasca kejatuhan Orde Baru tidak kuasa lagi menahan laju liberalisasi politik dan akhirnya menetapkan bahwa sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multi partai. Penyederhanaan partai sepenuhnya diserahkan pada mekanisme kompetisi politik, melalui pemilu, yang ada. Pada saat yang sama, sejarah seperti berulang, daerah berhasil mendorong negara di level nasional untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya pada daerah untuk menangani permasalahannya sendiri melalui kebijakan desentralisasi yang berorientasi pada otonomi seluas-luasnya bagi daerah.<sup>5</sup>

Sehingga dalam situasi seperti ini tidak heran jika publik, dalam menentukan pilihan politiknya, mempertimbangkan dua hal penting, yaitu ideologi dan viabilitas dan fisibilitas berbagai paket kebijakan yang ditawarkan partai-partai politik yang berkompetisi di Indonesia. Pendek kata, gambaran umum aspirasi publik saat ini adalah adanya partai politik dengan tawaran paket kebijakan yang bisa mengembalikan kondisi perekonomian seperti pada masa sebelum krisis, minus cacat bawaan korupsi; kolusi; dan nepotisme dan konsekuensi-konsekuensi negatif jangka panjangnya, dan sekaligus memberikan arahan ideologi yang lebih jelas tentang gambaran sebuah masyarakat ideal, dengan kebebasan politik yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia.

Kenyataan seperti ini mau tidak mau mau ikut mempengaruhi struktur kompetisi partai. Perilaku partai politik, terutama dalam mengambil arah umum kebijakan-kebijakan internalnya dan paket-paket kebijakan yang ditawarkannya dalam upaya kemenangan pemilu. Partai politik di Indonesia, selain tiga besar yang bertahan sepanjang periode Orde Baru, tidak memiliki referensi yang cukup dekat untuk dijadikan rujukan dalam mengambil sikap dalam panggung politik abad XXI ini. Pada Pemilu 1999 bisa kita lihat bahwa sebagian besar partai baru yang muncul berangkat dengan 'romantisme' terhadap kehidupan kepartaian di tahun 1950-an. Masing-masing mengusung ideologi yang terkesan using, karena tidak ada upaya serius untuk mengadaptasikannya dengan kondisi yang dihadapi oleh publik Indonesia pada periode akhir abad XX dan awal abad XXI.

---

<sup>5</sup> Tata relasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di level kabupaten/kota, berubah drastis ketika pemerintah mengeluarkan UU no. 22 tahun 1999, kemudian diganti UU no. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Di bawah UU ini, pusat tidak lagi menjadi penentu segala-galanya. Segala urusan yang bisa diselesaikan di daerah, akan diselesaikan sendiri oleh daerah tanpa harus di bawa ke pusat. Ini membuat pusat kekuasaan menjadi jamak dan menyebar, tidak lagi tunggal seperti pada periode sebelumnya.

## Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Sebagai Fenomena

Perkembangan lingkungan politik berikut dengan aliran politik yang ada di Indonesia telah menjadi arena yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya partai politik. Adalah PKS dalam studi ini sebagai salah satu model partai politik yang unik dan memiliki karakteristik yang khas, dibanding dengan partai politik lain di Indonesia.

Partai ini cukup fenomenal. Prestasi partai ini dalam memenangkan sekian kompetisi politik melalui kontestasi nasional maupun lokal seakan menunjukkan bahwa sistem kerja partai ini telah cukup matang. Fenomena ini dapat dibaca dari 60% kemenangan PKS dalam kontestasi keseluruhan proses Pilkada<sup>6</sup>, kapasitasnya dalam mendistribusikan kader dan jaringan kedalam lembaga – lembaga negara ataupun non-negara di luar partai politik<sup>7</sup>, kapasitas dalam mengelola dinamika internal, sampai dengan pengorganisasian jaringan luar negeri<sup>8</sup>. Demikian juga, ditengah ukuran keberhasilan kelembagaan ini sejumlah kontradiksi – kontradiksi internal dan eksternal muncul, semisal dalam bentuk hengkangnya beberapa deklarator PK<sup>9</sup>, perubahan langgam kelembagaan politik dari PK menuju PKS, dll.

Karakteristik khas dari partai ini setidaknya dapat di baca sejak awal sebagai partai yang memiliki preferensi ideologis dan kelembagaan yang kuat. Merujuk pada basis ideologi yang dikembangkan partai ini, ia memiliki sentuhan pemikiran yang lekat dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Disamping itu, partai ini juga lahir dari persinggungan historis dan perubahan bentuk (metamorfosa) dari penyebaran gagasan melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, yang dibidani oleh Mohammad Natsir, yang kemudian dikembangkan dan dibesarkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, rata-rata lulusan timur tengah.

Bangunan kelembagaan partai lahir dari proses transformasi gerakan tarbiyah menjadi partai politik. Proses referendum menjadi pilihan dari transformasi ini dengan melibatkan seluruh kader gerakan tarbiyah Indonesia. Referendum adalah langkah yang diambil setelah refleksi atas hasil *jihad siyasi* pasca tumbangannya rezim Orde Baru. disini awal dari pembangunan PK(S) telah dimulai untuk menapak perubahan di Indonesia.

Secara historis, pilihan muara ini bagi gerakan ikhwanul muslimin atau gerakan tarbiyah mulai dijadi tahun 1998. Momentum nasional dalam reformasi Indonesia membuka *structure of opportunity* bagi gerakan tarbiyah di Indonesia untuk membangun Partai (baca PK ; 1998/PKS ; 2004). Walaupun pada awalnya di tolak oleh para petinggi gerakan tarbiyah di Indonesia, akan tetapi menjadi keputusan untuk membangun partai dari gerakan diterima bulat setelah diadakan referendum

---

<sup>6</sup> Pilkada di Nusa Tenggara Barat, NTB, tercatat sebagai kemenangan ke-95 dari 156 pilkada yang telah di ikuti, baik secara koalisi maupun tidak. CIRIS News Edisi I, Agustus 2008

<sup>7</sup> Distribusi kader Partai ini meluas tidak hanya didalam struktur negara seperti eksekutif maupun legislatif melainkan juga di tingkat masyarakat sipil.

<sup>8</sup> Cabang PKS diluar negeri semisal berada di German, Australia, Amerika.

<sup>9</sup> PKS merupakan kontinuitas kelembagaan PK. Nama PKS disepakati dalam keputusan internal partai setelah PK gagal melampaui treshold yang ditetapkan dalam pemilu 1999.

seluruh kader gerakan tarbiyah di Indonesia<sup>10</sup>. Dalam arti ini, tanpa mengecualikan lahirnya partai-partai di Indonesia pasca reformasi yang juga banyak lahir dari rahim gerakan sosial, PKS memiliki historisitas yang panjang, lebih mapan secara jaringan dan siap. Aspek – aspek inilah yang kemudian mewarnai karakteristik kepartaian ditubuh PKS. Konteks Otoritarianisme Orde Baru yang banyak disebut sebagai internal colonialism<sup>11</sup> merupakan penjelasan dorongan gerakan menjadi partai politik. Dalam corak kepartaiannya PKS mendeklarasikan diri sebagai partai kader. Pilihan ini adalah bentuk logis dari dinamika transformasi dari gerakan menuju partai kader. Disamping itu, sebagai sebuah instrumentasi kepentingan politik yang lebih luas. Dalam spektrum ini, studi tentang *political behaviour* partai kader dalam background gerakan sosial belum banyak dielaborasi. Studi gerakan dan partai politik melahirkan sintesis baru lahirnya partai gerakan. Dalam definisi ini, *Herbert Kitschelt*<sup>12</sup>, mengingatkan sebagai katagorisasi yang mestinya dilihat untuk membaca kecenderungan perilaku partai. Ia mendefinisikan partai gerakan sebagai; “...*coalitions of political activist who emanate from social movements and try to apply the organisation and strategic practise of social movement*”. Lebih lanjut, dalam arena kompetisi partai gerakan terlibat aktif dalam gerakan ekstra parlementer dan parlementer dan pada level tertentu membutuhkan kehadiran pemimpin yang kharismatik. Kombinasi terhadap aspek-aspek teknokrasi dalam partai dan kebutuhan kepemimpinan yang kharismatis seraya menyatu dalam transformasi gerakan menjadi partai politik.

Walaupun demikian, pluralitas pemilih menjadi arena perebutan pasar suara tersendiri yang memaksa sikap partai untuk meletakkan karakteristik, visi dan lembaga nya tetap eksis dan memenangkan kontestasi menuju kekuasaan legal formal kenegaraan. Dus, salah satu obyektifitas yang dapat dipegang manakala partai mampu mengambil simpati dari pemilihnya maka ini mampu menjadi tolak ukur penerimaan keberadaan partai ini ditengah masyarakat.

sebagai usaha untuk eksis dan diterima, sistem kelembagaan menjadi arena yang diciptakan. Oleh karenanya, level penetrasi dalam masyarakat menjadi ajang yang paling mendasar bagi corak kepartaian. Ada dua pertimbangan yang dapat dipakai sebagai pengkerangkaan untuk menemukan bentuk penetrasi. Pertama adalah karakter struktur partai. Konteks ini untuk menjelaskan dimensi internal dalam partai apakah ber karakteristik partai massa atau partai kader (*Maurice Durverger*,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Samsul Balda, Jakarta, 24 Juli 2008. Berbasis pada riset yang dimandatkan oleh jama'ah dakwah kepada Samsul Balda, beliau menerangkan bahwa Abu Ridlo dan Mashadi adalah kader gerakan tarbiyah yang mendukung usulan pembentukan partai politik.

<sup>11</sup> Kelahiran partai-partai dalam era reformasi memiliki semacam paralelitas sejarah dengan lahirnya partai-partai pada zaman colonial. Hanya saja dalam era kolonialisme dia lahir sebagai respon terhadap struktur kolonialisme Belanda dalam rentang tetapi tahun 1998, ia lahir sebagai respon dari Internal Colonialism Orde Baru. Dakhidae, Daniel, Partai-Partai Politik Indonesia, “ Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah, Partai Politik Indonesia; Ideologi, Strategi dan Program, Tim Penelitian dan Pengembangan, Kompas, Edisi Pemilu, Cet I, April 1999. Kelahiran partai-partai dalam era reformasi memiliki semacam paralelitas sejarah dengan lahirnya partai-partai pada zaman colonial. Hanya saja dalam era kolonialisme dia lahir sebagai respon terhadap struktur kolonialisme Belanda dalam rentang tetapi tahun 1998, ia lahir sebagai respon dari Internal Colonialism Orde Baru.

<sup>12</sup> Herbert Kitschelt, Movement Parties, dalam HandBook of Party Politics, Katz, Richards and Crotty, William (ed), Sage, 2006, hal, 280-281.

1959). Basis pembedaan atas partai kader dan partai massa bukan terletak dalam jumlah pendukungnya maupun besaran partainya akan tetapi terletak dalam **struktur partai-nya**<sup>13</sup>. Partai dalam tipologi partai kader mengarusutamakan kualitas dan networking kader. Sebagai konsekuensi dalam pengaturan keorganisasiannya, partai kader mengedepankan kuatnya pengaruh elit partai di dalam lapisan konstituen dan parlemen. Kemudian, partai kader juga dapat diidentifikasi dari pola pengambilan keputusan, sejauh mana keterlibatan anggotanya dalam pengambilan keputusan partai politik baik internal partai maupun eksternal partai.

Penyebutan kader dalam gerakan tarbiyah memiliki konsekuensi bahwa tulang punggung PKS sebagai partai kader bersumber dari kapasitas leadership masing-masing kader dalam menciptakan sistem regenerasi, mengorganisasikan pendukung dan menggerakannya dalam mendukung keputusan pusat partai politik. Cermin sebagai partai kader, dalam katagorisasi yang telah disebutkan diatas terkonfirmasi dalam struktur dewan syura yang menjadi dasar dari seluruh pengambilan keputusan strategis partai termasuk dalam representasi distribusi jejaring kadernya. Juga, dalam Sebuah tulisan berjudul *Tradisi Pemilihan Pemimpin di PKS* (tanpa tanggal dan tahun) telah menjelaskan eksistensinya sebagai partai kader. Pembangunan kader diyakini akan berkorelasi dengan kemampuan menjaga dan membangun stabilitas pendukung yang tinggi. Dalam pengembangan kelembagaan seluruh yang aktif dalam tubuh partai disebut sebagai kader, khususnya dalam tradisi pemilihan pemimpin dan transisionalnya mekanisme kader menjadi jembatan terhadap proses ini. Jenjang kader akan menentukan nilai/bobot suara dalam pemilihan pemimpin.

Kedua, adalah mengenal struktur sosiologis dalam masyarakat. Tingkah laku partai dalam melakukan penetrasi didalam masyarakat dapat dimengerti dari struktur dan nilai dari pengarusutamaan hadirnya politik aliran. Dalam kondisi sosiologis yang ber-enclave, islam politik lahir hanya mampu tumbuh dan berkembang dalam enclave tertentu<sup>14</sup> dalam masyarakat. Secara praktikal di Indonesia, tingkah laku partai dimengerti melalui kompetisi kepentingan dan karakteristik pembilahan sosial yang ada dalam bentuk aliran. Ada kelompok abangan yang melahirkan partai Nasionalis dan Sosialis, ada kelompok Santri yang melahirkan partai Religious. Dan ada kelompok priyayi yang memberi warna kelas bagi pembilahan tersebut.<sup>15</sup> Cara pembilahan tersebut masih cukup relevan untuk melacak pengelolaan lingkungan eksternal dan sumber pendukung partai.

Basis representasi dari konstituen ini dapat dikonfirmasi melalui peruntutan pergeseran suara pemilih 1999 dan 2004 dalam politik aliran. Merujuk pada

---

<sup>13</sup> Durverger, Maurice, *Political Parties " Their Organisation and activity in the Modern State"*, translated by Barbara and Robert North with a forwarded by D. W., Brogan, London, 2<sup>nd</sup> edition revised, 1959, hal, 63

<sup>14</sup> Erawan, Ketut Putra, Ph.D, *Mission Possible?: Reformasi Kepartaian di Indonesia*, makalah dan bahan kuliah sistem kepartaian Indonesia, Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2008. Kerangka teorisasi dalam penulisan ini terinspirasi oleh pemetaan yang disusun oleh Ketut Putra Erawan.

<sup>15</sup> In Indonesian party literatures, the arguments of how important the party social cleavage base translate into a distinct form of party organization pioneered by Clifford Geertz (Geertz, 1954), Jay, and continue by Herberth Feith, Lance Castle, Affan Gaffar, etc I Ketut Putra Erawan, *The Party Logics in Indonesia*, Paper Presentasi, Northern Illinois University, 2002.

*Baswedan*<sup>16</sup>, konstituen lebih memilih preferensi partai berdasar pada aliran ideologis (sekuler – islam ) pada ruang yang sama. " .... *PAN's decline in 2004 is highly correlated with the rise of PKS*". Kemudian ia menambahkan bahwa " *ideological polarization among electorates following a familiar historical pattern, with votes being reallocated among parties within the same political stream or ideology*". Synton dalam ketegangan politik ini ada didalam tubuh Muhammadiyah sebagai organisasi perumahan kader sampai dengan lapisan ditingkatkan intelektual kampus, seperti kewaspadaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) secara organisasi terhadap pergeseran *enclave* kader-nya menuju KAMMI, terutama di kampus-kampus negeri berbasis ilmu teknik. Respon atas pergeseran ini bukan sesuatu yang *un-predictable*. Lebih lanjut, kondisi yang secara structural ini menjadikan level "ancaman tersendiri" bagi perebutan *enclave* politik di Muhammadiyah, tahun 2006, DPP Muhammadiyah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada seluruh jajaran muhamadiyah dan organisasi sayapnya untuk tidak terlibat dalam partai politik, termasuk dalam partai politik dengan jargon dakwah. Pendek kata, dalam melihat perilaku politik, pembilahan tersebut menyumbang penyelesaian atas sumber rekrutmen secara sebagian dan orientasi dari partai politik kader dibagian yang lain.

Logika partai kader dan logika pembilahan politik ini menjadi modal dasar dalam memetakan pola kedepan semisal dalam kemenangan pemilihan umum 2009 sebagai arena konstestasi. Dinamika konteks politik Indoensia saat ini juga memiliki pengaruh eksternal yang kuat, semisal dengan sistem pemilu yang membutuhkan minimal 20% dukungan konstituen atau 25% dukungan suara parlemen dalam hal mengajukan kandidat sebagai presiden. Usaha untuk mencapai langkah yang lebih berpengaruh (determinant) dalam figure kader dalam politik negaranya menjadikan dinamika struktur partai untuk lebih adaptif terhadap kemungkinan ber-koalisi.

Partai telah tumbuh dan berkembang dengan massif sebagai varian baru dalam perkembangan politik islam di tanah air. Berintikan gerakan tarbiyah (2004:51), ia bersandar pada usroh, unit terkecil dari serangkaian prosesi tarbiyah. Keberhasilan usroh, selain pembinaan yang dijalankan secara mendalam kepada beberapa kader, adalah mengikat sesama kader tarbiyah dan mentornya (murabbi) dalam satu ikatan kekeluargaan (ukhuwwah). Hasilnya, proses tarbiyah lebih berhasil karena sekat-sekat psikologis dari suatu proses pengajaran dapat dikelola.

Dalam monograph ini elaborasi tentang PKS akan dituturkan berdasarkan atas hasil penelitian selama 3 bulan intensif pada tahun 2008. Bab pertama dalam monograph ini bersifat pengantar untuk melihat kembali konstruksi lingkungan politik demokrasi dan perkembangan partai politik, hingga di tanah air. Lingkungan politik yang berubah menjadi kesempatan politik bagi muncul dan berkembangnya partai politik "baru". dalam konteks ini, PKS telah menjadi fenomena dan faktor determinant bagi perkembangan politik indonesia.

---

<sup>16</sup> Baswedan, Anies R.(2007) " Indonesian Politics In 2007: The Presidency, Local Elections And The Future Of Democracy ", Bulletin of Indonesian Economic Studies,43:3,337

Bab 2 dalam monograph ini akan mengelaborasi sejarah dan ideologi gerakan tarbiyah sebagai salah satu basis sosial gerakan politik islam. Bagian ini menjadi penjelas historis dan sosiologis dari perkembangan jaring politik baik lokal, nasional dan global dari PKS. Bab 3 melihat metamorfosa gerakan politik tarbiyah ini di Indonesia dari pilihan-pilihan gerakan sosial islam menjadi partai politik. Bab 4 akan mengelaborasi kapasitas kelembagaan PKS yang merujuk kepada sistem partai, format kelembagaan dan jejaring politik yang terbangun. Bab 5 akan menuturkan tentang orientasi kebijakan dan dinamika internal partai politik ditengah pilihan-pilihan politik yang berkembang di Indonesia.

## **Bab 2**

# **Sejarah dan Ideologi Gerakan Tarbiyah Indonesia.**

Nama besar Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang ini sering diperbincangkan khalayak pada awalnya 'hanyalah' sebetulnya jaringan kegiatan pembinaan (tarbiyah) di kampus dan masyarakat sejak tahun 1980-an. Proses tarbiyah yang dijalankan secara berkelompok di berbagai kampus dan masyarakat ini lambat laun membesar. Pada fase selanjutnya, kelompok-kelompok yang menjalankan proses tarbiyah ini dikenal sebagai gerakan tarbiyah, jama'ah Tarbiyah, atau juga jama'ah Ikhwan<sup>17</sup>.

Gerakan tarbiyah merupakan suatu gerakan berbasis ideologi Islam yang khas yang muncul di awal tahun 1980-an. Di bilang khas, karena gerakan ini tidak memiliki sandaran ideologi dan gerakannya dalam sejarah Islam Indonesia. Selain itu, gerakan ini menawarkan beberapa pendekatan baru bagi masyarakat Indonesia dalam mengkaji dan mengamalkan Islam. Artinya, cara, bentuk, dan materi yang disampaikan oleh gerakan ini memiliki perbedaan dengan semua gerakan atau organisasi Islam lainnya. Gerakan tarbiyah adalah sebuah gerakan yang sepenuhnya mendasarkan ajarannya pada prosesi dan hasil tarbiyah.

### 1. Tarbiyah dan Gerakan Tarbiyah

Term tarbiyah sendiri pada dasarnya bermakna netral, yakni sekedar pengistilahan arab dari pendidikan atau pembinaan, dan secara umum dipakai oleh semua orang untuk belajar tentang banyak hal ihwal, baik spesifikasi keilmuan maupun ilmu pengetahuan secara umum. Term *tarbiyah*, dalam kamus *al-'Ashriy*<sup>18</sup>, serupa dengan term *tastqif* yang bermakna pendidikan secara umum yakni sebuah ajang untuk memperkaya pengetahuan dan meraih suatu keilmuan untuk melawan kebodohan. Kita mengenal istilah *'ilmu al-tarbiyyah* (ilmu pendidikan), *tarbiyyatul al-thuyuur* (pemeliharaan burung), *tarbiyyatun madaniyyatun wa wathoniyyatun* (pendidikan kewarganegaraan/ kebangsaan), atau juga istilah *wizarotul al tarbiyyah* (kementerian/departemen pendidikan).

Kalaupun 'tarbiyah' diidentifikasi sebagai sebuah ormas atau gerakan, maka pada tahun 1990-an publik kebanyakan akan merujukannya pada satu organisasi

---

<sup>17</sup> Menyangkut nama gerakan tarbiyah ini, dalam penulisan monograph ini akan dipakai secara saling bergantian, dengan jama'ah Tarbiyah dan Jama'ah Ikhwan, sesuai konteks penulisan. Ke semua nama itu memiliki kesamaan maksud, yakni organanisasi bawah tanah yang meletakkan pondasi bagi Partai Keadilan (Sejahtera) kelak.

<sup>18</sup> Atabik Ali dan Zuhi Muhdhor, *Qomus Al-'Ashriy, Arabiy-Indonisiy, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003

Islam bernama PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah<sup>19</sup>. Jika dirujuk pada lembaga pendidikan Islam, publik lebih sering mendengar nama jaringan Taman Kanak-kanak (TK) bernama Tarbiyyatul Athfal (Pendidikan Anak) —yang banyak tumbuh di berbagai kota dan desa dan memiliki afiliasi dengan organisasi sosial-keagamaan Nahdhatul Ulama (NU).

Namun, tarbiyah yang melekat pada nama Gerakan Tarbiyah atau Jama'ah Tarbiyah, di sebut pula sebagai Jama'ah Ikhwan, yang telah menyejarah ini berbeda dengan aneka pemahaman masyarakat kala itu akan istilah tarbiyah. Bagi kelompok tersebut, tarbiyah adalah pondasi dasar dari gerakan ini. Saking pentingnya tarbiyah bagi Al-Ikhwan al-Muslimun dan organisasi yang menginduk kepadanya ini, maka Dr. Musthafa Masyhur, Mursyid 'Am Al-Ikhwan Al-Muslimun ke-5, berujar " tarbiyah memang bukan segalanya, namun segala-galanya tak akan bisa di raih tanpa instrument tarbiyah".

Dr. Irwan Prayitno, seorang cendekia dan sekaligus anggota DPR F-PKS dua periode; 1999-2004 dan 2004-2009, menulis dengan lugas tentang pentingnya tarbiyah bagi umat Islam. Prayitno (2005: 524) menulis, "tarbiyah merupakan solusi yang akan mampu menyelamatkan muslim sekaligus menjadi media untuk pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam. Tarbiyah merupakan sebuah kewajiban dari Allah kepada umat Islam untuk umat Islam untuk mengajak manusia kembali ke jalan Islam. Pembinaan yang terus-menerus serta adanya kaderisasi adalah jalan untuk membentuk umat yang Islami".

Bagi alumnus Universiti Putra Malaysia itu keyakinan akan solusi tarbiyah dalam mengatasi problema umat Islam didasarkan pada kondisi umat Islam kekinian yang lemah dan terpecah belah sehingga mengakibatkan pemimpin Islam tak berdaya. Ia menulis (ibid, 2005: 523-524)",

Adanya krisis kepemimpinan dalam tubuh Islam yang ditandai dengan tiadanya khilafah Islam merupakan posisi terendah tahapan perjuangan umat saat ini. Kemerdekaan yang menghasilkan negara yang terkotak-kotak telah menyebabkan sebagian kaum muslimin bersyukur dengan kemerdekaan negara yang diperolehnya. Hal ini ternyata telah menjadi sarana invasi pemikiran dan pemurtadan yang berhasil merubah keadaan kaum Islam dan tidak sedikit yang keluar dari Islam (berpindah agama) sementara kebanggaan kebanggaan terhadap ideologi dari kaum kafir merupakan hal bisa terlihat di Negara-negara yang telah merdeka. Adapun Negara-negara muslim yang merdeka tersebut ternyata tidak dipimpin oleh orang-orang yang dikenal komitmennya terhdap Islam. Maka jadilah negara itu lemah dan tidak berdaya menghadapi serbuan kaum kafir dalam

---

<sup>19</sup> PERTI adalah satu organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeih Sulaiman Ar-Rasuly, pada tanggal 28 Mei 1930. Berdirinya PERTI berfungsi sebagai pengelola Madrasah-Madrasah Tarbiyah Islamiyah terutama di daerah Minang, Sumatera Barat. Pada tahun 1946 PERTI beralih fungsi menjadi Partai Politik. Namun, dalam perjalannya PERTI kembali menjadi organisasi social keagamaan melalui dekrit Syeikh Sulaiman Ar-Rasuly pada Tanggal 1 Mei 1969.

melakukan perang pemikiran dan pemurtadan. Umat Islam saat ini sudah jarang berinteraksi dengan Al-Qur'an dan justru semakin menjauhinya. Akibat menjauh dari Al-Qur'an maka akan jauh dari tarbiyah dan berdampak pada kekebalan umat Islam. Berarti mereka pula telah kehilangan kekebalan menghadapi berbagai serbuan kaum kafir dan musyrik yang menggunakan berbagai pola dan sistem untuk menghancurkan umat Islam. Kesemua itu merupakan persoalan besar yang menjadi salah satu kelemahan utama umat Islam pada saat ini. Hal itu diakibatkan oleh tidak adanya kebiasaan dan budaya tarbiyah dalam kehidupan umat Islam.

Kutipan agak panjang tersebut merefleksikan keresahan seorang aktivis PKS akan buramnya kondisi umat Islam kekinian karena ketiadaan atau kurangnya tarbiyah di lingkungan umat Islam. Selama ini umat Islam *memble* dihadapan umat beragama dan kekuatan di luar Islam, karena tidak ada himpunan bekal ilmu yang memadai untuk berhadapan dengan mereka. Karenanya, umat Islam selalu kalah—dan selalu dibayangkan untuk dikalahkan—oleh kekuatan di luar Islam. Tidak ada yang membangggakan dari umat Islam hari ini karena mulai dari sistem gagasan, perilaku, dan jiwanya dicemari, bahkan berisi oleh sistem gagasan dan perilaku kaum kafir. Orang Islam hanya membebek dan sekedar menjadi kelompok yang terkalahkan. Persoalan akut dalam tubuh umat Islam tersebut harus segera dipecahkan. Tak ada jalan bagi umat Islam selain harus kembali *mencharge* dirinya dengan aneka ilmu dan materi keislaman yang terangkum dalam tarbiyah sebagaimana ditawarkan itu. Keyakinan itulah yang menandakan betapa pentingnya tarbiyah bagi para kader gerakan Tarbiyah untuk menjadikannya sebagai *landskap* perjuangan umat Islam kontemporer melawan kaum kafir.

Tulisan Prayitno dalam risalahnya yang berjudul *Kepribadian Da'i* yang dikutip agak panjang dalam tulisan ini merupakan sebuah ulasan awal pada bab tentang tarbiyah di bukunya. Jika kita ikuti ulasan dari tiap-tiap katanya mengenai pentingnya tarbiyah tersebut, terasa sekali dentuman semangat memperkenalkan dan mendekatkan tarbiyah kepada semua umat Islam untuk bisa bangkit meraih kepemimpinan Islam di muka bumi ini. Artinya tarbiyah sendiri telah menjadi resep ideologis bagi umat Islam untuk segera menyudahi kekalahannya selama ini dari kaum kafir.

Satu buku lain yang mengulas secara mendalam ihwal *Tarbiyatul Islamiyah* adalah karya Dr. Khalid Ahmad Syantut yang bertajuk "*Al-Muslimun wa At-Tarbiyah Al-'Askariyah*" (2003). Buku yang khusus diperuntukkan bagi aktivis dakwah ini secara khusus mengulas beragam materi untuk pembentukan kader militan. Sedikitnya terdapat dua motivasi dalam penyusunan buku ini, *pertama*, realitas kaum muslimin kontemporer yang melemah dan dan terinfeksi virus *wahn* membutuhkan penyelamatan dan spirit kebangkitan kembali, *Kedua*, kebutuhan panduan bagi pelurusan ajaran Islam dan sebagai bekal untuk mempersiapkan seluruh kaum muslimin untuk jihad fi sabilillah. Dua motif itulah yang dianggap penulis buku ini sebagai kebutuhan utama kaum muslimin akan pendidikan militer yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *tarbiyah Islamiyah*.

Lantas, apa itu tarbiyah dalam 'mahlug' gerakan Tarbiyah? Bab ini akan menguraikan secara garis besar munculnya gerakan Tarbiyah di Indonesia, hingga tumbuh dan kian membesarnya gerakan tersebut. Selanjutnya, uraian singkat tentang ideology gerakan Tarbiyah tersebut juga menjadi pembahasan dalam bab ini.

Dari beragam definisi yang diajukan para pemikir dan tokoh dakwah ihwal tarbiyah, maka bisa ditarik benang merahnya, bahwa prosesi tarbiyah merupakan " proses menyiapkan muslim menjadi muslim yang saleh, yakni terciptanya muslim yang seimbang dalam potensi, tujuan, dan tindakannya secara keseluruhan.

Dari sisi materi ajaran, Rahmat Abdullah, menjelaskan bahwa tarbiyah adalah satu proses pengkajian terhadap materi-materi ajaran Islam, yang sebetulnya sama dengan materi yang diajarkan di tempat atau organisasi lain, dan dibayangkan serta dicita-citakan sama oleh semua muslim. Yang membedakan proses tarbiyah dalam Gerakan Tarbiyah dengan tarbiyah kelompok lain adalah corak pendekatan pengajian yang disusun secara integral dan didesign aplikatif.

Abdullah mengandaikan, jika di berbagai tempat ukhuwah (persaudaraan) masih menjadi teriakan yang semu, di lingkungan gerakan Tarbiyah ukhuwwah telah diaplikasikan. Gerakan Tarbiyah juga memberikan sandaran praksis (amali) dari penguasaan Islam yang selama ini masih bersifat kognitif di kalangan umat Islam. Artinya, menjadi kewajiban bersama antar kader untuk mentransformasikan ragam tema yang dikaji dalam usroh dan halaqoh dari yang sifatnya dairatul qaul (perkataan, teori) menjadi dairatul amal (pengamalan).

Artinya, tarbiyah tidak hanya menjejalkan teori belaka, namun juga mengawal teori itu sampai pada tingkatan aplikasi. Kesenambungan input dan output menjadi bagian juga dari prosesi tarbiyah. Untuk menghasilkan satu hasil kader tarbiyah yang benar-benar terjaga dan terkawal, maka instrument tarbiyah harus bisa memastikan tiap-tiap kader dakwah senantiasa dalam pantauan dan penjagaan. Dan gerakan tarbiyah memiliki instrument khusus yang memang didesign untuk mengawal dan mengikat kader tidak hanya dalam proses pengajaran melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Instrumen khusus tarbiyah yang dijalankan oleh gerakan tarbiyah Indonesia sangat familiar di gerakan al-Ikhwan al-Muslimun dunia. Hal ini karena instrument tarbiyah itu sebelumnya menjadi instrument khusus kaderisasi organisasi Islam terbesar di Timur Tengah itu. Instrument tarbiyah atau kaderisasi yang biasa dijalankan adalah; usroh (keluarga), katibah (bertemunya beberapa unit usroh dalam satu area tertentu di waktu yang disepakati), Daurah (pelatihan), nadwah (semiloka), mu'atamar (konferensi), rihlah (penempaan fisik secara massal, biasa digelar di alam terbuka), mukhyyam (berkemah), dan mu'askar (latih kemiliteran).

Inti tarbiyah, sebagaimana diakui oleh Sekamdo (2004:51), justru terletak pada usroh, unit terkecil dari serangkaian prosesi tarbiyah. Keberhasilan usroh, selain pembinaan yang dijalankan secara mendalam kepada beberapa kader, adalah mengikat sesama kader tarbiyah dan mentornya (murabbi) dalam satu ikatan

kekeluargaan (ukhuwwah). Hasilnya, proses tarbiyah lebih berhasil karena sekat-sekat psikologis dari suatu proses pengajaran telah diampulasi.

Selain itu, mekanisme usroh juga biasa dijadikan instrument pengawasan yang ketat diantara sesama kader dan murobbi. Dalam prakteknya, sesama anggota usroh terjadi saling berbagi masalah, saling memberi solusi, saling mengingatkan, dan saling menjaga dari berbagai penyimpangan yang terjadi di antara mereka. Dengan usroh, soliditas, loyalitas, kader dan ikatan kepada jama'ah bisa dikendalikan.

Selain sebagai unit tarbiyah, usroh merupakan unit pembiakan kader yang begitu efektif. Jika ada 10 kader yang digodok melalui usroh oleh sang murobbi, maka dalam fase tertentu, seorang kader diwajibkan untuk membuka usroh di tempat lain dengan dirinya sebagai murobbi-nya. Artinya, ada fungsi kaderisasi dan pembiakan kader melalui unit usroh. Cara kerjanya seperti amuba yang membiakkan diri melalui sel-selnya: setiap pembelahan sel tubuh menjadi sel yang tumbuh secara utuh, selanjutnya membelah kembali dan masing-masing sel hasil pembelahan muncul sebagai sel utuh, dan seterusnya dan seterusnya. Jika diaplikasikan dalam dunia bisnis, kaderisasi melalui usroh identik dengan cara kerja pemasaran suatu perusahaan yang menggunakan strategi multi level marketing atau MLM.

Cara kerja kaderisasi gerakan Tarbiyah melalui usroh ini dijalankan secara tertutup atau bawah tanah. Gerakan tarbiyah tidak pernah mendesign usroh, sebagai unit tarbiyah dan kaderisasi, selayaknya seminar ataupun diskusi publik. Pada akhirnya, masyarakat kampus terhenyak dengan bermunculannya aktivitas usroh di dalam maupun di sekitar kampus. Dan melalui usroh pula, publik baru sadar akan munculnya sebuah jama'ah atau gerakan baru di dalam dunia Islam Indonesia, gerakan Tarbiyah.

## 2. Gerakan Tarbiyah Indonesia: Underground Movement

Kemunculan dan Kelahiran gerakan Tarbiyah sendiri sampai kini tidak bisa dipastikan tanggal dan tahunnya. Pertama, karena jama'ah ini bukan organisasi formal keagamaan yang didirikan oleh beberapa orang untuk menjalan misi dakwah. Kedua, modelnya yang khas, berbentuk sel-sel, lebih identik sebagai gerakan bawah tanah (underground movement) yang membutuhkan kesunyian dan kerahasiaan, ketimbang publikasi dan legalisasi negara.

Hal ini diperkuat oleh berbagai studi yang telah panjang lebar membahas sejarah gerakan Tarbiyah Indonesia (Damanik, 2000; Mahmudi, 2005; dan Rahmat, 2005; ) yang tidak menyebutkan tanggal dan tahun yang pasti bagi berdiri atau mulai bekerjanya gerakan ini. Hampir semua penelitian yang ada menyebut bahwa gerakan ini mulai muncul dan berkembang di Indonesia semenjak tahun 1980-an. Bahkan Syamsul Balda, aktivis Tarbiyah generasi awal, memaparkan dirinya tidak tahu pasti kapan gerakan Tarbiyah berdiri dan mulai berkibrah di Indonesia. Fakta di lapangan menyebutkan, sejak awal tahun 1982/1983-an, tatkala Balda pertama kali kuliah di

ITB dirinya telah mendapati gerakan tarbiyah ini dan lantas masuk menjadi salah satu kadernya<sup>20</sup>.

Sebagai gerakan bawah tanah, penyembunyian identitas jama'ah menjadi urgen. Ada organisasinya tapi tidak ada bentuknya, atau distigmakan oleh Orde Baru dengan istilah organisasi tanpa bentuk, OTB<sup>21</sup>. Dalam praktik berorganisasinya, tidak ada papan nama dan struktur organisasi yang terpampang di salah satu kantor tertentu yang bisa dirujuk jika ingin berkorespondensi dengan pegiat gerakan Tarbiyah. Berbagai studi dan penelitian tentang gerakan tarbiyah yang ada juga tidak pernah mencatat siapa pendirinya, platform, dan juga 'semacam' anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) nya . Karena tidak ada payung legalitasnya, Hilmi Aminuddin mengistilahkan gerakan dakwah kala itu sebagai gerakan di bawah naungan Allah SWT (nizhallah rabbaniyah) (Hilmi, 2007:134)

Teka teki gerakan Tarbiyah tidak berhenti disitu. Bahkan soal nama gerakan tarbiyah sendiri juga tidak ada awal mulanya. Seperti dipaparkan Abu Ridho<sup>22</sup>, aktivitas pembinaan melalui usroh, yang pada awalnya dijalankan di berbagai kampus sekuler oleh para muballigh itu, lambat laun semakin membesar. Karena dijalankan oleh suatu kelompok dengan materi yang khas dan berintikan proses tarbiyah maka kelompok ini lantas menjadi fenomena tersendiri, dan selanjutnya gerakan ini diistilahkan banyak orang sebagai gerakan tarbiyah. Padahal, kata Ridho, nama kelompok pembinaan (tarbiyah) itu bukan gerakan Tarbiyah, karena dari awalnya kelompok tarbiyah ini tidak memiliki nama. Publik hanya melihat aktivitas gerakan Tarbiyah itu adalah dakwah Islamiyyah dengan pondasi utamanya proses pembinaan atau tarbiyah kepada para mahasiswa, sehingga pada akhirnya tersematlah nama gerakan Tarbiyah kepada kelompok tarbiyah ini.

Cara kerja organisasi bawah tanah ini adalah penyebaran kader-kader ke berbagai kampus dan daerah di Indonesia. Misalnya seperti yang dialami oleh Balda<sup>23</sup>, salah satu perintis gerakan Tarbiyah di kampus, yang ditugaskan qiyadah (elit) gerakan Tarbiyah untuk turut membuka jaringan di wilayah Jawa Tengah dan Jogjakarta. Dengan tugas ini maka studi di ITB hanya dilakoninya setahun, dan selanjutnya pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta di Solo, untuk membuka usroh-usroh di dalam dan di luar kampus. Ruang gerak Balda, yang pada tahun 1985 pernah dikerangkeng sebulan di penjara Kodim Solo akibat aktivitas bawah tanahnya itu, nyatanya sampai juga di Semarang melalui kampus UNDIP dan Jogjakarta melalui kampus UGM-nya, bahkan pernah juga keliling ke NTB untuk membantu kader-kader yang ditugaskan untuk membuka jaringan gerakan Tarbiyah di sana. Selain dirinya, ada beberapa kader yang juga ditugaskan untuk merintis di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pada fase selanjutnya, menjamurnya usroh di berbagai kampus di tanah air dijadikan penanda bagi eksistensi gerakan Tarbiyah di Indonesia. Selain itu,

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Syamsul Balda, 24 Juli 2008.

<sup>21</sup> Wawancara Syamsul Balda, ibid.

<sup>22</sup> Wawancara Abu Ridho, 25 Juni 2008.

<sup>23</sup> Wawancara Syamsul Balda, op cit.

munculnya gerakan Tarbiyah juga biasa diidentikkan dengan mulai maraknya pemakaian jilbab oleh para siswi dan mahasiswi yang mendapat tentangan keras dari dari berbagai kalangan, terutama pemerintah, yang masih mencurigai potensi 'radikalisme' dibalik jilbab ala Timur Tengah itu.

Demikianlah, pada akhirnya gerakan Tarbiyah lahir sebagai satu komunitas baru dalam politik Islam Indonesia. Satu komunitas Islam yang mengusung Ideologi kesempurnaan Islam (*syumuliyatul Islam*) sebagai solusi bagi semua persoalan umat Islam dan problem dunia. Sebagai komunitas baru, gerakan Tarbiyah juga menawarkan pendekatan Islam yang lebih militant dan menyeluruh, yang berbeda dari komunitas Islam lainnya yang lebih dahulu mengisi dakwah Islam di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah.

Strategi gerakan Tarbiyah yang memilih jalur clandestine (bawah tanah) ini terkait dengan dua hal. Pertama, kebijakan represif pemerintah Orde Baru di semua level kala itu. Organisasi-organisasi yang dianggap bisa membahayakan penguasa diberangus, ataupun dipaksa berubah wajah. Seperti Masyumi yang tidak bisa lagi beraktivitas dan dipaksa merubah haluan gerakannya sehingga lebih "halus" dengan format barunya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Balda<sup>24</sup> mengakui, dengan kondisi semacam ini, legalitas gerakan Tarbiyah tidak akan pernah terjadi dalam kondisi represif kala itu.

Kedua, terkait dengan ajarannya yang lebih banyak berkiblat pada ajaran al-Ikhwan al-Muslimun. Sepak terjang organisasi bercorak fundamentalistik ini di beberapa negara, seperti Mesir, Syria, dan beberapa negara lain telah berhasil menggoyang kekuasaan pemerintah setempat karena pilihan oposisinya terhadap kekuasaan. Sedangkan Orde Baru kala itu masih berusaha memapankan kekuasaannya dari pelbagai rongrongan dari berbagai organisasi, terutama organisasi Islam 'garis keras' yang selalu dipandang ancaman oleh Orde Baru, seperti sisa-sisa kekuatan Negara Islam Indonesia (NII). Karenanya, dalam kondisi politik yang demikian itu, nyaris tidak dimungkinkan gerakan Tarbiyah bisa menjadi satu organisasi formal di hadapan Negara.

Tentu saja pilihan untuk secara konsisten menggeliatkan pergerakan dalam format gerakan bawah tanah bukanlah perkara mudah. Harus ada kombinasi dari berbagai faktor pengorganisasian yang handal, strategi dan taktik yang jitu, serta format aksi yang cerdas, untuk menciptakan satu pola 'gerilya' bawah tanah yang relative aman dari endusan dan ancaman represi Negara. Selain itu, tanpa kepemimpinan dan jaringan 'pengaman' yang kuat, mengakar, sekaligus lihai, maka agak mustahil membayangkan geliat gerakan Tarbiyah di alam represi Orde Baru itu bisa terus berbiak seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi salah satu variable sentral dalam semua gerakan, termasuk juga gerakan Tarbiyah. Kepemimpinan inilah yang mampu menjadi tulang punggung gerakan Tarbiyah dalam menggalang aksi-aksi kaderisasi dan penyebaran nilai-nilai pergerakan,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Syamsul Balda *ibid*.

sekaligus pengawal organisasi di hadapan segala ancaman dan propaganda dari luar.

Persoalannya, studi yang banyak dilakukan untuk melihat gerakan Tarbiyah dan sisi transformasinya sampai pada saat sekarang ini, PKS, sejauh ini tidak ada yang mengurai secara tuntas bangunan organisasi gerakan Tarbiyah itu di kala masih beroperasi sebagai gerakan bawah tanah. Damanik (2002), misalnya, yang mengupas secara mendalam sejarah gerakan Tarbiyah seolah menyisakan ruang gelap bagi penjelasan ihwal peran-peran kelembagaan serta kepemimpinan organisasi ini saat masih di level gerakan underground.

Meski demikian, Damanik berhasil menelusuri beberapa artefak sejarah hasil karya kader-kader Tarbiyah di berbagai bidang. Waktu dan ruang politik yang semakin terbuka memberi kesempatan para kader Tarbiyah untuk memanfaatkannya dengan sedikit banyak membuka diri ke hadapan publik dengan ide-ide dan karya yang bisa menunjukkan jati diri mereka sekaligus menyebarkan ajaran-ajaran dakwah. Menariknya adalah, meski tampil ke hadapan publik dengan beragam format dan ruang, tetap ada satu benang merah yang saling mengikat dan menjadi basis pergerakannya: ideologi gerakan Tarbiyah Indonesia.

Di sini kita bisa menyebut jaringan media dan penerbitan buku karya kader dakwah, seperti majalah Sabili, majalah Ummi, majalah Saksi, penerbit buku Da'watuna, Harakatuna publishing, dan seterusnya. Selanjutnya di bidang lembaga Kajian muncul SIDIK (Studi dan Informasi Dunia Kontemporer) yang didirikan pada tahun 1992 oleh Abu Ridho, Al-Muzammil Yusuf dan Abu Bakar Al-Habsyi. Selanjutnya, muncul lembaga dakwah Khairu Ummah, yang lantas diikuti oleh lembaga serupa dengan materi dan substansi kajian yang sama. Di bidang bimbingan pelajar, nama Nurul Fikri menjadi poros utama. Dan seterusnya.

Dari berbagai jejak sejarah yang berhasil direkam oleh Damanik tersebut, tentu saja mencuatkan pertanyaan: siapa pemimpin utama di balik jejaring yang tumbuh pesat tiap harinya itu? Jika bukan berupa pemimpin tunggal, siapa saja para pemimpin yang secara kokoh mampu menopang bangunan pemikiran serta mengoperasikan secara kelembagaan gerakan Tarbiyah, sehingga sebagai bagian dari gerakan bawah tanah di alam Orde Baru gerakan Tarbiyah bisa tetap berselancar dan tak mudah dipatahkan?

Tak mudah menjawab pertanyaan semacam itu. Tentu saja sebagai gerakan bawah tanah, gerakan Tarbiyah kala itu, bahkan sampai sekarang, memiliki satu 'misteri' yang tak bisa diungkap begitu saja, terutama soal kelembagaan dan kepemimpinan gerakan Tarbiyah.

Hanya saja, ada satu komentar yang cukup menarik yang disampaikan oleh Balda<sup>25</sup>, bahwa sejak dia masuk ke gerakan Tarbiyah ini pada tahun 1980-an,

---

<sup>25</sup> Wawancara Balda, *ibid.*

kepemimpinan gerakan Tarbiyah telah ada di tangan K.H. Hilmi Aminuddin,<sup>26</sup> seorang da'i yang pernah belajar dan bermukim di Arab Saudi, dan kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Tertinggi Pusat (DPTP) PKS.

## 2. Al-Ikhwan Al-Muslimun: Inspirasi Ideologi atau Induk Gerakan?

Sebagaimana disinggung di atas, gerakan Tarbiyah dalam membangun jaringan dan mentahapkan kerja-kerja dakwah dan politiknya didasarkan pada cara kerja gerakan bawah tanah. Berbagai cara dilakukan untuk tetap menyebarkan ajaran-ajaran tarbiyah di lingkungan kampus tanpa melalui mekanisme formal kerorganisasian Islam. Tiba-tiba saja publik melihat menjamurnya aktivitas usrah dan berbagai halaqoh yang diorganisir oleh suatu gerakan baru yang publik kenal sebagai gerakan Tarbiyah. Publik kian bertanya-tanya, dari mana munculnya gerakan Tarbiyah, yang kerap menyebut dirinya juga dengan sebutan Jama'ah Ikhwan, atau Jama'ah Tarbiyah ini?

Apalagi dalam perjalanannya, gerakan Tarbiyah ini mampu melakukan satu lompatan pergerakan dengan melahirkan partai politik yang kali pertama tampil di atas pentas politik di era Reformasi, Partai Keadilan. Publik lagi-lagi melihat satu gebrakan-gebrakan baru dalam ber'islam" dan tawaran-tawaran moralitas dalam berpolitik oleh Partai Keadilan Indonesia. Tentu saja, apa yang biasa dan sanggup dilihat publik di media tidaklah merepresentasikan sepenuhnya diri gerakan Tarbiyah atau Partai Keadilan. Kontroversi seputar keorganisasian dan kiprah gerakan Tarbiyah sebelum ataupun setelah melakukan transformasi diri menjadi Partai Keadilan tetap berputar-putar di kepala publik.

Pertanyaan publik itu tentunya berkisar pada bangunan ideologi yang menopang gerakan Tarbiyah. Apa ideologi dan dari mana ideologi gerakan tarbiyah itu berasal? Apakah gerakan Tarbiyah di Indonesia adalah satu gerakan politik Islam yang berdiri sendiri atautkah memiliki keterkaitan dengan organisasi Islam dari luar negeri?

---

<sup>26</sup> Sebelum aktif dan menjadi tokoh utama di balik gerakan dakwah di Indonesia, Hilmi mengawali kehidupan pergerakannya dengan aktif dalam NII. Perjumpaan Hilmi dengan NII terjadi melalui orang tua Hilmi sendiri, Danuwiryo alias Danu Muhammad Hasan, salah satu komandan NII pascapembekuan tahun 1962. hal ini dibenarkan oleh Balda, wawancara Balda, ibid. Puncak karier Hilmi di NII adalah jabatan Menlu NII di bawah Komando Adah Djaelani. Atas keterlibatannya dalam gerakan radikal-revolusioner Islam tersebut, Hilmi pernah ditangkap Kopkamtib dan dipenjarakan di awal tahun 1970-an. Namun se usai merasakan penjara selama 2 tahun, ia dibebaskan dari rutan Militer Cimanggis tanpa melalui persidangan, setelah menyatakan keluar dari struktur maupun ajaran NII komando Adah Djaelani. Anis Matta kerap berujar soal perlunya rekonsiliasi dengan Soeharto, meski Hilmi pernah dipenjara 2 tahun oleh Orde Baru.

Hilmi pernah berguru kepada Sa'id Hawwa, seorang Mursyid IM di Arab Saudi yang dikenal moderat. Pertemuan Hilmi dengan guru-guru senior IM inilah yang lantas menanamkan sekaligus mematangkan ideologi IM pada dirinya. Sepulang dari Arab Saudi, pada tahun 1979/1980-an, Hilmi diangkat sebagai Amir IM Asia Tenggara. Posisi ini mengharuskan dirinya menjaga jarak dengan realitas permukaan politik tanah air, sehingga membuatnya jarang muncul ke pentas publik. Ia biasa disebut sebagai *muassis* (pendiri) IM dalam struktur yang disembunyikan (*siriyyatu tandzim*).

Hampir semua buku dan karya penelitian tentang Gerakan Tarbiyah, dan beragam organisasi sosial politik yang dilahirkan para aktivitasnya, menulis bahwa gerakan Tarbiyah terinspirasi secara ideologis dan harokiyah (pergerakan) dari organisasi Islam internasional, al-Ikhwan al-Muslimun (Damanik, 2002; 2004, Mahmudi, 2005). Secara lebih tegas, al-Ikhwan al-Muslimun yang memiliki pengaruh besar dalam perlawanan terhadap penjajahan dan imperialisme Barat serta pertentangannya dengan ideologi sekuler di Mesir di tanah Mesir, khususnya, dan Timur Tengah pada umumnya, disebut Damanik, hanyalah sumber ide dan inspirasi saja.

Jika gerakan Tarbiyah lekat dengan al-Ikhwan al-Muslimun, maka jejak-jejak berdiri dan berkiprahnya bisa ditelusuri dari tersebarnya pemikiran Al-Ikhwan al-Muslimun di Indonesia. Sebagai organisasi yang kerap ditunjuk sebagai basis inspirasi dan gerakan, tersebarnya pemikiran Al-Ikhwan memiliki satu posisi penting tersendiri untuk membuka narasi tumbuhnya gerakan Tarbiyah di Indonesia. Dua penelitian yang masing-masing dilakukan oleh Damanik (2002) dan Rahmat (2005) menunjukkan adanya dua teori atau penjelasan terkait dengan tersebarnya pemikiran al-Ikhwan di Indonesia.

**Pertama**, bermula dari masjid Salman ITB. Beragama tulisan telah mengulas aktivitas Latihan Mujahid Dakwah (LMD) yang diselenggarakan kali pertama di masjid Salman ITB pada tahun 1974 adalah faktor penentu dan cikal bakal lahirnya gerakan Tarbiyah Indonesia. Dengan tokoh sentral Imaduddin Abdulrahim, LMD memiliki materi keislaman yang banyak terinspirasi oleh doktrin gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Salah satu gagasan al-Ikhwan yang ditrasfer oleh bang Imad dan lantas menjadi pokok keyakinan peserta LMD adalah konsep Islam sebagai *din wa daulah* (agama dan negara). Sejalan dengan al-Ikhwan, Islam merupakan ajaran yang memiliki makna totalitas yang tidak memisahkan satu aspek dengan lainnya, tidak memisahkan antara yang sacral dengan profan, yang transcendental maupun yang temporer. Berlandaskan konsep ini, Islam berarti menolak gagasan sekulerisme (Rahmat, 2005).

Materi-materi dan doktrin al-Ikhwan pada mulanya dipelajari oleh Bang Imad, sapaan akrab Ir. Imaduddin Abdurrahim, M.Sc. melalui organisasi International Islamic Federation of Student Organization (IIFSO, yang berdiri 1969), di mana saat itu dia menjadi Sekjenya (Rahmat, 2005; bandingkan dengan Latif, 2006). Dari IIFSO itulah, Bang Imad memiliki kesempatan interaksi fisik dan gagasan dengan para da'i seluruh dunia. Selain itu, persentuhan intensif bang Imad dengan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang terlebih dulu mendalami ajaran al-Ikhwan juga membekaskan guratan doktrin al-Ikhwan pada dirinya. Kesemua kiprah bang Imad dalam pembekalan ajaran dakwah itu menemukan titik pijaknya pada Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) dan sosok Muhammad Natsir.

Natsir menjadi penting untuk disebut di sini, karena dari Natsir lah Bang Imad mendapatkan segumpal ajaran jaringan dakwah yang nantinya menjadi penting dalam sejarah gerakan Tarbiyah Indonesia. Selain Bang Imad, banyak kader-kader dakwah yang digembleng oleh DDII dan mendapatkan beasiswa ke Arab Saudi, via

Natsir dan DDII. M. Natsir, selepas dari kegiatan politiknya, mendirikan DDII untuk memberikan pelayanan dakwah kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyebaran para da'i ke berbagai daerah, dan seterusnya. Khusus bagi pengembangan dakwah di universitas, DDII mulai menyusun program pelatihan instruktur universitas pada tahun 1968. Bang Imad sendiri adalah salah satu dari 40 kader angkatan pertama yang digembleng DDII di asrama haji Kwitang melalui program pelatihan instruktur universitas se Jawa Barat, yang nantinya diproyeksikan untuk membuka aktivitas dakwah di kampusnya masing-masing (Rahmat, 2005:85). Dengan silsilah dakwah yang berujung pada DDII, Bang Imad lantas mengembangkan dan mengintensifkan dakwah di ITB, melalui program LMD.

Prototype pembentukan militansi kader dakwah seperti di Masjid Salman, juga ada di empat masjid kampus lain yang nantinya menjadi sentral gerakan dakwah dan berpengaruh terhadap gerakan dakwah di kampus-kampus lainnya. Selain ITB, ada masjid Arief Rahman Hakim UI Jakarta, masjid al-Ghifari IPB Bogor, dan Jama'ah Salahuddin UGM Yogyakarta, dan masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya. Di samping berkonsentrasi pada aktivitas dakwah di kampus-kampus, mereka yang tergabung dalam jaringan dakwah ini juga melakukan koordinasi yang bersifat informal. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan gerakan dan penyebarluasan ideologi Islam, seperti mengadakan koordinasi rencana aksi bersama, pertukaran informasi dan penyediaan da'i-da'i atau instruktur-instruktur agama bagi acara-acara keagamaan tertentu.

Dari Salman ITB-lah, diyakini gerakan dakwah kampus menjadi hingar-bingar pada tahun 1990-an ke atas. Masjid menjadi sentrum pergerakan dakwah di hampir semua kampus, khususnya kampus umum negeri, di semua penjuru tanah air. Keberhasilan gerakan dakwah kampus yang menjadikan masjid sebagai pusat aktivitasnya lantas melahirkan istilah populer "*Back to the Mosque*", sebagai slogan untuk menjadikan masjid kampus sebagai basis pertahanan terhadap gempuran nilai-nilai sekuler sekaligus menjadi basis pergerakan para kader dakwah mentahapkan kerja-kerja perubahan tatanan social politik di luar kampus, pada fase selanjutnya.

**Kedua**, adalah kembalinya para pelajar Indonesia dari berbagai universitas di Timur Tengah. Teori ini secara meyakinkan menunjukkan keberhasilan para alumni Timur Tengah itu dalam mempengaruhi dan menyebarkan pemikiran al-Ikhwan di Indonesia. Mereka berinteraksi secara langsung dengan pemikiran dan tokoh-tokoh al-Ikhwan, baik di Mesir maupun di Arab Saudi.

Sepulang dari Arab, mereka menyebarkan gagasan-gagasan tersebut melalui terjun langsung membentuk usrah-usrah dan pengajian di berbagai kampus dan masyarakat. Selain itu, untuk mendisseminasi gagasan para pemikir Ikhwan secara lebih luas, maka program penerjemahan dan penerbitan buku para ideologi Ikhwan menjadi program klub 'liqo Arab' ini. Akhirnya, ada begitu banyak buku yang berhasil diterjemahkan dan diterbitkan.

Abu Ridho adalah salah satu perintis awal penerjemahan buku-buku Ikhwan tersebut. Dengan kapasitasnya yang handal, Abu Ridho menerjemahkan berbagai bukunya Hasan al-Banna, Sayid Qutb, Said Hawwa, Mustafa Masyhur, dan

seterusnya. Bahkan, dengan penerbitan Media Dakwah, yang bernaung di bawah Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, Abu Ridho begitu produktif menerbitkan buku-buku Islam, terutama pemikiran al-Ikhwan. Setelah itu baru bermunculan para penerjemah lain yang meng-Indonesia-kan buku-buku pemikir Ikhwan lainnya. Berbagai buku para pemikir Ikhwan itu lantas menjadi bacaan wajib para kader Tarbiyah/dakwah melalui mekanisme usrah.

Demikianlah dua teori besar yang mengulas masuk dan merebaknya pemikiran al-Ikhwan ke Indonesia. Dua teori ini selama ini begitu mapan dalam studi politik Islam, khususnya dalam menelaah sejarah gerakan Tarbiyah Indonesia. Belum ada satupun karya akademik yang secara tegas membantah teori tersebut. Ke dua teori atau penjelasan itu berjalan bareng, berkelindan, dan saling mengisi kekosongan 'fakta' sejarah di antara dua teori itu, untuk secara bersama menjelaskan fenomena kebangkitan Islam *revivalis ala* gerakan Tarbiyah di Indonesia pada tahun 1980-an.

Studi masuknya gagasan al-Ikhwan ke Indonesia tentu saja menyepakati arus utama teori dan penjelasan yang memang telah cukup memadai itu, sebagaimana studi Damanik (2002) dan Rahmat (2005). Selanjutnya, mari sejenak kita lihat, organisasi semacam apa itu al-Ikhwan al-Muslimun dan apa saja ide dan materi ajaran al-Ikhwan al-Muslimun yang telah menginspirasi gerakan Tarbiyah di Indonesia.

Sebagaimana umum diketahui, Al-Ikhwan Al-Muslimun didirikan oleh seorang muballigh kenamaan, Hasan al-Banna<sup>27</sup>, di kota Isma'iliyyah di Mesir. Kala itu, kota Isma'iliyyah yang terkenal dengan Terusan Suez nya, dijadikan markas pendudukan militer Inggris dan juga berdirinya beragam perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan Terusan Suez, yang merupakan icon dominasi asing yang sempurna atas fasilitas publik, menjadi salah satu hal yang begitu dibenci al-Banna (Mitchell, 2004:11).

Setting sosial-politik semacam inilah yang mengitari pendirian al-Ikhwan al-Muslimun. Banna tiba di Isma'iliyyah untuk memompa semangat perjuangan dengan ceramah-ceramah agama dan politiknya yang memikat di berbagai tempat, mulai dari masjid sampai kedai kopi. Penderitaan warga Isma'iliyyah dan penjajahan politik-ekonomi memperbesar semangat Hasan al-Banna untuk mempercepat perlawanan kepada penjajahan, sekaligus membangkitkan kembali Islam yang semakin terpuruk di kota itu. Sebagaimana diurai oleh Mitchell (2004:13), dengan hati yang tersentuh

---

<sup>27</sup> Hasan Al Banna dilahirkan pada Bulan Oktober 1906 di Al-Mahmudiyyah, sekira 9 mil dari arah barat daya Kairo. Sejak usia 12 tahun, Banna masuk dalam tareqoh al-Ikhwan al Hashafiyah, untuk belajar secara mendalam kajian Sufism. Di usia 13 Banna muda membentuk organisasi, yang menjadi cikal bakal al-Ikhwan al Muslimun, yang bernama Jam'iyah al-Hashafiyah al-Khairiyyah, yang bergerak di dua level: melindungi moralitas Islam dan membendung misionaris Kristen di kotanya. Sejak muda, Banna telah aktif di berbagai organisasi, dan dengan berbagai organisasi itu turut serta dalam perjuangan nasionalism untuk melawan penjajahan Inggris di Mesir. Selain organisatoris, Banna juga dikenal sebagai intelektual Muslim dan orator ulung penggerak massa. Ulasan lengkap sejarah dan pergerakan al-Ikhwan al-Muslimun bisa dibaca di R.P Mitchell, Masyarakat al-Ikhwan al-Muslimun, Intermedia, Solo, 2005.

melihat begitu luasnya penderitaan dan beban perjuangan yang telah dipikulkan kepadanya, Banna dengan para pengikutnya secara bersama mengikrarkan diri untuk menjadi 'bala tentara dakwah Islam'. Kemudian, dalam sebuah pidatonya, Banna berujar " Kita adalah saudara dalam berkhidmat kepada Islam, jadi kita adalah al-Ikhwan al-Muslimun. Akhirnya, berdirilah organisasi dakwah dan gerakan sosial politik sekaligus pada tahun 1928.

Untuk kian mengefektifkan gerakannya dan sekaligus mendesign satu pergerakan Islam yang memiliki efek mediatik secara internasional, al-Ikhwan al-Muslimun yang semula bermarkas di kota Ismailiyah dipindahkan ke Kairo, ibu kota Mesir. Dari Mesir inilah, cita-cita ideal tentang pergerakan internasional untuk mendorong semangat kebangkitan Islam di Mesir, Timur Tengah dan Negara-negara muslim lainnya dimulai. Al-Ikhwan al-Muslimun memproyeksikan diri menjadi obor bagi perjuangan Islam kawasan lainnya untuk membebaskan kaum muslim dari belenggu kolonisasi. Selain itu, tugas misi utama organisasi tetap dijalankan yakni menitikberatkan pada implementasi sistem pemerintahan Islam. Hubungan Islam dan negara yang mendasarkan pada hubungan yang integratif ini meniscayakan berlakunya Islamisasi pada ranah sosial dan politik.

Pada fase selanjutnya, perkembangan sosial-politik di Mesir di atas memberikan momentum bagi kebangkitan gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, yang lantas menjadi prototype bagi kebangkitan Islam fundamentalis di banyak tempat di kawasan Timur Tengah. Melalui ketokohan Hassan al-Banna yang dikenal luas sebagai seorang muballigh, al-Ikhwan al-Muslimun yang semula dirancang sebagai organisasi yang concern dalam bidang dakwah merambah ke pentas politik Arab, terutama bersamaan dengan pemogokan umum bangsa Arab pada 1936-1939. Sejak meletusnya revolusi Palestina pada 1939, al-Ikhwanul al-Muslimun mengorganisir diri, secara terbuka atau bawah tanah, menyusun demonstrasi besar-besaran memprotes Inggris dan perwakilan-perwakilannya.

Dalam perlawanannya, al-Ikhwan tidak hanya bergerak dengan orasi jalanan dan agitasi di media, tapi juga mengangkat senjata. Bahkan ketika penjajahan Barat telah usai di Mesir, persaingan ideologis dengan kaum Nasionalis untuk membangun Mesir juga dijalani Banna dan pengikut militannya. Bahkan di puncak perlawanannya terhadap kekuasaan, dengan metode gerilya bawah tanah dan pembunuhan politik, salah seorang anggota Hasan al Banna membunuh Perdana Menteri Mesir, Mahmud An-Nuqrasyi pada tahun 1948. Puncak ketegangan dengan kekuasaan pun terjadi, dan akhirnya membawa situasi yang rawan bagi Al-Ikhwan Al-Muslimun. Pada puncak perseteruan itu al-Banna terbunuh pada 1949.

Selepas meninggalnya Hasan Al-Banna, tongkat kepemimpinan al-Ikhwan al-Muslimun diserahkan kepada Sayyid Qutb. Dalam organisasi ini, Qutb dikenal luas sebagai intelektual sekaligus ideology, terutama dalam parumusan hubungan Islam dan peradaban Barat. Dia mengkaji secara intens kebudayaan Barat pada tahun 1930- 1940-an, dan pernah pula bermukim di Amerika 2 tahun. Pengajian yang mendalam itu telah memberikan cara pandang tersendiri terhadap Barat sebagai produk modernitas, yang pada akhirnya mempertebal sikap antimodernisme Qutb.

Qutb memilih concern terhadap gerakan fundamentalisme Islam dan menjadikan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai kendaraan politik, sekaligus membumikan pemikiran dan aksi gerakan kebangkitan Islamnya.

Dengan doktrin sentralnya ihwal "jahiliyah modern", Qutb merumuskan konsep bahaya kapitalisme dalam kaitannya dengan Islam, terutama potensi hancurnya sendi-sendi khasanah dan keyakinan Islam dari serbuan pemikiran kapitalisme Barat. Lewat karya al-Maududi, seperti *Jihad in Islam*, *Islam and Jahiliyah* dan *The Principles of Government* dan karya muridnya, Abu al-Hasan 'Ali al-Nadwi *Maza Khasira al-'Alam bi Inhitat al-Muslimin*, pemikiran Qutb menemukan bentuknya ketika menulis masterpiece nya, *The Struggle between Islam and Capitalism*. Paradigma pemikiran Qutb inilah membangun dan membuat komunitas Al-Ikhwan Al-Muslimun semakin memiliki sandaran akademik dan ideologis untuk berhadapan dengan Barat (Abegebriel, 2004).

Uraian sejarah singkat di atas menunjukkan bahwa al-Ikhwan al-Muslimun tidaklah sekedar organisasi keagamaan biasa. Dengan menekankan Islam sebagai ideologi yang komprehensif dan karenanya harus diperjuangkan untuk ditegakkan di level negara, Hassan al-Banna secara gigih telah berhasil membentuk kader-kadernya dengan militansi yang tinggi.

Apa sebenarnya ajaran-ajaran Islam ala al-Ikhwan al-Muslimun yang mampu menggerakkan kesadaran seorang kader untuk tenggelam dalam militansi dan totalitas perjuangan menegakkan Islam?

Karakter dasar gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, sebagaimana design al-Banna, adalah; pertama, berorientasi ketuhanan (rabbaniyah), yakni berdiri di atas fondasi yang berusaha mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Kedua, bersifat internasional (alamiyah), yakni gerakan ini didakwahkan kepada manusia secara keseluruhan. Manusia, pada dasarnya, adalah bersaudara, dengan nenek-moyang yang satu, tidak ada strate a kehidupan di antara mereka, kecuali dengan takwa. Ketiga, bersifat Islami (Islamiyah), yakni bersandarkan pada sendi-sendi Islam yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad.<sup>28</sup>

Banna lantas menggariskan kewajiban organisasional yang harus diampu oleh semua kadernya. Pertama, islah an-nafs, membangun pribadi sehingga berakhlak mulia, beraqidah lurus dan beribadah sesuai ketentuan agama yang dibawa Nabi. Kedua, islah al-bait al-Muslim, membangun rumah-tangga Muslim sehingga mampu membawa keluarganya sesuai pemikiran dan etika Islam dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ketiga, islah al-mujtama', menjadi pelopor bagi masyarakat, berbasiskan misi kebaikan dan semangat memerangi kekafiran dan kemungkaran. Keempat, tahrir al-watan, memerdekakan negara dari segala bentuk penjajahan asing— dengan segala pengaruhnya yang mendegradasi nilai Islam— baik di bidang politik, ekonomi, maupun mental. Kelima, islah al-hukumah, mengelola kekuasaan negara sehingga benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan

selanjutnya, keenam, iqamah al-Khilafah al-'Ammah, menegakkan kedaulatan Islam internasional melalui kemerdekaan dan kejayaan negara-negara Islam dalam bingkai khilafah. Dan, ketujuh, globalisasi misi dan dakwah Islam di seantero bumi dengan umat Islam sebagai pengendali policy Internasional. (Banna, 1979: 161-164).

Sebagai pemimpin organisasi, Banna dikenal pula sebagai strategist (ahli strategi), sehingga tujuan-tujuan dakwah yang telah digariskannya itu dilengkapi pula dengan langkah-langkah strategis sebagai panduan bagi para kadernya. Dalam instruksi strategisnya itu, Banna menggariskan empat hal:

1. ad-Da'wah al-'Ammah. Pada fase ini, para kader dakwah ditugaskan untuk menyebarkan berita kepada ummat akan kerusakan tradisi dan sesatnya perilaku kolektif dan mengajak ummat kepada kebenaran Islam dengan cara-cara yang beradab. Secara organisatoris tahap ini dikenal sebagai tahap pengenalan (marhalah ta'rif).

Melalui tahap ini beberapa instrument dakwah bisa dipakai untuk memperlancar prosesi dakwah, seperti forum kajian, ceramah dan pengajian, diskusi publik, melalui tulisan, dan pengiriman muballigh ke seluruh penjuru negeri.

Tahap selanjutnya adalah tahap pembentukan (marhalah takwin). Organisasi memilih kader-kader terbaik untuk mengemban tugas-tugas jihad dan menggalang jaringan dan persatuan di antara mereka. Cara melakukan hal ini adalah dengan mendirikan kelompok-kelompok organisasi kecil (cabang), kelompok prajurit pejuang, kelompok kepanduan, kelompok traveling dan kunjungan, olahraga dan lain sebagainya.

Sebagai fungsi perluasan jaringan dan guna mendekatkan organisasi para masyarakat, penggalangan aktivitas sosial (al-birru wa al-hisan) dilakukan di banyak tempat. Kepedulian sesama dalam bentuk bantuan korban gempa, kerja bakti massal, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dst, akan dijalankan secara massif. Selain itu, pada fase ini kader-kader diwajibkan untuk memakmurkan masjid, sebagai sentra aktivitas kaum muslim, sebagaimana di zaman Nabi.

2. Ad-Da'wah Al-Khasshah. Misi dakwah di level ini lebih khusus disampaikan kepada semua penyelenggara negara, baik yang pemerintahan, anggota parlemen, para tokoh partai politik, para hakim, dst. Dalam tahap ini, organisasi al-Ikhwan mengajak mereka kembali kepada jalan Islam dengan metode al-da'wah al-Islamiyyah, menawarkan program-program organisasi, dan meminta mereka untuk menjalankan syari'ah Islam.

Cara penyampaian dakwah di tahap ini adalah dengan berperan aktif dalam masyarakat, dalam pemerintahan, departemen dan lembaga negara,

parlemen, dan lain sebagainya. Kader pada tahap ini juga harus terlibat dalam perumusan konstitusi Negara dan mempengaruhi kebijakan Negara.

3. Iqamat ad-Daulah, menegakkan negara Islam. Bagi Al-Ikhwan Al-Muslimun, fase ini ditandai dengan dimulainya marhalah at-tanfiz (fase pelaksanaan). Kala itu di Mesir, Banna belum sempat menyelesaikan tugasnya untuk iqamat ad-daulah karena ditembak dalam tragedi 12 Pebruari 1949 dan akhirnya meninggal dunia.
4. Iqamah al-Khilafah al-Islamiyyah al-'Ammah, yakni tegaknya kekhalifahan Islam secara internasional. Banna mengajukan satu teori, bahwa jika telah berdiri banyak pemerintahan Islam di dunia, maka diantara mereka akan kerjasama saling bantu dalam segala bidang kehidupan. Selanjutnya, Negara-negara Islam akan menggagas terbentuknya suatu perserikatan atau koalisi negara-negara Islam. Untuk memulainya, maka koalisi tersebut bisa dimulai dari munculnya konferensi-konferensi internasional negara-negara Islam sedunia. Pada akhirnya, dari berbagai forum dan konferensi tersebut akan muncul "Perserikatan Umat Islam Sedunia", yang sebagai pelaksanaannya akan ditunjuk seorang Imam/Khalifah sebagai pemegang otoritas kekhalifahan bagi setiap muslim di dunia, sekaligus sebagai symbol pemersatu ummat (Banna, 1978). Banna meyakini bahwa al-Khilafah al-Islamiyyah bersifat niscaya. Dengan mendasarkan pada pernyataannya, bahwa, "Setiap milimeter tanah tempat bendera Islam berkibar adalah tanah air bagi setiap muslim dan harus dipertahankan. Seluruh umat Islam adalah satu umat, dan tanah air Islam adalah satu tanah air", maka al-Khilafah al-Islamiyyah akan menjadi simbol kesatuan Islam (Banna, 1979: 161-162).

Pada tahap pergerakan di setiap tingkatan al-akh di kenal unit terkecil dari organisasi al-Ikhwan, yaitu al-usrah. Al-usrah membangun sebuah ikatan aktif di antara anggota al-Ikhwan pelaksana (al-ikhwan al-'amilin). Al-usrah juga memungkinkan para al-Ikhwan pelaksana untuk bekerja sama dan saling memberi informasi dalam urusan-urusan penting dengan cara khusus dimana at-tasarrub (kebocoran informasi) tidak akan terjadi. Sedangkan untuk al-Ikhwan tingkatan anggota pejuang (al-ikhwan al-mujahidin) juga mempunyai ikatan aktif al-usrah tersendiri (Banna, 1979: 162).<sup>29</sup>

Demikianlah sekilas profile dan ajaran-ajaran yang disebarkan al-Ikhwan al-Muslimun kepada para kader dan jaringan organisasinya di seluruh dunia. Penekanan integrasi agama dan politik hampir meliputi seluruh ajarannya. Bagi al-Ikhwan al-Muslimun, Islam memang tidak hanya mengajarkan tata hubungan antara manusia sebagai hamba dengan Tuhannya dalam kacamata ritual kegamaan semata, namun lebih dari itu, Islam dirancang sebagai sebuah sistem nilai yang mengatur segala tata kehidupan manusia sekaligus diyakini bisa menjadi solusi atas segala persoalan keummatan. Keyakinan itulah yang disebut sebagai doktrin *syumuliyatul Islam* (kesempurnaan Islam), yakni dogma yang membakukan Islam

sebagai ajaran holistik yang tidak hanya menyangkut religi/kepercayaan pribadi yang berorientasi ibadah, melainkan agama yang menciptakan sistem kehidupan dunia yang lengkap (syumul), baik dalam berekonomi, berbudaya, bersosial, dan utamanya dalam berpolitik.

Atau jika menguraikan pandangan Sayid Qutb dalam kitabnya *Ma'alim fi at-Tariq* (1981: 71-75), Islam hakekatnya bersifat holistik dan oleh sebab itu harus dijadikan basis pengetahuan komunitas muslim secara fundamental dalam ranah moral dan politik. Qutub juga meyakini bahwa kekuatan Islam terlahir sebagai bentuk respon sekaligus strategi menumpas jahiliyah modern yang menurutnya sama dengan jahiliyah periode awal sebelum Islam. Begitu juga dengan logika dominasi (hakimiyah) atas manusia harus dikembalikan semata-mata kepada Allah.

Dengan kata lain, di tangan para aktivis al-Ikhwan al-Muslimun, agama dalam ranah politik juga bertugas memberikan perekat ideologis dan motivasi sekaligus memberi rumusan tata perilaku bagi para pemainnya. Doktrin inilah yang nantinya dipegang erat oleh gerakan Tarbiyah Indonesia, bahkan ketika mereka telah melahirkan partai dakwah di tanah air. Hal ini bisa dilihat dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Pusat PKS, yang mengupas tentang partai politik dalam Islam. Buku standar yang berisi fatwa-fatwa, dan sifatnya mengikat kepada seluruh kader partai, ini menyatakan bahwa dengan mengutip Q.S. Al-Baqarah ayat 208, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup aspek din (agama) dan daulah (negara) (DSP PKS, 2005:189). Kesempurnaan Islam inilah yang diapakai sebagai justifikasi atas segala aktivitas keseharian umat Islam, termasuk di dalamnya dalam adalah urusan politik (negara).

Islam sebagaimana mereka pahami tidak hanya memuat prinsip-prinsip universalitas Islam, tetapi juga dianggap kaffah dan bersifat praksis, sebagaimana ungkapan Syaikhul at-Tarbiyyah Indonesia, Rahmad Abdullah di atas. Atau jika meminjam istilah Al-Mawardi, kepemimpinan Islam haruslah bisa 'hirasatuddin wa siyasatuddunya bihi' (memelihara agama dan mengatur urusan dunia dengan aturan agama). Di sinilah gerakan Tarbiyah, dan nantinya PKS, melakukan adaptasi secara hampir sempurna ajaran integrasi Islam dan politik dari al-Ikhwan al-Muslimun.

Wajar sekiranya, dalam keyakinan dan pelaksanaan politiknya, doktrin Syumuliyatul Islam diterjemahkan oleh PKS pada akhirnya, sebagai, "Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing ummat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan pribadi (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh 'ammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Da'wah yang sistemik dan terus-menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut" (Kebijakan Dasar DPP PKS).

Melalui buku dan beragam tulisannya, gagasan dan ide-ide Banna dan Qutub ini menjadi referensi utama dalam peletakan bangunan gerakan Tarbiyah Indonesia, sekaligus PK dan PKS, sekarang ini. Dengan mengambil spiritnya, dan memberikan

sentuhan lokalitas ke Indonesiaan, gerakan Tarbiyah Indonesia lantas menelorkan sebuah partai dakwah untuk berhendak menguasai pemerintahan dan mengembalikan negara Islam yang menerapkan syari'ah Islamiyah secara menyeluruh (syumul).<sup>30</sup>

PKS—yang kala itu masih PK—adalah salah satu partai yang menyuarakan pentingnya penerapan syariat Islam atau menghendaki agar syariat Islam dijadikan landasan riil berbangsa dan bernegara. Kebijakan politik ini tentu saja berlandaskan doktrin relasi agama dan negara dalam paradigma PKS yang bersifat integralistik; kesatuan antara agama dan negara (*ad-din wa as-siyasah*). Meski belakangan isunya digeser—sebab menghindari perdebatan yang menyejarah antara kelompok Islam dan nasionalis soal Islam sebagai dasar negara—menjadi penegakan piagam madinah (Platform DPP PKS, 2008). Islam PKS yang 'kian' membumi, lantas mengekspresikan ideologi syumuliyah al-Islam ini lebih bercorak kontekstual melalui program-program riil untuk menyentuh psikologi masyarakat.

Jika serupa sedemikian adanya dengan al-Ikhwan al-Muslimun, apakah gerakan Tarbiyah Indonesia, atau disebut juga dengan Jama'ah Ikhwan, Gerakan Dakwah, Partai Keadilan dan selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera, hanyalah organisasi yang merasa 'hanya' mendapat inspirasi dari organisasi dari Mesir ini?

Jawaban cukup tegas diberikan oleh Yusuf Qardhowi, salah satu tokoh dan intelektual fiqh dari al-Ikhwan al-Muslimun melalui satu risalahnya yang mengomentari relasi al-Ikhwan al-Muslimun dengan Partai Keadilan (kala itu). Dia menyebut Partai Keadilan (sejahtera) merupakan kepanjangan tangan<sup>31</sup> dari organisasi dari Mesir terbesar di Timur Tengah, al-Ikhwan al-Muslimun (Qardhawi, ). Artinya, secara organisatoris, gerakan Tarbiyah Indonesia, beserta partai turunannya, merupakan bagian dari Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun.

---

<sup>31</sup> Qordhowi menyebut istilah *imtidad* di sana. Secara gramatikal, *imtidad* bisa dirunut dari kata dasar *madda*, yang memiliki arti perpanjangan atau perkembangan. Oleh penerbit Pustaka al-Kautsar, yang menerjemahkan buku Qordhowi dengan judul "Islam abad 21: Refleksi abad 20 dan Agenda Masa Depan, istilah *imtidad* dialihbahaskan menjadi kata 'memiliki kesamaan pandangan dengan', hlm.56. Dengan menggunakan kalimat itu sebagai padanan kata dari *imtidad*, maka dipastikan ada pemaksaan transliterasi, yang tentu saja bisa berimplikasi pada kaburnya fakta sejarah hubungan PK dengan al-Ikhwan al-Muslimun.

## **Bab 3**

# **Metamorfosis Politik Gerakan Tarbiyah Indonesia.**

Keberhasilan para kader Gerakan Tarbiyah dalam mentahapkan kinerja dakwah semakin membuat percaya diri gerakan ini untuk terus memperluas orbit dakwahnya. Kampus, sebagai pintu masuk dakwah, telah memberi resonansi yang teramat besar bagi gerakan tarbiyah untuk bisa memasuki berbagai ruang kehidupan kemasyarakatan dengan segala macam tantangannya. Alumni LDK dan gerakan Tarbiyah yang menyebar ke segala penjuru daerah Indonesia, bahkan ke luar negeri, telah menjadi agen dakwah paling utama menyerukan pentingnya terlibat dalam jamaah Ikhwan untuk membangun Indonesia dengan pondasi Tarbiyah. Reproduksi dakwah terus dilakukan di lingkungan masing-masing. Dan tentu saja, proses dakwah semakin banyak ditopang oleh sel-sel usrah dan kaderisasi tarbiyah yang terus bertambah seiring dengan semakin luasnya daya jangkauan dakwah para kader.

Di sisi internal, gerakan tarbiyah terus menunjukkan kebesarannya tiap harinya. Resources dakwah, baik di level kader yang berupa jaringan kerja, jaringan financial, mengalami kapitalisasi yang kian membesar. Jejaring media cetak maupun virtual, pesantren-pesantren mahasiswa, pendidikan umum, serta jaringan dan binaan pengusaha yang telah dirintis, menunjukkan kemajuan tiap waktu.

Kondisi internal yang telah siap secara kelembagaan untuk berkiprah secara lebih luas dan mendalam dalam kegiatan sosial politik ini menuntut gerakan tarbiyah menambah ruang aktualisasi atau lembaga baru. KAMMI, misalnya, adalah gerakan mahasiswa yang didesign khusus oleh tokoh-tokoh gerakan tarbiyah untuk mendinamisasi politik kampus. KAMMI telah berhasil melengkapi kader-kader di LDK yang telah masuk ke politik kampus sebelumnya. Adanya tuntutan untuk penggalangan mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia untuk semakin keras meneriakkan reformasi politik di tahun 1998 inilah yang menyebabkan KAMMI dan jaringan BEM universitas yang telah dikuasai terus bergerak dan memperbesar kerja-kerja politiknya.

Ruang baru, KAMMI, lantas menjadi *icon* baru hasil dari metamorphosis gerakan tarbiyah politik kampus. Ruang baru itu pula yang semakin diperbanyak oleh gerakan tarbiyah untuk semakin bisa menjawab persoalan sosial dan politik yang terus mendera di akhir masa Orde Baru dan awal masa reformasi politik tahun 1998.

Keberhasilan KAMMI dan kader tarbiyah lainnya dalam mengawal perubahan corak regim politik di tahun 1998 setidaknya memberikan kepercayaan diri yang besar dalam tubuh gerakan tarbiyah. Yakni kepercayaan diri untuk terus berkiprah dalam ranah sosial-politik dengan tujuan memperluas nilai-nilai dakwah yang telah menjadi kewajiban utama gerakan tarbiyah. Kepercayaan diri dan kebutuhan dakwah yang lebih luas inilah yang dijadikan pijakan gerakan tarbiyah untuk membentuk satu

partai politik baru, yang melingkupi 37 partai politik lainnya dalam pemilu 1999. Partai politik yang murni lahir dari rahim ideologi gerakan tarbiyah itulah yang selanjutnya dinamakan Partai Keadilan.

Kiprah PK sebagai partai dakwah cukup memberikan warna baru dalam belantika politik tanah air. Dengan mengusung isu-isu moral, PKS seolah menjadi antithesis bagi perpolitikan pasca orde baru yang dirayakan secara berlebihan oleh para politisi di parlemen. Dakwah politik termanifestasi secara kuat dalam perilaku anggota parlemen PK dan juga hampir semua kader di lingkup sosialnya masing-masing.

Dinamika politik PK menemukan akselerasinya ketika harus berganti wajah karena gagal menembus electoral threshold. Pergantian dari PK ke PKS, melahirkan beragam konsekuensi yang mau tidak mau harus direspon oleh para petinggi dan para kader di bawah. Di sinilah, strategi politik dakwah menemukan relevansi tantangan dan ujiannya, sehingga beragam siasat, terobosan, dan langkah-langkah baru dimunculkan. Selain itu, gugatan dan kritisisme kader menjadi satu dinamika lain yang membuktikan—atau juga membenaran—berbagai ungkapan yang kerap disitir oleh pegiat PKS, bahwa “partai ini adalah partainya manusia, bukan partainya para malaikat”.

### **1) Partai Keadilan: *Jihad Siyasi* Gerakan Tarbiyah pasca Orde Baru**

Setelah berhasil menggebrak politik kampus melalui penguasaan BEM oleh jaringan KAMMI dan aktivis LDK, sekaligus menjadi salah satu kekuatan mahasiswa utama dalam menjatuhkan Soeharto pada perjuangan reformasi 98, perjalanan politik gerakan Tarbiyah semakin jauh. Tuntutan para kader untuk merespon perosalan politik datang silih berganti usai runtuhnya pemegang kendali rezim politik Orde Baru pada tahun 1998.

Terlebih pada awal reformasi dibuka kran kebebasan berekspresi yang begitu luas, dengan salah satu yang menyedot banyak energi adalah akan dilaksanakannya pemilu multi partai. Pemerintah, melalui UU no 3 tahun 1999, memungkinkan semua elemen sosial-politik masyarakat untuk membentuk satu partai yang akan turut serta dalam pemilihan umum 1999.

Era keterbukaan itu justru mencuatkan kebimbangan di antara tokoh gerakan Tarbiyah Indonesia dalam menentukan sikap politiknya, apakah akan melanjutkan perjalanan politik dakwah yang selama ini ada di kampus dan masyarakat pada level parlementarian melalui partai politik baru atau balik lagi ke medan politik ‘sunyi’ dengan strategi underground seperti sebelumnya. Musyawarah pun digelar oleh para elit (qiyadah) gerakan Tarbiyah untuk memutuskan sikap gerakan Tarbiyah pada masa mendatang.

Untuk menjawab kegelisahan itu, salah satu pimpinan gerakan Tarbiyah, Syamsul Balda<sup>32</sup>, ditunjuk oleh anggota musyawarah untuk melakukan penelitian seputar sikap gerakan Tarbiyah pasca Soeharto, dengan melihat potensi politik jama'ah Ikhwan Indonesia. Hasil riset yang dipresentasikan Balda di depan musyawarah pimpinan Gerakan Tarbiyah merekomendasikan perlunya membentuk partai politik sebagai wadah politik kader dakwah dalam kontestasi politik formal yang terbuka bagi berbagai kekuatan baru di era reformasi. Namun, ungkap Balda, rekomendasi pembentukan partai politik baru dari risetnya itu tidak cukup meyakinkan para pimpinan jama'ah, sehingga sebagian besar menolak rekomendasi itu.

Usai penolakan dari sejumlah pimpinan itu, musyawarah pimpinan jamaah Ikhwan memutuskan untuk menggelar referendum bagi seluruh kader dakwah di Indonesia, bahkan juga kader-kader dakwah yang ada di luar negeri. Referendum atau polling ini dilakukan untuk menentukan suara yang paling valid dari aktivis Tarbiyah, yang telah tersebar ke berbagai sektor pekerjaan dan bidang perjuangan itu. Banyak diantara mereka yang telah bergerak di dunia NGO, aktivitas dakwah, di perusahaan internasional, belajar di luar negeri, dan sebagian juga ada di dalam kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak kurang dari 6000 kuesioner disebar untuk melihat secara pasti suara para aktivis dakwah yang selama ini masih terikat kuat kepada pimpinan organisasi.

Dalam referendum itu, ditawarkan tiga hal yang harus diisi oleh seluruh kader dakwah: 1. Membentuk partai baru, 2. Membentuk ormas, 3. Tidak membentuk parpol atau ormas. Dengan kata lain, opsi ketiga berbunyi, kembali pada gerakan bawah tanah seperti semula. Secara mengejutkan 60-an% kader Tarbiyah memilih untuk membentuk partai baru, sedangkan 30% menginginkan gerakan tarbiyah menjadi ormas, dan selebihnya, 10% tidak menginginkan keduanya.<sup>33</sup> Atau jika mengikuti penelitian Damanik disebutkan, 67% memilih opsi pertama, 27% memilih opsi kedua dan sisanya menginginkan kembali ke habitat lama (Damanik, 2002: 229).

Untuk membahas hasil penelitian tersebut, maka pimpinan tarbiyah bersepakat bermusyawarah kembali untuk menyiapkan tim kerja guna merumuskan dan meletakkan dasar-dasar pendirian partai. Tim kerja yang dibentuk beranggotakan kader-kader terbaik gerakan Tarbiyah, yang di ketuai oleh Hidayat Nurwahid. Guna mematangkan pendirian partai, maka ada beberapa orang yang mewakili dirinya sendiri yang memiliki kapasitas tertentu untuk membantu pendirian partai, diundang dan masuk dalam tim kerja. Pada akhirnya terkumpul 52 orang, yang pada akhirnya sekaligus menjadi deklarator berdirinya Partai Keadilan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Syamsul Balda. Hampir semua anggota rapat, seperti, Mutammimul Ula, Anis Matta, Hidayat Nurwahid, Salim Assegaf Al-Jufri, dan beberapa tokoh lainnya, menolak rekomendasi pendirian partai. Sedangkan yang mendukung rekomendasi Syamsul Balda adalah Masyhadi dan Abu Ridho. Hilmi Aminuddin, sebagai pimpinan gerakan Tarbiyah, lebih banyak mendengarkan perdebatan forum, seraya menyerahkan keputusan ke forum musyawarah untuk memutuskan langkah selanjutnya, yakni menggelar referendum.

<sup>33</sup> Wawancara Syamsul Balda.

Tepat pada tanggal 9 Agustus 1998, 52 orang itu berdiri di panggung di hadapan ribuan massa yang tumpah ruah di halaman masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, menyaksikan deklarasi pendirian partai baru gerakan Tarbiyah tersebut. Hidayat Nur Wahid, yang didapuk menjadi ketua Dewan pendiri PK, membacakan pernyataan deklarasi di atas panggung dengan saksi tim 52, dan sekira 50.000an kader dan simpatisan yang menyambut berdirinya partai mereka secara gembira dan suka cita. Kelimpuluh dua orang itulah yang nantinya dikenal dalam sejarah sebagai, deklarator dan pendiri Partai Keadilan, merek adalah (Damanik, 2002: 231-232):

Nama	Nama
1. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA.,	27. H. M. Anis Matta, Lc.,
2. H. Luthfi Hasan Ishaq, MA.,	28. Dra. Zirlirosa Jamil,
3. Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri, MA.,	29. Drs. H. Suharna S., MT.,
4. Dr. Mulyanto, M.Eng.,	30. H.M. Ihsan Arlansyah Tanjung.,
5. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.,	31. Syamsul Balda, SE. MM.,
6. Drs. Ir. H. Abu Ridho, A.S.,	32. H. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,
7. H. Mutammimul Ula, SH.,	33. Sumanjaya Rukmandis,
8. K.H. Abdul Hasib Hasan, Lc.,	34. Ahmad Heriawan, Lc.,
9. Fahri Hamzah, SE.,	35. Drs. Erlangga Masdiana, M.Si.,
10. Dr. H. Daud Rosyid Sitorus, MA.,	36. Didik Ahmadi, Ak, M.com.,
11. Drs. H. Mukhlis Abdi.,	37. Ir. H. Suswono,
12. Dr. Agus Nurhadi,	38. Ahmad Zainuddin, Lc.,
13. Igo Ilham, Ak.,	39. K.H. Abdur Roqib, Lc.,
14. Chin Kun Min (Alhafidz),	40. K.H. Abdullah Said Baharmus, Lc.,
15. Drs. Arifinto,	41. H. Ahmad Hatta, MA, Ph.D.,
16. Nursanita Nasution, SE, MS.,	42. H. Makmur Hasanuddin, MA.,
17. H. Rahmat Abdullah,	43. Dra. Hj. Siti Zainab,

18. Dr. H. Ahmad Satori Ismail,	44. Dra. Sri Utami,
19. Ir. H. Untung Wahono,	45. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM.,
20. Mashadi,	46. dr. H. Naharus Surur,
21. H. Maddu Mallu, SE, MBA.,	47. Drs. Muhroni,
22. H.M. Nasir Zein, MA.,	48. H. Aus Hidayat,
23. K.H. Acep Abdul Syukur,	49. Ir. H. Tifatul Sembiring,
24. Dr. H. Ahzami Samiun Jazuli, MA.,	50. Drs. Almuzammil Yusuf,
25. K.H. Yusuf Suspendi, Lc.,	51. H.M. Tizar Zein,
26. Hj. Yoyoh Yusroh,	52. H. Fahmi Alaydrus, S.Psi.

Tim ini lantas bergerak cepat untuk menyiapkan semua keperluan sebuah partai, mulai dari AD/ART, penyusunan dewan pimpinan partai, sampai sosialisasi ke seluruh kader untuk membuka cabang-cabang partai di daerahnya masing-masing. Pada akhirnya, disetujui istilah Keadilan, sebagai nama partai jama'ah Ikhwan tersebut.

Partai Keadilan pada awal munculnya di kenal sebagai partai religius dan intelektual, karena berisikan kaum terdidik kota jebolan kampus-kampus di beken di tanah air maupun di luar negeri yang hamper semuanya berkiprah di gerakan Tarbiyah. Setelah deklarasinya, partai ini juga dilihat publik sebagai partai anak muda kota, karena rata-rata para aktivisnya adalah aktivis kampus yang memiliki kontribusi besar dalam menurunkan Soeharto.

Tak hanya kader dan simpatisannya yang terlihat muda dan energik, komposisi pimpinan partai juga banyak diisi oleh orang-orang muda, yang juga memiliki gelar akademik tinggi. Sebutlah presiden pertama Partai Keadilan, Nurmahmudi Ismail. Doctor lulusan Texas A&M ini diberi tanggung jawab untuk mengomandoi Partai Keadilan disaat usianya belum genap berusia 37 tahun. Anis Matta, lulusan LIPIA Jakarta ini juga belum genap berusia 35 tahun tatkala menjadi Sekjenjnya.

Apapun label yang disematkan oleh para pemerhati, partai Keadilan adalah partainya kader Tarbiyah. Dalam sebuah buku bertajuk 'Politik Dakwah Partai Keadilan' yang ditulis oleh Syamsul Balda, Abu Ridho, dan Untung Wahono (2000), partai keadilan juga menamakan dirinya sebagai partai Dakwah, karena seluruh aktivis politiknya sejatinya juga dimaksudkan untuk meneruskan dakwah, sebagaimana aktivitas mereka sebelumnya di kala masih dalam format gerakan Tarbiyah. Partai Keadilan mendesign dirinya menjalankan *al-da'wah al-khassah*, yakni dakwah yang ditujukan kepada pemangku pemerintahan, parlemen, dan para elit politik lainnya, sebagaimana tahapan kedua dakwah bagi aktivis al-Ikhwan al-Muslimun, untuk menoleh kepada Islam sebagai solusi atas persoalan kebangsaan. Atau dengan kata lain, pendirian partai oleh aktivis Gerakan Tarbiyah itu merupakan satu bentuk lanjutan dari jihad yang telah mereka kerjakan selama ini, yakni menuju *jihad siyasi*, berjihad di gelanggang politik.

Karena itu, beberapa hari setelah berdirinya, tepatnya tanggal 22 Agustus 1998, presiden PK menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, bahwa "ketika dengan kemantaban hati kita deklarasikan PARTAI KEADILAN segera kita masuki dunia yang lebih luas dalam wahana integralitas Islam. Ingat, integralitas Islam adalah satu karakteristik langkah-langkah perjuangan kita". (Sikap Kami, DPP PK, 2000: 23). Atau seperti ungkapan Anis Matta, dalam buku yang sama, bahwa Islam yang menjadi asas Partai Keadilan adalah sistem kehidupan yang integral dan akrenanya memiliki cara pandang yang unik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi manusia sepanjang seajrah. "Kami percaya bahwa agama yang Agung ini sarat dengan solusi-solusi yang sangat dibutuhkan bangsa Muslim ini. Islam sebagai referensi dalam membaca perosalan kita menjadi lebih signifikan karena referensi-referensi dari ideology lain terbukti gagal menyelesaikan problematika bangsa kita."

Partai Keadilan bukanlah partai yang ahistoris, yang tidak memiliki landasan pergerakan sama sekali. Hampir seluruh *resources* partai ini berasal dari gerakan Tarbiyah yang telah berkiprah selama hampir 20 tahun kala deklarasinya saat itu. Hal ini didasarkan pada satu adagium yang dilahirkan para pemimpinnya, bahwa *al-hizb huwal jama'ah wal jama'ah hiyal hizb* (partai adalah jama'ah dan jama'ah adalah partai) (Balda dkk, 2000: 80). Artinya, Gerakan Tarbiyah—al-Ikhwan al-Muslimun cabang Indonesia—dengan Partai Keadilan pada dasarnya adalah satu tubuh yang memiliki satu tujuan<sup>34</sup>.

Karenanya, para aktivis gerakan tarbiyah tidak diperkenankan untuk membedakan sama sekali antara gerakan Tarbiyah atau Jama'ah Ikhwan dengan Partai Keadilan. Hak dan kewajiban kader akan sama nilainya, baik dalam partai Keadilan maupun dalam Jama'ah Tarbiyah. Karena konsekuensi yang diterima oleh seorang kader dari aktivitasnya, baik di dalam jama'ah dengan di dalam partai Keadilan adalah sama.

---

<sup>34</sup> Wawancara Syamsul Balda

Dalam aktivitas keseharian misalnya, militansi yang selama ini melekat pada diri kader dalam menjalani aktivitas dakwah melalui gerakan Tarbiyah ditampilkan sama persis untuk perjuangan partai. Menjalankan usrah untuk pembinaan dan penambahan jumlah kader sama sifatnya dengan kampanye, baik *door to door* maupun secara massal kepada publik, untuk memilih Partai Keadilan. Loyalitas kader kepada pimpinan jama'ah tidak boleh berbeda dengan loyalitas kader tatkala diminta untuk aksi turun lapangan dengan membawa atribut Partai Keadilan. Artinya, 'pahala' dari amaliyah seorang kader di dalam jama'ah sebanding dengan amaliyah di dalam partai. Apapun usaha yang dikerahkan kader untuk membesarkan partai sama dengan membesarkan jama'ah. Dan pada akhirnya, sebagaimana keyakinan yang tertanam kuat dalam diri seorang kader gerakan Tarbiyah, kemenangan partai adalah kemenangan dakwah Islam.

Dengan pondasi doktrin gerakan Tarbiyah yang kokoh itulah, Partai Keadilan melaju ke medan dakwah yang lebih luas melalui pertarungan politik pada pemilu 1999. Loyalitas kader yang begitu tinggi mengantarkan Partai Keadilan meniti tahap demi tahap kontestasi politik pertama kalinya. Misalnya di masa kampanye, bisa dibayangkan massa PK adalah massa paling solid dan memiliki kesadaran paling tinggi dibandingkan dengan partai lainnya. Setiap kali partai Keadilan berkampanye, para kader datang dengan jumlah besar dan atribut yang mereka siapkan sendiri. Tanpa iming-iming uang bensin atau kaos para kader akan siap digerakkan oleh partai ke manapun juga. Mereka begitu sadar bahwa bahwa tiap gerak terayun dari tubuh mereka bermakna dakwah dan syiar Islam, dan karenanya untuk mengundang simpati masyarakat mereka harus menggelar kampanye secara simpatik dan sopan.

Dalam tiap kampanyenya, partai Keadilan bergerak hanya berbasis massa loyal mereka. Hampir tidak ada tokoh terkenal yang mengkampanyekan partai ini selayaknya partai lain yang diangkat oleh tokohnya. Partai Keadilan tidak memiliki orang sepopuler Amien Rais, se kharismatik Gus Dur, ataupun seterkenal Megawati. Demikian juga dengan nama gerakan Tarbiyah yang tidak lah dikenal kebanyakan publik, karena sifat gerakannya yang eksklusif dan bawah tanah sebelumnya. Hal ini berbeda dengan PKB yang didukung oleh massa NU atau PAN yang disupport oleh massa Muhammadiyah. Partai Keadilan hanya memiliki jama'ah Ikhwan, dan simpatisan yang umumnya berasal dari keluarga kadernya sendiri.

Desas desus di publik juga tak cukup membantu, bahkan melemahkan, citra partai ini. Umumnya, umat Islam Indonesia melihat, partai Keadilan adalah partai Islam yang eksklusif dan cenderung mengajarkan ajaran yang bercorak tak ramah dengan Islam yang mereka anut. Tampilan berjenggot para ikhwannya dan jilbab besar yang menjuntai ke separoh tubuh para perempuannya setidaknya mengindikasikan hal tersebut: sesuatu yang baru di pentas publik, yang tidak cukup-familiar bagi tradisi ber-Islam di pedesaan.

Diawal kiprahnya, satu-satunya kekuatan yang mengerek partai ini adalah para kadernya yang begitu atraktif mengiklankan PK melalui berbagai cara: kampanye *door to door*, penerbitan buku, majalah, bulletin, dan media lain yang

dimiliki oleh para kader PK. Ada beberapa media massa yang sifatnya partisan ke PK kala itu yang yang memainkan peran yang cukup besar dalam publikasi PK.

Selain media massa yang masuk dalam "jaringan" PK itu, para politisi PK tahu persis bagaimana caranya untuk senantiasa masuk ke dalam publikasi media dan membangun image positif atas dirinya. Gebrakan demi gebrakan politik semenjak berdirinya sampai dengan pemilu 1999 diproduksi oleh partai dakwah ini, sehingga PK senantiasa tampil elok di media massa nasional. Salah satu yang mencengangkan adalah bersatunya ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan dalam memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota dengan berkumpul di Bundaran HI sebagai penanda berakhirnya masa dan jadwal kampanye PK di Jakarta.<sup>35</sup> Pada tanggal 3 Juni 1999 itu, tak ada keriuhan knalpot yang kerap menyertai kampanye suatu partai politik, tak ada kerisauan yang ditimbulkan bagi pengguna jalan, tak ada pula arogansi yang ditampakkan para kader kepada publik. Semua proses kampanye dijalankan secara santun, tertib, dan simpatik. Sikap seperti inilah yang pada akhirnya mengkapitalisasi persepsi publik terhadap perilaku politik PK secara keseluruhan di kemudian hari.

Gebrakan politik lain yang juga dicatat media adalah kesepakatan PK dengan beberapa politik Islam dalam membuat kesepakatan politik untuk menggabungkan sisa suara yang masing-masing diperoleh partai Islam. Kesepakatan *stembus accord* ini juga diikuti oleh seruan kepada publik oleh para elit parpol tersebut, untuk tidak memilih caleg yang tidak beragama Islam. Delapan partai politik berasaskan Islam, PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905, menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (*stembus accord*) hasil Pemilu 1999 adalah.<sup>36</sup>

Dari beberapa langkah politik PK sebelum pemilu 1999 yang menyedot perhatian publik, tentu saja gebrakan untuk memunculkan calon presiden sendiri adalah yang paling menarik. PK secara meyakinkan mengusung Dr. KH. Didin Hafiduddin sebagai calon presiden partai dakwah itu. Seolah tak gentar dengan nama-nama populer lain yang juga berkeinginan maju sebagai capres kala itu, PK mengusung satu nama yang, bisa jadi sebelum dicalonkan sebagai capres dari PK, wajahnya belum pernah melintas di televisi. Namun, dosen IPB yang juga ulama Bogor itu menyatakan siap dipasang PK untuk menghadapi Megawati yang sedang di puncak ketenarannya, atau Gusdur yang begitu memikat karena gebrakan politiknya yang tak gampang ditebak, Amien Rais yang memesonakan sepanjang reformasi 1998, atau juga Yusril Ihza Mahendra yang selalu optimistis.

Bukan popularitas ketokohan, modal finansial, atau kecanggihan meyakinkan anggota MPR RI—yang kala itu masih diberi wewenang oleh konstitusi sebagai pemberi mandat kepada presiden—yang diandalkan PK untuk mengusung Didin Hafiduddin. Karena tidak memenuhi "syarat umum" untuk menjadi capres bagi Indonesia pasca Orde Baru, bisa jadi, dalam hati kecil para kader dan petinggi PK,

---

<sup>35</sup> Lihat di website PKS, <http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>.

<sup>36</sup> Lihat di *Republika* 27 Mei 1998 dalam <http://www.mailarchive.com/islam@ssi1.ssi.global.sharp.co.jp/msg00922.html>.

sudah memastikan bahwa jagonya ini akan kalah di pertandingan pilpres, atau bahkan tidak masuk bursa. Apapun kondisi capresnya, kebijakan memilih Didin sebagai capres PK merupakan satu gebrakan politik yang 'unik', dan sebagai konsekuensinya, rating PK terangkat di berbagai media nasional.

Meski butuh satu pemberitaan media secara kontinyu dan meluas, kebijakan PK dalam hal pencapresan ini didasarkan sepenuhnya pada pilihan ideologis yang selama ini menjadi pijakan yang kokoh perilaku politik PK. Bagi PK, Didin merupakan pilihan paling tepat karena telah melalui beberapa tahap seleksi, mulai dari administrasi sampai dengan syar'i, dalam rapat gabungan DPP, MPP, dan Dewan Syari'ah pada hari Jum'at 19 Februari 1999. Penetapan Didin Hafidhuddin sebagai capres PK, menyisihkan nama-nama calon presiden yang telah berhasil dijaring oleh Departemen Politik dan Hukum, yakni: Amien Rais, Nur Mahmudi Isma'il, Nurkholis Madjid, Deliar Noer, AM. Saifuddin, Hidayat Nurwahid, Salim Segaf Al-Jufri, dan Miftah Faridl. Dalam Bayanat yang dikeluarkan partai (Sikap Kami, 2001:74-75) dijelaskan bahwa penetapan Didin Hafidhuddin sebagai capres PK setidaknya pada 9 hal;

1. Telah memenuhi syarat yang telah dirumuskan dalam Mukernas I PK, yakni *al-za'imul 'alim dan al-'alimu al-zaim* (negarawan yang ulama dan ulama yang negarawan).
2. Memenuhi syarat konstitusional, yakni lolos seleksi usia, 48 tahun.
3. Pendukung PK
4. Proporsional, bukan dari struktur dan fungsionaris PK
5. Mewakili citra PK; Moralis dan Saleh, Professional, Patriotik, Moderat, Demokrat, Reformis, Independen, Muda dan Visioner.
6. Kapasitas intelektual dan keulamaannya telah diakui masyarakat
7. Bisa diterima oleh semua elemen bangsa
8. Tokoh nasional yang tidak terlibat dan bersih dari Orde Baru maupun Orde Lama
9. Integritas keluarganya yang tak diragukan.

Satu komentar menarik diutarakan oleh Anis Matta atas majunya Didin sebagai capres PK<sup>37</sup> bahwa, "pencalonan ini menunjukkan PK tidak main-main dalam berpartai. Kami juga ingin menegaskan jati diri kami dan komitmen PK bahwa moralitas harus ditegakkan mulai dari pucuk pimpinan tertinggi hingga yang paling bawah"... Bagi PK, Didin merupakan pilihan paling rasional untuk memikul beban maha berat itu.

Dasar moralitas Islam yang kuat mengiringi segenap langkah politik PK, disatu sisi telah mengangkat citra partai sebagai gerakan kaum pembaharu yang mampu menunaikan harapan rakyat bagi munculnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, namun di sisi lain mencuatkan berbagai isu yang tak sedap seputar corak

---

<sup>37</sup> Lihat di <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/03/20/0042.html>

Islamnya. Terutama sekali, stigma Islam 'keras, tak kenal kompromi, dan eksklusif' yang lahir dari rahim satu pergerakan bawah tanah dan tak ramah terhadap Islam lokal, kerap kali dilabelkan pada diri PK. Stigma ini memang tak mudah diurai, terutama menghadapi masyarakat di pedesaan yang masih kuat asosiasinya pada berbagai oramas Islam, terutama NU dan Muhammadiyah. Oleh karena butuh waktu untuk lebih banyak berinteraksi dan meyakinkan masyarakat di pedesaan, PK diawal berdirinya hanya bisa mengandalkan basis suara massa Islam di perkotaan sebagai pendulan suara pada pemilu 1999.

Berbekal kekuatan dan kelemahan partai yang demikian itu, maka tak mengagetkan ketika dalam pemilu 1999 PK meraup suara yang tidak signifikan. Keraguan pengamat akan perolehan suara PK yang 'bias kota' itu menemukan sandaran pembuktiannya di lapangan. Pada pemilu pertama kali di era reformasi itu, PK meraih suara sebanyak 1.436.565 atau sebanding dengan 1,43% suara dari total suara yang diperebutkan partai-partai politik peserta pemilu. Dengan perolehan suara itu PK menempati urutan ke-7 partai politik peroleh suara terbanyak, berbekal suara sebanyak itu PK berhak mengirimkan 7 wakilnya di DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten.

Hasil PK yang tak cukup bagus di kali pertama keikutsertaannya dalam pemilu itu segera direspon oleh pimpinan partai. Bagi PK, apapun hasil dari politik formal gerakan Tarbiyah itu tak menyurutkan para petinggi dan kadernya untuk bersyukur atas hasil yang diraih itu. Lewat sebuah Seruan Dalam Menyikapi Hasil Pemilu (Sikap Kami, DPP PK 2000:33), Presiden dan Sekjen PK menulis, "menghimbau kepada para fungsionaris, kader dan simpatisan di setiap tingkat untuk mensyukuri ni'mat yang Allah berikan dan ikhlas menerima hasil perolehan saura seutuhnya. Tidak ada kamus "kalah" dalam perjuangan dakwah Islamiyyah, karena pada hakikatnya dakwah ini adalah milik Allah dan bagi Allah tak ada kata kalah".

Demikianlah narasi politik PK yang akhirnya memperoleh suara yang tak signifikan dalam pemilu 1999. Perolehan minimalis ini tentu saja membuyarkan impian PK untuk bisa terus mengajukan Didin Hafidhuddin sebagai capres, karena harus realistis melihat kekuatan yang ternyata tak cukup kuat untuk bertarung sendirian, menghadapi beberapa calon presiden yang didukung oleh kekuatan politik besar. Meski demikian, perjuangan politik di parlemen di hari kemudian tetap menunjukkan kapasitas berpolitik para da'i Ikhwan itu. Mereka tetap menjadi salah satu kekuatan politik yang menentukan dalam berbagai kebijakan politik parlementarian yang akan terus tercatat dalam sejarah politik Indonesia pasca Orde Baru.

## 2. Kiprah Politik PK dan kerja-kerja Parlementarian

Sebagai partai dakwah, PK menegaskan bahwa parlemen adalah mimbar dakwah dan karenanya para politisi PK yang ditugaskan untuk masuk ke parlemen harus membawa misi dan menjalankan amanah dakwah. Tulisan dibawah ini adalah kiprah para da'i PK di parlemen yang untuk kali pertama menjalani *siyash* (politik) di

parlemen Republik Indonesia pada masa reformasi, yang tentu saja menghadapi begitu banyak masalah.

Partai Keadilan tampil pertama kali dalam politik parlementarian di level nasional melalui 7 wakilnya di DPR<sup>38</sup>. Sebagaimana aturan perundangan kala itu, sebuah partai bisa membentuk satu fraksi jika mampu meraih 10 kursi di parlemen. Karena tidak cukup untuk membentuk satu fraksi, maka politisi PK menggabungkan diri dengan para politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membentuk satu fraksi di parlemen, Fraksi Reformasi.

Kedekatan basis massa diantara mereka serta senasib sepenanggungan dalam perjuangan reformasi bersama tokoh PAN, Amien Rais, menjadi salah satu alasan mengapa PK meleburkan diri dengan politisi PAN dan akhirnya membentuk satu fraksi bersama, fraksi Reformasi. Tawaran PAN terhadap PK untuk membentuk satu aliansi strategis di parlemen beberapa waktu sebelum pemilu 1999 digelar juga menjadi salah satu petanda dari niat baik PAN untuk berkongsi dengan PK, dan menjadi keyakinan PK untuk menerima tawaran tersebut.

Meski bukanlah partai Islam dan memiliki juga legislator yang tidak beragama Islam, bagi PK, PAN di bawah komando Amien Rais tetap memiliki integritas dan komitmen untuk memperjuangkan ummat dan reformasi dan karenanya PAN dianggap memiliki kesamaan agenda dan visi dengan PK. Dalam bahasa PK, menjadikan PAN sebagai koalisi strategis di parlemen adalah pilihan tepat karena PAN termasuk dalam kategori "*aqrabuhum ilal Islam wal Muslimin*" dan "*anfa'uhum ilal Islam wal Muslimin*" (kedekatannya dengan Islam dan kaum Muslim dan kemanfaatannya kepada Islam dan kaum Muslim) (Sikap Kami, 2001: 83-84).

Dalam fraksi reformasi, PK bahu-membahu bersama PAN merumuskan berbagai kebijakan politik yang secara tegas menjaga kepentingan ummat Islam. Inisiasi politik PAN soal Poros Tengah, misalnya, disambut baik oleh PK karena bisa dijadikan sarana perjuangan untuk menyatukan suara dari beberapa partai Islam, termasuk partai yang memiliki basis massa Islam yang luas, seperti PKB. Kebijakan PK begitu jelas dalam keterlibatannya di Poros karena landasan idiilnya adalah tekad untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam sebagai refleksi dari tanggung jawab PK kepada ummat. PK perlu terus memelihara *hudhur siyasi* (kesertaan dalam politik)

---

<sup>38</sup>. Nama-nama anggota DPR dari PK hasil pemilu 1999 adalah: Nur Mahmudi Isma'il, Mashadi, Mutammimul Ula, T.B Soenmandjaya, Rokib Abdul Kadir, Zyrlirosa Jamil, Irwan Prayitno. Tak lama kemudian, Nurmahmudi Ismail yang terpilih jadi menteri Kehutanan dan Perkebunan di era presiden Gus Dur digantikan oleh Syamsul Balda, S.E, MM. M.Sc. Pada tahun 2003, Syamsul Balda direcall dari parlemen dan digantikan oleh Yoyoh Yusroh. Selang beberapa bulan Zyrlirosa Jamil juga direcall dan digantikan oleh Hj. Aan Rohana. Recalling Syamsul Balda dan Zirly Rosa menurut Maburi (wawancara tanggal 29 Mei 2008) terkait dengan kasus yang tak mungkin dibuka ke publik karena telah menjadi aib partai. Mencuatlah kasak-kusuk di lingkungan kader dengan mengaitkan isu korupsi dan 'perzinahan' di seputar kebijakan recall itu. Namun kesemua tuduhan yang dialamatkan, terutama, kepada Syamsul dibantah olehnya. Bahkan ketika Syamsul klarifikasi ke Hidayat Nurwahid, saat itu sebagai presiden partai, dia tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Meski difitnah dan dibunuh karakternya secara kejam, atas nama menjaga keutuhan jama'ah, syamsul menyudahi konflik itu, dan tidak melanjutkan ke meja hijau (wawancara Syamsul Balda). Untuk melihat komposisi terakhir aleg PK di fraksi reformasi lihat di <http://www.mpr.go.id/index.php?section=fraksi&id=10&periode=1999-2004>, di akses pada 18 November 2008

pada arena poros tengah untuk mendorong pengembangan *wihdatul ummah* (persatuan ummat) (Sikap Kami, 2001:81).

Pada awalnya PK termasuk dari kekuatan politik yang ragu bahwa Poros Tengah, melalui tokohnya Amien Rais secara serius mendukung Gus Dur sebagai calon presiden. Usulan Amien Rais soal pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden, menengahi dua kekuatan politik yang terkonsentrasi pada dua kubu yang secara diametral berseberangan; Megawati dan Habibie, direspon secara kritis oleh PK. Bahkan para petinggi PK harus beberapa kali konsultasi dengan Amien Rais khusus untuk meyakinkan bahwa pilihan ke Gus Dur bukanlah sebuah kekeliruan politik mendasar sehingga muncul satu penyesalan di kemudian hari.<sup>39</sup> Skpetisisme PK mendukung Gus Dur bukan tidak berasal. Salah satu hal yang menyebabkan PK ragu adalah karena Gus Dur<sup>40</sup> memiliki kepribadian yang unik dan sering melontarkan hal-hal yang sensitive dan menyinggung perasaan ummat (Sikap Kami, *ibid*).

Namun, ketika Habibie meninggalkan bursa pencapresan dan pencalonan presiden mengerucut dengan menyisakan dua kandidat, Gus Dur dan Megawati, PK mendukung langkah politik Poros Tengah dan lantas merapatkan barisan di belakang Gus Dur. Menurut Majelis Syuro PK (Sikap Kami, 2001:91), criteria calon presiden yang *tahqiqul masholih* dan *tafwitul mafasid* (yang lebih bisa merealisasi kebaikan bagi ummat dan bisa meminimalisir/menghilangkan kerusakan pada ummat) adalah dengan cara menjadikan Gus Dur, bukan Megawati, sebagai presiden.

Demikianlah narasi perjuangan politisi PK di parlemen pada awal-awal dakwah politik mereka di medan parlemen. Jika dilihat dari berbagai kebijakan politiknya, para politisi PK senantiasa mendasarkan hampir semua kebijakan politiknya itu pada satu landasan aqidah Islam dan memiliki orientasi perjuangan atas ummat Islam secara kuat. Hal inilah yang pada akhirnya menunjukkan jatidiri PK sebagai partai kader paling ideologis dalam belantika politik pasca Orde Baru.

Menyambut perjuangan politik di parlemen, para petinggi partai juga secara kontinyu menyuarakan beragam isu dan seruan seputar pembelaan terhadap kaum muslim yang teraniaya. Isu-isu tentang keteraniayaan kaum muslim secara global seperti penjajahan Israel ke Palestina dan penyerbuan tentara Amerika ke Afghanistan serta Iraq, merupakan serangkaian isu yang paling digemari untuk disorot oleh para petinggi PK dan ribuan kadernya.

Ribuan massa akan dikerahkan untuk melakukan demonstrasi dan menyerukan kepedulian para kader PK kepada dunia muslim yang terus-menerus dipinggirkan. Seperti yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2000, puluhan ribu

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Syamsul Balda.

<sup>40</sup> Karakteristik Gus Dur yang susah dikendalikan dan terkesan *mencla-mencle* menjadi keraguan utama bagi para politisi PK apakah bisa mempengaruhi kebijakannya kelak. Gus Dur juga dianggap tak responsive terhadap penderitaan ummat Islam yang sering didzalimi oleh kekuasaan, bahkan dengan gagasan pluralism dan toleransi antar ummat beragamanya, Gus Dur sering terlihat membela kepentingan non-muslim. Pada posisi inilah Gus Dur dianggap menyakiti ummat.

massa Partai Keadilan (PK) berunjuk rasa di halaman Gedung DPR seraya membakar bendera Israel sebagai bentuk kecemasan terhadap Israel yang secara tak berkesudahan melakukan penjajahan dan kesewenangannya terhadap rakyat Palestina. PK juga meminta agar pemerintah RI konsisten dengan sikap menyayangkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangannya ke negara Palestina<sup>41</sup>. Bahkan, saat itu, PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al-Aqsha untuk menggalang bantuan sekaligus tekanan internasional untuk penyelamatan Palestina dari agresi Israel yang menahun itu.

Kader-kader PK yang diorganisir oleh para petinggi partai, juga gencar menyerbu kedutaan besar Amerika, dengan terlebih dahulu *long march* kiloan meter untuk 'memutihkan' jalan-jalan utama Jakarta dengan baju takwa dan jilbab putih mereka. Pengutukan terhadap terorisme AS karena menggelar agresi militer ke Afghanistan menjadi isu utama dalam aksi yang digelar pada secara beruntun di bulan Oktober 2002 itu. Guna menambah daya desak lebih tinggi, 150 anggota legislatif PK dari seluruh Indonesia diterjunkan bersama ribuan kadernya mendatangi Kedubes AS untuk memprotes secara keras kebijakan agresi tersebut<sup>42</sup>.

Di Indonesia, seruan dan kecaman atas pembantaian umat Islam di poso, Ambon, juga dilakukan.

Selain pijakan aqidah yang kuat, moralitas senantiasa menempati urutan pertama dari syarat-syarat perilaku politik PK. Sebelum berbicara tentang kapasitas lain yang dibutuhkan untuk mendandani kerusakan negeri ini, moralitas yang didasarkan pada basis nilai dan ajaran Islam yang kental itu harus terlebih dahulu melumuri kepribadian seorang kader untuk mengemban amanah dakwah, baik di level negara ataupun di level masyarakat. PK dan para kadernya sendiri mengoperasionalkan nilai-nilai Ideologi Islam yang mereka pegang itu ke dalam 7 karakteristik dasar politiknya, (**DPP PK,** ): Moralitas, Profesional, Patriotik, Moderat, Demokrat, Reformis, dan Independen.

Beberapa karakteristik yang dirumuskan secara matang untuk melekat kuat pada perilaku politik PK, akan dijabarkan sekaligus dipakai sebagai unit analisis bagi berbagai kebijakan PK dan perilaku politik politisi PK di parlemen dalam merespon lingkungan dan dinamika politik yang berkembang di luar mereka.

Dari berbagai karakteristik PK di atas, tentu saja yang pertama dan utama adalah sisi moralitas yang cukup menonjol dari perilaku politik partai dakwah ini. Dalam rumusan PK, sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam ini akan ditampilkan sebagai basis serta keteladanan bagi publik. Dari berbagai fakta yang tampil ke permukaan dan telah menjadi keyakinan Islam ala PK, keunggulan intelektualitas dan materi terbukti tidak memiliki manfaat sama sekali jika sisi moral diabaikan. Sebagai konsekuensinya, kealpaan pendekatan moral dalam mengelola negara telah mengakibatkan dampak yang begitu besar, seperti krisis yang tak habis-habis mendera, sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>41</sup> Periksa di <http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>, diakses pada 23 Oktober 2008

<sup>42</sup> Lihat di <http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>, *ibid*.

Perbaiki moral dan pengendalian akhlaq bagi para pemimpin bangsa ini menjadi tawaran utama yang terus didengungkan oleh PK untuk bisa meminimalisir kerusakan yang telah begitu parah menggerogoti bangsa ini, sekaligus mengembalikan lagi kejayaannya. Pengejawantahan dari moralitas PK ini adalah sikap jujur, anti korupsi, dan hidup sederhana yang meliputi hampir semua kader dan terutama para politisinya di parlemen.

Epos keteladanan yang ditunjukkan para politisi PK di parlemen melalui hidup bersahaja dan menjunjung tinggi moralitas menjadi salah satu 'nilai jual' para kader PK ketika itu. Para politisi PK tampil apa adanya dengan kesederhaan perilaku, di tengah tuntutan tampil 'mewah' ala anggota parlemen Indonesia kala itu. Dari beberapa anggota Dewan PK yang jadi sorotan media karena kesederhanaannya tentunya adalah Mashadi. Alih-alih mengendarai mobil mewah yang kerap berjejer di parkir gedung parlemen, mantan jurnalis Buletin Dunia Islam yang pernah merasakan jeruji besi Orde Baru itu, terlihat nyaman ketika *ngantor* ke DPR dengan sepeda motor atau naik angkutan umum.

Yang cukup menyita perhatian sekaligus mengalirkan simpati publik tentu saja adalah pemberitaan yang cukup deras akan sikap 'bersih' dari urusan suap dan korupsi yang dijunjung tinggi oleh para politisi PK di semua level parlementer, di awal kiprahnya. Kerap juga media memberitakan sikap lantang politisi PK di komisinya untuk menentang kebijakan kenaikan tunjangan, pemberian fasilitas berlebih, mengembalikan atau mendistribusikan uang hadiah ke masyarakat, dan seterusnya.

Di hampir semua DPRD yang terisi oleh politisi PK, dapat dipastikan ada sikap penolakan terhadap uang pesangon di akhir masa jabatan anggota dewan, yang memang lazim kala itu. Di DKI misalnya, politisi PK menolak adanya uang pesangon sebesar 25 juta dan usulan pemberian hadiah mobil Hyundai kepada setiap anggota DPRD DKI setelah masa pensiunnya dari parlemen DKI. Cerita heroik serupa terjadi di Jawa Barat. Banyak anggota DPRD Jawa Barat pada tahun 2003 sempat dibuat gemas oleh aksi dua politisi PK, yang mendistribusikan uang yang diterima masing-masing 250 juta kepada masyarakat di empat wilayah karena menganggap hadiah uang sebesar itu tidak patut.<sup>43</sup> Setelah dua politisi PK tersebut membeberkan aliran dana ke DPRD Jabar itu, maka terkuaklah adanya uang kadeudeuh (hadiah) miliaran rupiah yang mengalir ke sejumlah anggota DPRD Jawa Barat.

DPRD Jawa Tengah juga memiliki 'bintang media' karena sikapnya yang senantiasa berseberangan dengan sejawatnya, anggota DPRD lain, soal pemberian fasilitas dan beragam uang hadiah. Zuber Safawi, politisi PK di DPRD Jawa Tengah yang kerap naik kendaraan umum itu, gemar mengungkapkan berbagai kasus di DPRD Jateng, seperti adanya dana mobilitas Rp 95 juta per anggota DPRD, fasilitas mobil dinas Honda CRV dan Suzuki Escudo 2.0, dana purna bhakti masing-masing Rp. 100 juta, dana Tunjangan Hari Raya (THR), serta sumbangan bagi fraksi sebesar Rp 1,7 miliar. "Saya ingin jujur kepada rakyat, terutama konstituen saya", untkap

---

<sup>43</sup> Lihat di [http://www.transparansi.or.id/berita/berita-januari2003/berita2\\_220103.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-januari2003/berita2_220103.html), diakses pada 21 September 2008

anggota DPRD Jateng yang tetap ngontrak rumah itu ketika di tanya kolega atau wartawan.<sup>44</sup>

Dari beberapa gambaran perilaku politik politisi PK kala itu, jelas sekali bahwa moralitas dan kebersahajaan hidup menjadi sandaran utamanya. Image 'bersih' yang melekat pada mereka lantas dikedepankan sebagai potret umum bagi seluruh perilaku politik PK, yang tentu saja mendapatkan banyak simpati publik.

Selain karakteristik moralis yang menonjol dari perilaku politik politisi PK, profesionalisme dan patriotism yang telah menjadi acuan perilaku bersama itu juga tampak lekat dengan politisi PK. Bagi PK, profesionalitas itu bercirikan penguasaan detail masalah yang akan mengantarkan partai pada kebijakan-kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dihadapi, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Tugas-tugas parlementarian adalah bagian dari profesionalitas politisi PK, sebagaimana ungkap Mutammimul Ula<sup>45</sup>. Baginya, menjadi seorang DPR adalah kerja professional, yang terkait secara langsung dengan kapasitas tertentu yang dimiliki individu untuk melaksanakan tugas-tugas parlementarian. Sebagai konsekuensinya, para legislator di DPR digaji secara professional pula oleh negara.

Sedangkan patriotisme muncul karena pemaknaan terhadap kehidupan partai yang merupakan bagian dari perjuangan. Partai merupakan sarana dakwah Islam yang bertujuan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi. Bagi PK, berjuang di jalan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan. Karena itu, dalam perjuangan dakwah semacam ini butuh para kader yang berjiwa patriotik. Di PK, patriotisme kader telah dibentuk dan ditempa dalam aktivisme gerakan Tarbiyah yang berlangsung dalam tempo yang lama. Apalagi, jiwa patriotism itu dikaitkan secara langsung dengan nilai jihad dalam Islam.

Dua karakteritik itu juga terlihat pada kerja-kerja politik anggota DPR dari PK. Salah satu politisi PK di Senayan yang kerap dirujuk oleh media karena kegagahan dan keberaniannya dalam menolak berbagai kebijakan parlemen yang dipandang sebagai menggadaikan negara adalah Syamsul Balda. Sebelum di recall oleh PK, Balda terkenal sebagai 'vokalis' komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Dia mengaku terbelalak matanya melihat begitu dahsyatnya penyimpangan uang negara saat menjadi anggota komisi IX. Penjualan asset-aset BUMN, seperti Indosat, dan beberapa bank yang mendapatkan kucuran dana dari BLBI, seperti BCA<sup>46</sup>, BDNI, BII, ke tangan swasta dengan harga yang sangat murah.

---

<sup>44</sup> Lihat di <http://www.freelists.org/archives/ppi/12-2004/msg01428.html>, diakses pada 24 Oktober 2008

<sup>45</sup> Wawancara dengan Mutammimul Ula, 9 Juni 2008.

<sup>46</sup> BCA menjadi milik pemerintah sebagai pembayaran utang BLBI oleh keluarga Salim. Artinya, pemerintah telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 23,99 triliun untuk membeli 92,8 % saham-saham BCA. Setelah itu, BCA yang sudah menjadi milik pemerintah harus "disehatkan" dengan menginjeksi Obligasi Rekapitalisasi Perbankan atau OR sebesar Rp. 60 triliun. Dalam BCA sudah ada laba bersih sebesar sekitar Rp. 4 triliun. Jadi uang pemerintah yang ada di dalam BCA sebesar jumlah dari tiga angka ini atau Rp. 87,99 triliun (dibulatkan Rp. 88 triliun). Namun BCA dijual kepada Farallon senilai

“Saya katakan ke sidang komisi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan kala itu, Budiono dan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, bahwa BLBI merupakan penyimpangan dana negara yang mungkin terbesar dalam sejarah Indonesia merdeka. Mengapa bank-bank yang telah dibeli oleh pemerintah, seperti BCA yang telah sehat itu, harus dijual dengan begitu murah? Kalau sampai kalian meloloskan penjualan itu berarti semuanya adalah pengkhianat Negara”, cerca Balda ke hadapan semua anggota sidang.

Karena dalam voting hanya dirinya yang menolak penjualan BCA berbanding dengan 50 anggota komisi IX lain yang setuju, maka dengan lantang Balda berteriak sembari berdiri, “Tolong dicatat di lembaran negara bahwa Syamsul Balda menolak penjualan BCA dan tidak bertanggung jawab atas segala hal yang akan terjadi dikemudian hari dari penjualan BCA”<sup>47</sup>. Suara Balda yang lantang menunjukkan patriotisme dan pembelaan dirinya akan masa depan Indonesia yang telah carut marut dihadapan para predator ekonomi. Tak jarang, seperti pengakuannya, dirinya mendapat teror dari berbagai kalangan atas sikap kerasnya itu.

Sikap patriotik serupa juga muncul dari para kader, tentu saja semakin disemangati oleh sikap patriotik serupa yang ditunjukkan oleh para anggota DPR dari PK, dalam kerja-kerja kampanye dan sosialisasi PK ke khalayak ramai. Hampir tidak ada partai pasca Orde Baru yang massanya se-solid PK dalam menjalani beragam aktivitas partai. Mulai dari demonstrasi jalanan yang diorganisir oleh partai dalam menyuarakan isu anti zionisme Israel dan kemerdekaan Palestina, isu pembantaian kaum muslim di Bosnia, dan solidaritas kaum muslim sedunia,dst, sampai dengan kampanye massa yang begitu massif dan tertib-terkendali. Corak partai kader yang patriotik memang begitu kokoh melekat pada PK.

Patriotisme kader selanjutnya bisa terlihat dari konsepsi ‘sunduquna juyubuna’, kas kami adalah kantong kami. Konsep ini menunjukkan bahwa sebagai partai politik yang dimiliki dan dibangun oleh para kader yang terikat kuat kepadanya, kebutuhan dana partai berasal dicukupi dari kantong setiap kader. Dengan cara iuran rutin yang dikelola oleh partai dengan aturan tertentu, atau sumbangan spontan para kader pada momen-momen tertentu, semisal momen Munas atau pilkada, kebutuhan keuangan pokok partai relatif bisa ditutupi.<sup>48</sup> Meski demikian, Mabruki mengakui bahwa iuran rutin yang digalang kader tidak sepenuhnya bisa mengcover semua kebutuhan partai yang memang besar, karenanya partai membuka sumber keuangan lainnya semisal sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat. Yang penting untuk dicatat adalah, tradisi menghidupi organisasi secara mandiri yang telah digariskan sejak gerakan tarbiyah ini telah menjadi tulang punggung keuangan partai selama ini.

---

Rp. 10 triliun, atas usulan Pemerintah yang disetujui DPR. Jadi ada kerugian yang dibuat oleh pemerintah sendiri sebesar Rp. 78 triliun. Total kerugian pemerintah RI dalam skandal penjualan BCA ini, sebagaimana dalam hitungan Balda, adalah: Rp 32,7 triliun + Rp 78 triliun = Rp 110,7 triliun.

Ulasan lengkap dari berbagai skandal BLBI bisa dibaca di beberapa buku, misalnya Marwan Batubara dkk, *Skandal BLBI, Ramai-Ramai Merampok Negara*, Haekal Media Center, Jakarta, 2008) dan Ishak Rafiq, *Catatan Hitam Lima Presiden*, Ufuk Publishing House, 2008.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Syamsul Balda, ibid.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ahmad Mabruki, op. cit.

Sikap semacam ini juga menunjukkan karakteristik lain dari perilaku politik PK, yakni sikap independensi dari berbagai kepentingan di luar partai. Sebagaimana pernyataan Anis Matta, tidak ada kekuatan di luar partai yang bisa menentukan arah kebijakan partai, karena segala hal yang terkait dengan kebijakan partai telah digariskan melalui mekanisme syuro (Syihabuddin, 2005).

Demikianlah beberapa karakteristik dasar dari perilaku politik PK yang tetap dijaga dalam segala kiprah kepartaiannya. Karakteristik itu, terutama moralitas Islamnya, telah membentuk image bahwa PK sebagai sebuah partai dakwah dengan topangan para kader solidnya, yang secara tegas mengusung Islam kaffah sebagai basis dan orientasi perjuangannya.

Moralitas jugalah yang melambungkan image positif PK sebagai partai yang betul-betul bersih dari segala godaan suap dan penyimpangan selama kiprahnya di parlemen, 1999-2004. Image positif yang begitu tebal ini pula yang sedikit membenamkan beberapa isu penyelewengan yang mencederai politisi PK, semisal dugaan suap di kementerian Kehutanan yang melibatkan secara langsung menteri Kehutanan kala itu, Nur Mahmudi Isma'il, atau pemecatan Syamsul Balda dari DPR karena tuduhan melakukan serentetan tindak asusila dan pidana, seperti korupsi dan berzina.

Sehebat apapun perjuangan politisi PK dalam membangun *image* dan kapasitas kelembagaan politiknya, menghadapi pemilu 2004 mereka harus menghadapi satu kenyataan pahit bahwa partai kebanggaan mereka, Partai Keadilan, tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pemilu 2004. Kenyataan ini muncul sebagai dari kegagalan PK menembus electoral threshold sebesar 2%, sebagaimana yang disyaratkan oleh UU no. 3/1999.

Kegagalan menembus electoral threshold itu meniscayakan terjadinya diskualifikasi terhadap PK. Kondisi ini mengharuskan petinggi PK memutar otak untuk melakukan siyasat supaya resources partai yang telah mapan dengan jaringan kader dakwah yang semakin luas itu bisa ditampilkan kembali dalam kontestasi politik pada pemilu 2004. Para petinggi PK pada akhirnya menemukan solusi jitu dalam mensiasati aturan main yang telah mengganjalnya itu dengan melahirkan partai politik baru. Secara cepat, para petinggi PK berbagi tugas antara melanjutkan kerja-kerja politik di PK dan parlemen dengan kerja-kerja persiapan pembentukan partai baru.

Al-Muzammil Yusuf, tokoh muda kader dakwah, bersama Haryo Setyoko, mantan Sekjen KAMMI pertama, ditugaskan petinggi PK untuk merancang segala keperluan terkait pendirian partai baru tersebut. Pada akhirnya segala hal yang dibutuhkan untuk membentuk partai baru telah dipersiapkan dan melalui putusan Majelis Syuro PK, sebagai otoritas politik dan agama tertinggi partai, didirikanlah sebuah partai baru di kalangan Gerfakan Tarbiyah bertitel Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang lahir pada hari Sabtu 9 Jumadil Ula 1423 H atau bertepatan dengan 20 April 2002 ini didesign sebagai pelanjut perjuangan PK di pentas politik selanjutnya.

Sebagaimana yang tampak pada deklarasi PK, deklarasi PKS juga dilaksanakan ditengah kemeriahan para kader dakwah yang memadati halaman masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Pekikan takbir dari 200.000an kader dan simpatisan berkumandang secara serempak bersahutan menyambut pembacaan deklarasi yang dilakukan oleh ketua pendiri PK, Al-Muzammil Yusuf. Pembacaan deklarasi PKS dihadiri oleh para tokoh PK dan para deklarator PKS sendiri, yang tentu saja diantaranya juga menjadi deklarator PK empat tahun sebelumnya. Mereka adalah, Drs. Almuzzammil Yusuf (ketua Pendiri PKS), Drs. Haryo Setyoko (Sekjen Pendiri PKS), Abdullah, Achyar Eldine, SE., Drs. Ahmad Yani, Ahmadi Sukarno, Lc., Mag., Dr. Ahzami Samiun Jazuli, MA., Ali Akhmadi, MA., Ir. Arlin Salim, Drs. Bali Pranowo, Budi Setiadi, SKH., Bukhori Yusuf, MA., Ir. Eddy Zanur, MSAE., Eman Sukirman, SE., Ferry Noor, Ssi., H. Abdul Jabbar Madjid MA. H.M. Ridwan., H.M. Nasir Zein, MA., Harjani Hefni, Lc., Dra. Herawati Noor, Herlini Amran, MA., Imron Zabidi, M. Phil., Kaliman Iman Sasmitha., M. Iskan Qolba Lubis, MA., M. Martri Agoeng., Muttaqin., Mahfudz Abdurrahman., Martarizal, DR. Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR. Muhammad Aniq S, Lc., Drs. Muhammad Budi Setiawan, Muslim Abdullah, MA., Drs. Musoli, MSc, Musyafa Ahmad Rahim, Lc., Nizamuddin Hasan, Lc., P. Edy Kuncoro, SE. Ak., Ir. Ruly Tisnayuliansyah, Rusdi Muchtar. Sarah Handayani, SKM., Susanti, Suswono, Ir. Syamsu Hilal, Ir. Umar Salim Basalamah, SIP., Drs. Usman Effendi, Dra. Wahidah R Bulan, Dra. Wirianingsih, Yon Mahmudi, MA., Ir. Yusuf Dardiri, Zaenal Arifin., Zufar Bawazier, Lc., DR. Zulkeflimansyah<sup>49</sup>.

Di awal berdirinya, PKS memiliki struktur tersendiri dibawah 'komando lapangan' Al-Muzammil Yusuf dengan supervisi langsung dari tokoh utama Jama'ah Ikhwan Indonesia, Hilmi Aminuddin, sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Selain PKS, di tangan para kader Tarbiyah telah terenggam PK yang telah menjadi pengikat politik mereka sebagai kendaraan lama perjuangan politik di parlemen. Sebelum nantinya dilebur menjadi satu, PK dan PKS kerap tampil bersama dalam berbagai even, demonstrasi, dan aksi-aksi sosial di lapangan. Sebagai contohnya adalah ketika dua partai milik gerakan Tarbiyah ini menggelar aksi damai bersama menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi jalankan pada tanggal 20 Maret 2003 ini diikuti oleh 30.000 massa kader dan berlangsung secara tertib. Selain itu, PK dan PKS juga mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang saat itu tengah dilanda konflik berkepanjangan (<http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>).

Baru setelah PKS lolos verifikasi Depkeham sebagai kontestan pemilu 2004, pada tanggal 3 Juli 2003, PK dilebur ke dalam PKS. Dengan penggabungan ini, maka seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan PK di berbagai jenjang parlemen dan semua kader PK yang selama berdirinya menjadi tulang punggung kerja-kerja politik di medan sosial itu.

---

<sup>49</sup> Lihat <http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=deklarasi> 1998, diakses pada 29 Agustus 2008

### 3. PKS: Wajah Baru, Strategi Baru

PKS lahir sebagai *ikhtiar* perwajahan baru dari jihad siyasi gerakan Tarbiyah Indonesia. 'Kegagalan' PK dalam memperluas dakwah di masyarakat— dengan salah satu tolok ukurnya adalah meraih suara signifikan dalam pemilu 1999— menjadi catatan kuat bagi para aktivis dakwah untuk lebih gencar lagi menebarkan nilai-nilai dakwah ke seluruh lapisan masyarakat. Tugas-tugas dakwah secara lebih luas inilah yang selanjutnya diemban oleh para kader dakwah melalui PKS.

Jika ditelisik lebih mendalam, ada beberapa faktor mengapa kerja-kerja dakwah PK tak cukup mampu mendongkrak suara partainya dipemilu 1999 sebelumnya. *Pertama*, image PK sebagai partai Islam 'baru', yang bercorak eksklusif dan militan, tak cukup mendapat simpati masyarakat secara luas, terutama masyarakat Islam di pedesaan yang telah terasosiasi secara kuat pada corak keislaman yang tradisional dan *localized*. Pasca reformasi 1998, Indonesia dibanjiri oleh berbagai gerakan Islam baru yang bercorak revivalistik yang tak cukup memiliki landasan kulturalnya di Indonesia, dan memiliki kesamaan target utama: meng'Islam'kan Indonesia melalui penegakan syariah sebagai konstitusi Negara menggantikan Pancasila. Misalnya saja Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Salafy dan Majelis Mujahidin Indonesia. PK adalah satu kekuatan Islam 'baru' yang kerap kali disandingkan dengan beberapa gerakan Islam radikal tersebut, yang lebih merupakan ancaman ketimbang solusi bagi Indonesia.

Kegagalan PK dalam membangun *image* ini terkait dengan strategi mendasar dalam menjual citra dirinya sebagai partai Islam baru. Jargon-jargon PK yang sangat Islam, 'melulu' bicara dari kacamata kepentingan Islam PK, persatuan umat Islam, kejayaan Islam, dan penindasan Negara adidaya terhadap kaum muslim di bosnia, palestina, dan seterusnya, terasa kurang menyentuh persoalan riil di masyarakat. Implikasi yang muncul dari 'kevulgaran menjual Islam' menciptakan jarak 'psikologi' antara PK dengan masyarakat luas, terutama massa nasionalis-religius dan nasionalis-sekuler.

*Kedua*, sebagai partai kader, PK memiliki keterbasan dalam menggerakkan kader secara lentur dan dinamis untuk menjangkau basis massa di luar komunitasnya. PK telah mentahbiskan dirinya menjadi partai kader dan karenanya di awal sekali kiprahnya, kualitas kader lebih dipentingkan ketimbang suara jutaan massa. Dikotomi yang secara tegas membayangi dua corak partai politik, partai kader dan partai massa, menemukan sandaran teoritiknya ketika melihat cara kerja PK menghadapi pemilu 1999, sekaligus perolehan suara yang diraih. Kaderisasi yang khas, dengan pola rekrutmen yang terbatas, serta sistem pengambilan policy yang relatif ketat dan terselubung, memberi konsekuensi dengan hadirnya *image* yang tak sedap sebagai partai yang 'tak ramah' terhadap publik. Hal ini ditambah lagi dengan *gap* perilaku politik kadernya dengan 'nalar' dan perilaku pemilih.

*Ketiga*, tentu saja adalah soal adaptasi dan waktu. Perubahan format gerakan, dari gerakan bawah tanah ke partai politik, tentu saja membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang tak mudah bagi para kader dakwah. Persoalan

mengkampanyekan diri, membahasakan gagasan dan ideologi, atau meyakinkan calon pemilih, adalah beberapa kebutuhan baru yang tak dijumpai oleh para kader dakwah sebelumnya.

Waktu juga menentukan bagi kurangnya PK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Persiapan menghadapi pemilu yang tak kurang dari setahun menyebabkan minimnya interaksi dan dialog dengan masyarakat secara luas. Meskipun media telah kerap kali memblow up sumbangsih pergerakan kaum muda gerakan Tarbiyah dalam reformasi politik 1998, tak cukup menarik simpati pemilih, yang tentu saja di dominasi masyarakat pedesaan. Sebagai partai baru, tak ada preseden historis dari kerja-kerja politik PK yang bisa dipakai untuk meyakinkan massa akar rumput.

Belajar dari 'kesalahan' strategi inilah, PKS bekerja keras untuk memformat ulang wajah serta strategi politiknya menghadapi pemilu 2004. Telah relative terbukti dalam sejarah politik PK, Ideologi Islam yang kuat, militansi, kokohnya moralitas, patriotism, parallel dengan manifestasi perilaku politik politisi PK, baik di parlemen maupun yang secara langsung terjun ke masyarakat. Namun, tak selamanya gagasan, maksud, dan perilaku yang telah dianggap terbaik itu ditangkap dan diterima oleh pemilih sebagai kebaikan juga. Belum tentu Islam yang diyakini sebagai solusi bagi Indonesia diyakini juga oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh umat Islam Indonesia. Lantas muncul keyakinan bersama, bahwa pemilihan isu dan image yang laik ditampilkan untuk membentuk perwajahan PKS perlu didesign. Berangkat dari kebutuhan itu PKS lantas merombak wajah dan strategi politiknya dalam menyongsong pemilu 2004.

#### **a. Citra bersih dan peduli**

Slogan "Bersih dan Peduli" yang sejak menjelang pemilu tahun 2004 dijadikan brand image dalam kampanye PKS adalah satu strategi pemasaran yang cerdas untuk menampilkan sisi perwajahan baru di dalam tubuh PKS. Tak tanggung-tanggung, penggunaan slogan ini pada akhirnya berbuah manis dengan keberhasilannya menanggung suara 7,5% pemilih, melompat hampir lima kali lipat dari pemilu 1999, sebelumnya yang hanya meraih 1,43% suara.

Gebrakan demi gebrakan para kader partai yang duduk di kursi legislative periode 1999-2004 dalam kampanye anti korupsi dan berperilaku bersih, bebas dari jebakan perilaku korup dan penyalahgunaan kewenangan setidaknya menjadi garansi bagi disematkannya slogan PKS sejak 2004 sampai sekarang. Sungguh, aleg-aleg PK, saat itu, yang jumlahnya tak banyak: 7 orang di DPR pusat dan 1 atau 2 orang di beberapa legislative daerah di Indonesia, kerap merepotkan sesama kawan aleg-nya karena kegigihannya dalam menampik beragam hadiah dan tunjangan yang deras mengucur ke lembaga legislative di setiap tingkatan itu. Tak jarang para aleg PK yang minoritas itu menjadi bahan olok-olokan sesama kolega di legislative atau bahkan mendapat terror dan ancaman dari perlbagai pihak yang merasa dirugikan dari sikap politik PK itu.

Di tengah perilaku DPR dan para aktivis partai politik yang kerap mabuk dunia di awal-awal reformasi kemaren itu, PK menyeruak ke hadapan publik dengan konsep dan perilaku yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap moralitas dan integritas. Perilaku politik PK yang 'tak lazim' itu tentu saja membiakkan antitesa terhadap perilaku politik politisi kebanyakan yang lebih kental nuansa korup dan mengesampingkan nilai-nilai moralitas lainnya. Harapan publik atas terciptanya satu model pengelolaan kekuasaan yang bebas dari nuansa korupsi sebagaimana terjadi selama puluhan tahun seolah menemukan sandaran praktisnya ketika aleg-aleg PK menawarkan satu perilaku politik yang bercorak 'sufis', tampak *emoh* terhadap kemewahan duniawi itu. Dan harapan public yang begitu besar itu direspon secara cerdas oleh PK, bukan partai lain.

Selain image 'bersih' yang coba terus dijaga, PKS juga mendeklarasikan diri sebagai partai yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan riil keummatan. Ada begitu banyak program sosial yang dirancang dan ditunaikan oleh PKS kepada masyarakat, seperti bantuan emergency kepada korban-korban bencana alam, pelayanan kesehatan secara gratis, bantuan sembako dan pasar murah dst. Hampir tidak ada bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau longsor, yang luput dari bantuan dan kehadiran para kader—berikut atribut partai—di lokasi bencana.

Kepedulian lain PKS yang begitu menonjol dan menyentuh langsung persoalan kaum miskin adalah pelayanan sosial seperti cek kesehatan umum yang sering digelar di berbagai kampung. Selanjutnya, pelayanan keagamaan juga menjadi program utama PKS. Jika ada kelompok sosial yang berencana mengadakan pengajian, dan terkendala oleh biaya untuk menghadirkan da'i, maka PKS siap menghadirkan para da'inya secara sukarela<sup>50</sup>. Dan pelayanan itu juga ada diberbagai bidang lain, seperti pendidikan, seni-budaya, dan seterusnya. Para kader PKS seolah selalu siap hadir untuk mengatasi apapun persoalan masyarakat.

Meski demikian, kepedulian tidak semata menjadi monopoli PKS dalam menjemput hati para pemilih. Partai-partai lain juga berlomba untuk tidak kalah pamor dengan PKS dalam memberikan pelayanan sosialnya. Tentu saja yang membedakan program pelayanan sosial PKS dengan partai lain terletak pada sisi kontinuitasnya. Jika banyak partai sibuk bagi-bagi sembako atau melakukan pelayanan sosial saat menjelang pemilu, merayakan satu even besar, atau terkait hari bersejarah partai, maka pelayanan dari PKS bermakna integrative dalam setiap aktivitas kepartaian yang senantiasa dijalankan oleh para kader.

PKS secara cerdas mampu mengisi kekosongan praksis dan teori politik sebagai partai politik. PKS bukanlah semata partai politik yang secara konvensional berfungsi sebagai agregasi dan aktualisasi kepentingan rakyat di parlemen untuk dijadikan acuan legislasi bagi eksekutif. Dengan melampaui teori dan praksis partai politik maenstream, PKS seolah menjelmakan dirinya sebagai "negara" dalam Negara dengan beragam tawaran pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Namun, apapun sengketa teoritik dibalik fungsi tambahan partai politik sebagaimana

---

<sup>50</sup> Wawancara Ahmad Mabruhi,.....

ditunaikan oleh PKS, ragam kepedulian yang begitu mengemuka itu tentu saja membekaskan makna perhatian tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, yang memang butuh sentuhan dan kepedulian secara langsung dari elit-elit politiknya.

Alhasil, kepedulian PKS yang menonjol dan keseriusannya dalam mendorong isu-isu moralitas semacam anti korupsi serta-merta menghasilkan 'ganjaran' sosial dan politik berupa perolehan suara yang berlipat dari rakyat di pemilu 2004. Perolehan suara yang signifikan tersebut tak pelak membelalakkan mata sebagian besar kompetitornya, sekaligus para pengamat politik, yang mungkin memandang sebelah mata PKS saat itu.

#### **b. Bersiasat dengan wacana Piagam madinah**

Salah satu dimensi perjuangan PKS yang kerap dipertanyakan publik adalah perjuangan nilai-nilai dan norma Islam ala PKS. Fakta politik menunjukkan kelompok-kelompok Islam radikal tumbuh-menjamur menyertai peralihan kekuasaan di era reformasi 1998. Diantara mereka, misalnya Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, dan beberapa kelompok lain yang eksis di daerah, secara langsung menantang ideologi Pancasila sebagai fondasi kenegaraan Indonesia untuk dikompetisikan dengan Islam yang mereka ajukan sebagai alternatif ideologi negara, bahkan ideologi global menggantikan ideologi saat ini yang mereka anggap sekuler. Publik pun bertanya, apakah perjuangan Islam ala PKS yang diturunkan dari al-Ikhwan al-Muslimun itu juga akan serupa bentuk dan capaian akhirnya dengan gerakan Islam revivalis di atas?

Sejurus dengan doktrin *al-hizb huwal jama'ah wal jama'ah hiyal hizb* yang sampai kini masih kokoh dipegang oleh semua aktivis PKS, maka merupakan sebuah keniscayaan bagi para kader PKS untuk tidak berpaling dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh jama'ah, yakni al-Ikhwan al-Muslimun. PKS akan senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran jama'ah al-Ikhwan yang telah ditanamkan kepada seluruh kader melalui proses kaderisasi selama 20-an sebelum PK, dan selanjutnya PKS, dimunculkan.

Salah satu doktrin al-Ikhwan yang senantiasa menciptakan kekhawatiran publik Indonesia, juga masyarakat dunia, karena berpotensi menjadi 'ancaman' bagi keutuhan negara dan bangsa adalah keyakinan *syumuliyatul Islam* (kesempurnaan Islam) yang lantas diderivasikan dalam sebuah doktrin Islam sebagai *din wa dawlah* (agama dan negara). Hasan al-Banna menggariskan ketentuan bahwa karena hakikat Islam adalah jihad, kerja keras, agama dan negara, maka tidaklah sempurna keislaman seorang muslim yang mengabaikan kondisi umat yang rusak dengan menyibukkan diri dalam ritual ibadah. (Said, 1993 dalam Rahmat, 2002: 36). Banna juga menegaskan bahwa syarat kesempurnaan Islam seseorang adalah keterlibatannya dalam aktivitas politik (Rahmat, *ibid.*), yang bermuara pada memperjuangkan Islam agama sekaligus dasar negara, dan implementasi Syari'ah Islam sebagai konsekuensinya.

Meski konsep itu tidak dieksplisitkan dalam platform politik PKS yang disusun oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, tapi pernyataan bahwa Islam bukan hanya akar ideologi bagi kehidupan masyarakat Muslim melainkan juga keharusan teologis, sosiologis, dan politik, dan sekaligus menjadi ideologi alternatif tatanan dunia (PKS, 2008:408) tetap menunjukkan keyakinan Islam sebagai *din wa daulah* tidak pernah bergeser dari misi perjuangan PKS. Salah satu tantangan terbesar perjuangan Islam yang digariskan oleh jama'ah Ikhwan adalah berdakwah-berpolitik di hadapan masyarakat majemuk seperti di Indonesia, yang didalamnya juga terjadi kemajemukan di level masyarakat Islamnya. Kesadaran politik Islam yang tertanam kuat pada setiap kader PKS ditantang oleh realitas kemajemukan sehingga dapat dibayangkan PKS akan mengeluarkan segala jurus politik yang beradab untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa dakwah politik mereka sejalan dengan kebutuhan masyarakat majemuk itu. Kemajemukan di segala level yang telah mapan ini tentu saja tak gampang untuk dirombak. Apalagi, sebagaimana diakui PKS, mayoritas masyarakat Islam Indonesia lebih bersifat moderat dan kultural ketimbang politis (PKS, 2008:67), sehingga tidak begitu tertarik dengan gagasan-gagasan perubahan dasar negara, pelaksanaan syari'at Islam atau amandemen pembukaan UUD 1945.

Bagaimanapun, PKS bukanlah kumpulan kader dengan kesadaran politik yang semata militan, terlalu tekstual memegang credo jama'ahnya, sehingga langkah-langkah politiknya mudah dibaca, dan sekaligus mudah dipatahkan. PKS juga bukan seperti HTI, sekedar perbandingan, yang terlalu semangat mengkafirkan demokrasi di satu sisi, dan menawarkan solusi kembali kepada syari'ah dan khilafah Islamiyyah di sisi lain, tanpa pernah berterimakasih kepada sistem demokrasi yang memungkinkan HTI bersuara lantang dan berhendak mengubur demokrasi itu sendiri. PKS relatif dipimpin oleh para *expert* di bidangnya masing-masing, sehingga memahami betul bagaimana menemukan kreasi politik untuk mensiasati realitas politik yang ada, sekaligus memperjuangkan keyakinan politiknya, melalui mekanisme demokrasi.

Salah satu kecerdasan berpolitik PKS adalah kreatifitas membingkai sebuah gagasan 'fundamentalistik' sehingga berparas 'cantik' di hadapan masyarakat Indonesia, yang mayoritas masyarakat Islamnya, sekitar 75% persen (PKS, 2008:73) meyakini bahwa NKRI dan Pancasila adalah final. Mendasarkan pada realitas semacam ini, jauh-jauh hari sejak 2004, PKS melancarkan strategi baru untuk membingkai ulang gagasan-gagasan perjuangan Islamnya dengan tidak mengkampanyekan syariah Islam atau penegakan negara Islam di Indonesia. Dengan sekaligus mengelak dari penegakan negara Islam yang menerapkan syari'ah atau masyarakat sekuler yang anti syariah, PKS melaunching satu gagasan penegakan piagam Madinah yang dianggap lebih kompatibel dengan masyarakat plural, sekaligus multikultural, seperti Indonesia.

Sebagaimana digariskan dalam platform PKS (PKS, 2008:74) Negara Madinah dengan Piagam Madinahnya itu dianggap PKS lebih tepat untuk masyarakat Indonesia karena bisa menjadi basis untuk masyarakat plural religius dalam menjalankan agama juga memeliharanya sesuai dengan kepercayaannya

masing-masing mengingat pluralitas keagamaan masyarakat Indonesia adalah realitas masyarakat yang tidak dapat dipungkiri.

Selanjutnya, PKS meyakini (PKS, 2008:72) agar masyarakat madani, hasil dari produk penegakan piagam Madinah (pen.), dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agamanya dan menghadirkan syari'ah Islam yang rahmatan lil'alamin, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan masyarakat madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pilar-pilar itu harus secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotong royong, dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung tinggi moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dalam ukhuwwah Islamiyyah, ukhuwwah wathaniyyah dan ukhuwwah basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Karenanya, lanjut PKS (ibid.), perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan sikap adil dan bijaksana terhadap non-muslim maupun yang berbeda organisasi politik dengan PKS. Selain itu, perjuangan Islamisasi harus mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadir hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI.

Piagam madinah adalah cita-cita dan harapan yang kini diperjuangkan PKS. Pada awalnya, terutama saat awal-awal berkiprahnya PK, mereka tidak mewacanakan penegakan piagam madinah, melainkan tegaknya syari'at Islam dengan perjuangan memasukkan piagam Jakarta dalam perundangan negara. Wacana piagam Madinah, sebelum diwacanakan dan dilaunching oleh PKS' justru digemari oleh para aktivis dan akademisi Islam 'modernis', sebagai basis penguatan masyarakat madani: satu konsepsi lain tentang civil society yang berbasis pada nilai-nilai Islam (Baso, 1999; Cula, 1999). PKS sendiri, pada awal berkiprahnya lebih menikmati pewacanaan dan perjuangan piagam Jakarta dan tegaknya syari'ah sebagai konsekuensi dari asas Islam pada partainya.

Namun, dalam perjalannya, seiring dengan kebutuhan perwajahan baru, strategi politik PKS berubah. PKS seolah mengerem pewacanaan piagam Jakarta, dan terlihat tidak membuka konfrontasi secara langsung dengan publik yang masih melihat sisi negatif dari pelaksanaan piagam Jakarta. Sejurus dengan itu, strategi 'taqiyah' (penyamaran) melalui penegakan piagam Madinah demi terciptanya masyarakat madani pun lantas dikumandangkan PKS. Nuansa penghormatan terhadap aspek pluralitas dalam segala bidang, termasuk agama, pada akhirnya menjadi salah satu nilai yang diperjuangkan oleh PKS. Pada fase selanjutnya, Islam ala PKS, tampak lebih membumi dan 'mengindonesia'.

Meski PKS telah menggeser orientasi politiknya, sebagian publik tetap saja mempertanyakan keseriusan dan komitmen PKS dalam memperjuangkan pluralitas masyarakat dalam bingkai NKRI. Salah satunya adalah Najib Burhani, salah satu aktivis Muhamadiyah dan dosen Paramadina. Burhani merespon statemen Hidayat

Nurwahid pada tahun 2004 bahwa PKS tidak lagi memperjuangkan Piagam Jakarta dan menggantikannya dengan piagam Madinah dengan nada curiga. Bagi Burhani, perjuangan PKS itu tetap membuka kekhawatiran banyak kalangan karena PKS terlihat tidak tulus dan karenanya strategi itu hanyalah “politik pintu belakang”, yang ujungnya tetap kehendak menegakkan negara Islam, dengan eksklusifitas hak-hak umat Islam di hadapan masyarakat non-muslim (kompas/31/9/2004).

Di awal sekali perubahannya, tampak tak mudah bagi PKS untuk meyakinkan publik hanya melalui pergeseran isu. Pergeseran orientasi politik terutama dalam kaitannya dengan perjuangan Islam, belum sepenuhnya membuktikan nilai-nilai perjuangan PKS telah bergeser dari PK. Bagi sebagian kalangan, PKS bagaimanapun adalah perpanjangan PK, karenanya PKS adalah PK yang berganti wajah. Di dalam politik, perwajahan luar tidak selalu paralel dengan isinya, *adzhahir la tadullu ‘ala al bathin*. Apapun strategi yang dilakukan PKS, jika ‘dasar-dasar dan materi kaderisasi’ yang kuat kaitannya dengan jama’ah Ikhwan tidak dirombak dalam diri PKS, publik masih melihat PKS sebagai bagian dari kekuatan yang memperjuangkan tegaknya syari’at Islam.

Beragam skeptisisme dan pertanyaan publik merespon kebijakan PKS tentu saja beralasan. PKS yang awalnya begitu “Islam”, tiba-tiba menggeser tubuhnya ke arah tengah, dengan tidak menampilkan lagi isu-isu yang bisa mengerangakai dirinya di dalam kotak “Islam”. Tentu saja hal ini merupakan lompatan ‘revolusioner’ pada diri PKS, ketika ‘keyakinan’ harus didamaikan dengan realitas politik serta impian berkuasa. Publik tentu masih mengukur, apakah PKS telah siap menanggung resiko politik yang muncul dari perubahan ini?

Tentu PKS masih harus menghadapi beberapa tahapan lagi untuk bisa meyakinkan publik bahwa PKS telah merubah, bahwa PKS bukanlah PK yang lebih menonjol sisi ‘fundamentalisme’nya, bahwa PKS tidaklah memiliki agenda tersembunyi soal Pancasila dan dasar-dasar bernegara jika berkuasa nanti, bahwa PKS bisa bekerjasama dan sharing kekuasaan untuk bersama mengelola umat yang satu, yakni semua warga negara apapun background agama dan keyakinannya. Publik membutuhkan serangkaian fakta politik yang meyakinkan sehingga ‘transformasi’ PKS ke arah moderat dan pluralis bukanlah semata *taqiyyah* untuk keluar dari jebakan stigmatik yang tidak menguntungkan PKS selama ini, melainkan jawaban bagi penuntasan persoalan kebangsaan. Publik tentu saja masih menanti adanya perubahan yang tidak hanya di level ide, melainkan praksis politik PKS.

#### D. Kapasitas Kelembagaan PKS

Gerakan tarbiyah Indonesia kini telah menjelma menjadi partai politik yang cukup disegani dalam belantika politik tanah air: Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Perubahan dari sebuah gerakan underground movement dengan struktur yang disembunyikan (*siriyyu tandzim*) kini menjadi sebuah partai politik yang menuntut keterbukaan di banyak hal bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Para kader dakwah telah mampu menunjukkan sebuah keberhasilan menjalani transformasi tersebut dengan relatif mulus. Harus diakui, tidak semua gerakan sosial, apalagi yang memiliki kategori hidden, dengan kekuatan jaringan yang ada, mampu melakukan transformasi secara berhasil sebagaimana yang ditunjukkan oleh PKS.

Setelah PK, yang selanjutnya diteruskan oleh PKS, didirikan maka tugas para kader dan elit jama'ah selanjutnya adalah menjaga partai dakwah itu agar tetap kokoh, sebagaimana gerakan yang membentuknya. Pola dan tugas gerakan bawah tanah dengan pola dan kerja-kerja kepartaian amatlah berbeda. Proses pelembagaan pada masing-masing bentuk gerakan juga berbeda. Secara umum gerakan dakwah terdahulu lebih bertujuan pada pembentukan karakter pribadi dan masyarakat, dan lebih bermain di wilayah politik kemasyarakatan. Sedangkan partai politik hadir untuk bertarung dan memenangkan pemilu untuk meraih kontrol pemerintahan guna menerapkan sebuah kebijakan.

Jika pada masa gerakan dakwah para Syaikh pemegang kendali kebijakan dakwah hanya hirau dengan para kadernya yang bertipologi seragam, maka partai politik membawa beragam latar belakang kelompok sosial dengan kesamaan nilai dan gagasan. Partai politik juga dituntut untuk menyiapkan alternatif kebijakan, menggembleng dan menyediakan calon-calon pemimpin di arena kekuasaan, sekaligus menjadi jemabatan antara publik dan negara (NDI&USAID, 2004). Perubahan pola dan fungsi kelembagaan inilah yang menjadi satu jenis tantangan baru bagi para kader dakwah dalam menjalani kehidupan kepartaiannya.

Berhasil atau tidaknya sebuah partai politik salah satunya terletak pada kapasitas kelembagaan yang ada pada dirinya. Disini, pemahaman kelembagaan partai politik, berikut pilihan kelembagaannya, dipahami sebagai satu arena politik tersendiri dalam sistem politik (March&Olsen, 1987:17). Dalam arena politik, partai politik mempolakan setiap aktor yang berinteraksi di dalamnya. Ada begitu banyak aktor—yang berusaha merumuskan beragam ide dan harapan dalam satu kepentingan bersama—dalam wadah partai politik. Jalinan sistemik antar aktor dalam partai politik selanjutnya dituntut untuk berperilaku dan berinteraksi dengan konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Sintesis dari mikro politik (institusi) dan makro politik (sistem politik) ini mencerminkan bagaimana lembaga tersebut merespon dan memahami perubahan lingkungan politik yang ada. Dengan demikian desain kelembagaan merupakan salah satu jawaban bagaimana suatu partai politik tersebut mampu survive dan berkembang.

Chapter ini akan mengelaborasi kapasitas kelembagaan PKS dalam kaitannya dengan alur proses kebijakan yang diproduksi oleh PKS. Dengan melihat adanya

proses kesejarahan yang senantiasa melekat pada PKS, maka tentu saja ada derajat perbedaan kelembagaan yang dimiliki PKS—dibanding partai lain di Indonesia. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan melihat sisi lain PKS dari sisi kapasitas kelembagaannya itu, yang mencuatkan satu jenis perbedaan tertentu dalam partai politik di Indonesia.

### D.1 Partai Kader

PKS sejak awal berdirinya mengidentifikasi diri sebagai partai berbasis kader. Dalam manifesto partai yang tertuang dalam AD/ART, PKS menggambarkan dirinya sebagai partai kader, tanpa diikuti oleh kalimat penjelas apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan partai kader dan mengapa pula memilih serta menetapkan partai kader sebagai pilihan komposisi dan fungsi keanggotaan partainya.

Sebagai model partai politik yang tumbuh dan berkembang dari metamorfosis gerakan dakwah, PKS bisa jadi adalah varian baru dalam sejarah politik Indonesia. Tanpa mengecualikan lahirnya partai-partai di Indonesia pasca reformasi yang juga banyak lahir dari rahim gerakan sosial,<sup>51</sup> PKS memiliki historisitas yang panjang, lebih mapan secara kaderisasi dan jaringan serta lebih siap secara kelembagaan untuk merespon beragam perubahan di luarnya. Pilihan PKS untuk menjadi partai kader begitu logis karena kesejarahan yang membentuknya.

Seraya meletakkan pondasi kelembagaannya sebagai partai kader, PK di awal pembentukannya seolah masih tergiang “heroisitas” perjuangan ekstra parlemen semasa menjadi gerakan sosial, sehingga corak PK kala itu juga bisa dilihat sebagai, meminjam istilah Kitchelt (2006:280-281), partai gerakan. Hal ini karena PK kala itu masih terlibat aktif dalam gerakan ekstra parlemen, meski telah turut mengiriskan kader di arena politik parlemen. Namun pelan tapi pasti, PKS kian kokoh menunjukkan dirinya sebagai partai kader—satu-satunya—di era reformasi.

Sejauh ini literatur ilmu politik yang konsen terhadap diskursus kepartaian dengan mengikuti saran Ware (1998), mendasarkan pada komposisi pendukung, keterlibatan, dan peran negara dalam memperlakukan partai. Dalam bukunya, Ware memilah partai menjadi 6 jenis, yaitu; partai massa yang berorientasi pada pemimpin (*leader oriented mass party*), partai massa (*mass party*), partai kader klasik (*classic kader party*), partai kader modern (*modern kader party*), partai kartel (*cartel party*), dan partai catch-all (*catch-all party*). Keenam jenis itu dianggap merupakan penjelas yang paling relevan untuk melihat perpartaian politik di Indonesia.

Partai massa (*mass party*)—sebagian juga menyebut partai lindungan (*patronage*)—adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan

---

<sup>51</sup> PRD bisa disebut sebagai salah satu bentuk lanjutan dari sebuah gerakan social yang juga memiliki pola kaderisasi yang matang, handal, dan kuat. Namun tidak bernasib baik seperti PKS, PRD gagal melanjutkan perjuangan ekstra parlemennya ke arena politik formal, karena kehabisan energi setelah perjuangannya patah oleh electoral threshold pada pemilu 1999.

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan. Di samping itu masyarakat juga dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Sedangkan partai kader (*cader party*) adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama (Surbakti, 1992: 233).

Partai kader juga terkenal dengan seleksi keanggotaannya yang sangat ketat, melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta mengembangkan penegakan disiplin partai secara konsisten. Selain itu, partai model ini juga mengandalkan pada hirarki struktur organisasinya sehingga jalur instruksi dan tanggung jawabnya begitu jelas. Karena corak partai yang selalu dikendalikan oleh para elitnya maka kerap kali partai model ini disebut juga dengan partai elitis.

Unsur yang membedakan antara partai kader klasik dengan partai kader modern adalah luas atau tidaknya keterlibatan pendukung dalam pemilihan pemimpin, pengorganisasian, dan penentuan kebijakan partai. Jika keterlibatan pendukungnya luas dan aktif, maka partai itu disebut dengan partai kader modern, dan jika sebaliknya, yakni keterlibatan pendukung tersebut kurang atau rendah dalam penentuan kebijakan dan pemilihan pemimpin, maka ia dikategorikan sebagai partai kader klasik.

Lantas di mana posisi PKS? Secara normatif, proses kaderisasi sebagaimana digariskan PKS memiliki tujuan sebagai upaya yang sistematis menuju pola rekrutmen anggota partai yang militan. Sebagaimana tertera dalam ketentuan kaderisasi partai, sedikitnya terdapat empat pertimbangan yang menjadi kerangka berpikir kaderisasi PKS, yaitu; *pertama*, sebagai partai kader, PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader dan fungsionaris partai.

*Kedua*, fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui struktur kelembagaan partai yang tersebar dari DPP hingga tingkat ranting, DPRa. Unit-unit kaderisasi bergerak sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia partai. *Ketiga*, kekuatan utama partai terletak pada kualitas SDM-nya. Ukuran kualitas SDM terletak pada kapasitas, kapabilitas dan kredibilitasnya. Kualitas yang harus dimiliki SDM partai adalah pemahaman dan komitmen ke-Islaman, yang akan menjadi landasan dan kekuatan pendorong bagi seluruh tugas-tugas kerja kepartaian. *Keempat*, kaderisasi PKS secara khusus diarahkan untuk membangun pemahaman dan kemampuan SDM partai mengenai masalah-masalah politik dan kepartaian yang dibutuhkan untuk mengimplementasi visi, misi dan program-program partai.

Dengan dirumuskannya ketentuan kaderisasi PKS ini menunjukkan bahwa partai yang kelahirannya banyak dibidani para aktivis kampus ini menjadi partai kader. Dengan kata lain, banyak rumusan atau tahapan yang mesti dilalui oleh setiap anggota partai. Ketentuan-ketentuan tersebut, menurut PKS merupakan media atau wadah tersedianya manhaj kaderisasi Partai Keadilan, yang akan menjadi panduan

penyelenggaraan program-program kaderisasi calon anggota dan anggota PKS. Di samping itu, digunakan dalam rangka mendukung berjalannya program-program kaderisasi PKS secara sistematis dan terpadu dengan produktifitas yang maksimal dan berkualitas. Di bawah ini merupakan jenjang keanggotaan PKS sejak jenjang anggota pemula hingga anggota kehormatan.

#### JENJANG KEANGGOTAAN PARTAI Keadilan Sejahtera

Jenis Keanggotaan	Pengertian
Anggota Pemula	Mereka yang mengajukan permohonan untuk menjadi anggota partai, dan terdaftar dalam keanggotaan partai yang dicatat oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah lulus mengikuti Training Orientasi Partai I (satu).
Anggota Muda	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu.
Anggota Madya	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar dua.
Anggota Dewasa	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
Anggota Ahli	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
Anggota Purna	Mereka yang terdaftar dalam keanggotaan partai yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
Anggota Kehormatan	Mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai

Dengan telah masuknya seorang anggota yang dibuktikan dengan kartu anggota partai, maka proses selanjutnya adalah mengikuti training-training yang diselenggarakan oleh partai. Pada tahapan inilah disebut juga istilah kaderisasi awal. Hampir dapat dipastikan, mayoritas anggota PKS melalui tahap awal rekrutmen hingga pembekalan atau mengikuti agenda-agenda kaderisasi. Sebagaimana tertulis di bawah ini, PKS memiliki format rekrutmen anggota dengan segala pertimbangan jenis keanggotannya. Dua gambaran grafik ini setidaknya memperlihatkan bahwa sebagai partai kader, PKS mampu membuktikan kelengkapan format dan kejujuran dalam mengimplementasikan program.

<b>Jenis Keanggotaan</b>	<b>Pola Rekruting</b>	<b>Pengertian</b>
Anggota Pemula	Training Orientasi Partai (TOP-I)	Orientasi Awal PKS bagi para simpatisan yang ingin menjadi Anggota. Selanjutnya disebut Anggota Pemula.
Anggota Muda	Training Dasar I (TD-I)	Pelatihan tingkat satu bagi Anggota Pemula yang memenuhi persyaratan dan merupakan seleksi untuk menjadi Anggota Muda.
Anggota Madya	Training Dasar II (TD-II)	Pelatihan tingkat dua bagi Anggota Muda yang memenuhi persyaratan dan merupakan seleksi untuk menjadi Anggota Madya.
Anggota Dewasa	Training Lanjutan I (TL-I)	Pelatihan tingkat lanjut bagi Anggota Madya yang memenuhi persyaratan dan merupakan seleksi untuk menjadi Anggota Dewasa.
Anggota Ahli	Training Lanjutan II (TL-II)	Pelatihan tingkat tinggi bagi Anggota Dewasa yang memenuhi persyaratan dan merupakan seleksi untuk menjadi Anggota Ahli.
Anggota Purna	Training Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS)	Pelatihan tingkat ahli bagi Anggota Ahli yang memenuhi persyaratan dan merupakan seleksi untuk menjadi

		Anggota Purna.
Anggota Kehormatan	Analisa Kapasitas dan Integritas Personal (AKIP)	Laporan hasil investigasi dan analisa mengenai latar belakang, sikap dan potensi politik calon Anggota Kehormatan.
	Orientasi Partai dan Tokoh (OPT)	Program khusus orientasi tentang partai untuk Anggota Kehormatan.

PKS dapat dinyatakan sebagai partai kader karena memiliki sifat keanggotaan yang mensyaratkan terpenuhinya sejumlah kualifikasi tertentu sesuai ketentuan partai, dan mengharuskan setiap anggota partai untuk mengikuti program-program pembinaan atau kaderisasi sesuai dengan sistem yang dimilikinya. Selain itu, kader—sebagai backbone partai—bermakna juga sebagai ujung tombak penetrasi ke publik. Hal ini dikarenakan partai yang memiliki struktur dengan tipologi partai kader mengarusutamakan kualitas dan networking kader (Duverger, 1959). Dan kecenderungan untuk berkontribusi di dalam perluasan basis massa ini menjadi satu pola yang menonjol bagi para kader PKS.

Kemudian, partai kader juga dapat diidentifikasi dari pola pengambilan keputusan, sejauh mana keterlibatan anggotanya dalam pengambilan keputusan partai politiknya, baik internal partai maupun eksternal partai. Cermin sebagai partai kader, dalam kategorisasi yang telah disebutkan di atas terkonfirmasi dalam struktur dewan syura yang menjadi dasar dari seluruh pengambilan keputusan strategis partai termasuk dalam representasi distribusi jejaring kadernya.

Sebuah tulisan berjudul *Tradisi Pemilihan Pemimpin di PKS* (tanpa tanggal dan tahun) menjelaskan bahwa sebagai partai kader, PKS mengembangkan mekanisme bahwa semua orang yang aktif di partai adalah kader. Bahkan pada tingkatan pergantian kepemimpinan di partai ini juga harus melalui mekanisme kader. PKS menganggap bahwa hanya dengan membangun kader seperti ini partai akan memiliki stabilitas pendukung tinggi.

Poin keenam nilai dasar dalam tulisan itu menjelaskan bahwa kedudukan Majelis Syura dalam partai (adalah) sebagai lembaga tertinggi. Karena itu, anggota Majelis Syura dipilih melalui mekanisme yang di dalamnya terdapat prasyarat-prasyarat tertentu sehingga dapat memastikan Majelis Syura akan diisi oleh kader-kader berwawasan, profesional, dan representatif sekaligus. Selanjutnya dalam uraian prosedur pemilihan Majelis Syura melalui beberapa tahapan, yaitu, *tahap pertama*, pemilihan Majelis Syura dilaksanakan dengan sistem pemira untuk memilih anggota Majelis Syura yang berdasarkan tiga jenis representasi; geografis yakni kewilayahan;

representasi tarbawiyah atau tingkat kekaderan; dan terakhir representasi keahlian (profesionalisme) yakni dipilih karena skill yang dimilikinya. Representasi ketiga dipilih karena tidak semua representasi geografis dan kekaderan memenuhi kriteria profesionalitas yang ditetapkan.

Pemira itu diselenggarakan oleh suatu komite bernama Lajnah Pemira. Pemira ini tidak diikuti oleh semua kader PKS, namun hanya kader inti semata. Dalam jenjang kaderisasi PKS, terdapat 6 tahapan; Kader Pemula, Kader Muda, Kader Madya, Kader Dewasa, Kader Ahli, dan Kader Purna. Yang dimaksud sebagai kader inti adalah kader yang berada dalam posisi kader Madya ke atas, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Sedangkan yang berhak dipilih sebagai anggota Majelis Syura adalah mereka yang hanya berada dalam posisi kader Ahli yang setidaknya berada dalam posisi itu 10 tahun terakhir. Padahal, seorang kader pemula membutuhkan waktu sekira 10 tahun lamanya untuk bisa meraih posisi kader Ahli.

Hal menarik ditemukan dalam proses pemilihan anggota Majelis Syura tersebut. Semua kader inti memiliki hak untuk memilih nama-nama anggota Majelis Syura sesuai kehendak hati mereka, secara bebas, dan tertutup. Namun hak itu juga dibedakan berdasarkan jenjang kaderisasi. Sebagaimana disebutkan oleh Cakardi Takariawan bahwa perbedaan hak kader berdasar jenjang kaderisasi dalam pemilihan anggota Majelis Syura tersebut tercermin dari suara yang ditunaikan oleh seorang kader. Suara kader Madya akan terhitung 1 suara, kader Dewasa dianggap 2 suara, dan kader Ahli 3 suara. Perbedaan ini didasarkan pada selain lama waktu seorang kader berkiprah dalam ikatan dakwah juga, sebagaimana tercantum dalam nilai dasar pemilihan pemimpin poin ketiga, nilai kader itu ditentukan oleh kontribusinya, dan bukan oleh jabatan strukturalnya (Ratomi, 2006).

Dalam pemilihan anggota itupun juga melalui dua tahapan, dipilih serta diangkat. Di dalam ART PKS, anggota Majelis Syura yang dipilih berjumlah 49 orang ditambah 1 orang anggota tetap, yakni mantan ketua Majelis Syura. Selebihnya, yakni, 49 orang lainnya diangkat. Pengangkatan anggota Majelis Syura lainnya merupakan hak dan wewenang Majelis Syura terpilih. Dalam AD/ART juga disebutkan, pengangkatan anggota Majelis Syura yang diangkat paling banyak sejumlah mereka yang dipilih. Dalam kasus sekarang ini, karena anggota Majelis Syura dipilih itu berjumlah 49 orang, maka maksimal yang diangkat sebagai Majelis Syura dari kalangan profesional itu juga 49 orang. Dengan demikian total anggota Majelis Syura adalah 99 orang; suatu simbol dari nama-nama Tuhan (*Asma'ul Husna*).

Panduan praktis proses pemilihan Majelis Syura itu sedikit banyak menggambarkan demokrasi internal di PKS. Melalui gambaran pemilihan pimpinan PKS di atas setidaknya dari awal sudah dapat diraba bahwa proses "demokrasi internal" itu membuka ruang yang luas bagi partisipasi kader dalam pemilihan elit partai mereka. Dari penyusunan kepemimpinan PKS yang melibatkan secara unik para kader itu, bisa dijelaskan bahwa klaim partai kader oleh PKS dalam

menjalankan fungsi dan komposisi keanggotaannya secara normatif-prosedural adalah bisa dibenarkan.

### **Struktur Partai dan Policy Makers**

Dalam menjalankan roda kepartaian, PKS menganut paham pembagian kekuasaan, atau semacam trias politica dalam sistem demokrasi.<sup>52</sup> Ada lembaga yang bertugas menyusun aturan perundangan dan menjadi lembaga tertinggi partai, Majelis Syura, ada lembaga semacam "eksekutif" partai, Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dikepalai oleh seorang Presiden partai dan Sekretaris Jenderal, dan ada lembaga semacam yudikatif, yang memproses persoalan hukum dan aturan main kepartaian, yakni Dewan Syariah Pusat (DSP). Untuk melengkapi ketiga lembaga penting di partai itu, maka ada Majelis Pertimbangan Pusat (MPP).

Kendali tertinggi kebijakan di tubuh PKS dipegang oleh Majelis Syuro. Sebagai badan tertinggi di dalam struktur PKS, Majelis Syura dipandang sebagai bentuk manifestasi dari perintah al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk menjalankan *syura*. Anggota-anggota Majelis Syura memiliki hak yang sama, karena mereka mewakili seluruh anggota melalui apa yang disebut dengan pemilihan raya (pemira). Dengan komposisi yang demikian ini, Majelis Syura PKS dapat dipersamakan dengan kedudukan parlemen dalam sistem pemerintahan demokratis.

Uraian berikut akan mencoba menelusuri salah satu peran strategis yang dimainkan oleh Majelis Syura dalam pemerintahan PKS. Untuk itu pendedahan ini akan diawali dengan melihat aturan maun partai, dalam hal ini AD/ART PKS, yang menjadi landasan konsensual bagi jalannya roda pemerintahan PKS. Di sana disebutkan bahwa Majelis Syura merupakan lembaga tertinggi partai, dan berfungsi sebagai lembaga ahlul hall wal aqd (Majelis Permusyawaratan) Partai. Sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kepartaian maka hal ini membawa konsekuensi logis bagi seluruh jajaran kepemimpinan, kepengurusan ataupun kader yang berhimpun di dalam partai untuk tunduk pada semua hasil-hasil syura yang telah diputuskan oleh Majelis Syura ini, tanpa terkecuali. Sebagai lembaga yang melekat dalam dirinya sebuah wewenang menetapkan, bukan sekedar memberi masukan, maka keketatapannya itu bersifat mengikat (*mulazamah*).

Setidaknya ada 12 tugas dan wewenang yang diemban oleh Majelis Syura. Yang paling pokok tentunya adalah memilih dan menetapkan Ketua MPP, Presiden, Sekjen, dan Bendahara umum partai, ketua DSP, dan juga memilih dan menetapkan beberapa orang tertentu sebagai anggota MPP, DPP, dan DSP. Selain bertugas memilih hampir semua tim dalam struktur kepartaian di level pusat, Majelis Syura juga memiliki wewenang untuk merubah dan menetapkan AD/ART partai, visi misi, dan rencana strategis partai.

Selain kebijakan yang bersifat ke dalam, Majelis Syura memiliki tugas dan kewenangan untuk menentukan sikap terhadap aliran, kelompok, dan permasalahan

---

<sup>52</sup> Wawancara Tifatul Sembiring, 26 Juni 2008

yang berkembang di Indonesia. Satu kebijakan strategis dalam konteks politik nasional adalah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI atas rekomendasi DPTP.

Dalam perancangan agenda strategis dan ideologis partai tersebut, peran Majelis Syura tak tergantikan oleh lembaga manapun dalam struktur kepengurusan PKS. *Saking* sentralnya lembaga tersebut, Munas, yang dalam tradisi partai lain merupakan ajang tertinggi partai untuk menyelenggarakan proses demokrasi internal dalam memilih dan menentukan ketua umum partai sekaligus menyusun kerangka kerja partai untuk satu periode kerja kepartaian, maka bagi PKS Munas hanyalah sebagai ajang sosialisasi kebijakan Majelis Syura (Syihabuddin, 2007).

Tradisi pemilihan ketua umum partai, yang bagi kebanyakan partai politik di Indonesia merupakan sumber konflik berkepanjangan ini, tidak akan dijumpai di PKS, karena PKS tidak mengenal pemilihan oleh pengurus-pengurus daerah. Yang ada adalah pemilihan dan penunjukan presiden yang dilakukan oleh Majelis Syura. Justru yang paling ramai di dalam Munas adalah sosialisasi kebijakan dan rekomendasi yang diambil oleh Majelis Syura. Dikandung dalam AD PKS juga menegaskan bahwa tugas Majelis Syura juga memilih dan menetapkan pimpinan lembaga tinggi partai. Bagi PKS, memilih pemimpin partai tidak harus melalui mekanisme internal yang rumit, penuh hiruk-pikuk, lengkap dengan mahalnnya biaya, dengan model penjangkaran dan sosialisasi sampai pada level bawah terlebih dahulu serta dilaksanakan dalam forum musyawarah anggota yang melibatkan semua wakil dari daerah. Dalam sejarah PKS memilih pimpinan partai cukup diselesaikan oleh Majelis Syura (Syihabuddin, *ibid.*).

Sebagaimana tradisi PKS, pucuk pimpinan Majelis Syura selama ini dipegang oleh tokoh-tokoh partai yang dikenal sebagai ideolog atau guru tarbiyah. Ini bisa dilihat dari profile KH. Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Syura PKS sekarang, yang banyak berjuang—terutama dibelakang layar—untuk menyokong ideologi partai. Dengan bekal pendidikan yang banyak ditempuh di Timur Tengah, Hilmi sangat kuat dalam penguasaan literatur keislaman klasik dan memiliki jaringan yang luas, terutama jaringan IM yang berpusat di Mesir. Sebelum Hilmi dipilih sebagai ketua Majelis Syura, “murid” Hilmi dalam jenjang kaderisasi di IM, Rahmad Abdullah, ditugaskan jama’ah untuk memimpin Majelis Syura PKS.

Karena diisi oleh para ideolog dan para pakar dari berbagai bidang, maka setiap keputusan Majelis Syura begitu dihormati dan dipegang teguh oleh semua kader. Hal lain yang membuat Majelis Syura begitu diamini oleh semua kader—dan ini yang unik di dalam tubuh PKS—adalah karena Majelis Syura dipilih oleh semua kader inti. Mekanisme pemilihan Majelis Syura yang melibatkan semua kader partai berbuah manis dengan lahirnya rasa kepemilikan dan ketaatan bersama.

Demikianlah sekilas potret tentang Majelis Syura, lembaga sentral dan tertinggi dalam hirarki pembuatan kebijakan di dalam tubuh PKS. Majelis Syura hanya ada pada stuktur PKS tingkat pusat, dan tidak ada lembaga sejenis di level daerah.

Di bawah Majelis Syura, AD/ART PKS mengamanatkan kepada DPTP, Dewan Pimpinan Tinggi Pusat untuk menjalankan fungsi sebagai badan pekerja Majelis Syura. Ada 12 tugas yang melekat pada Dewan ini. Dari kerja-kerja administratif sampai kerja-kerja politik. Misalnya kerja-kerja administratif kepartaian seperti melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Syura, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan putusan Majelis Syura, menyelenggarakan musyawarah Majelis Syura. Ada juga kerja-kerja politik, seperti membuat kebijakan partai berkenaan dengan pencalonan anggota DPR RI, pasangan calon gubernur-wakil gubernur, pemilihan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan RI, serta jabatan strategis lain. DPTP juga bertugas merekomendasikan nama-nama calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan politik dan strategis lainnya, dipusat maupun di daerah. Selain itu, ada juga tugas-tugas pertanggungjawaban partai yang harus dilaporkan pada sidang Majelis Syura.

DPTP diketuai oleh Ketua Majelis Syura dan beranggotakan: ketua MPP, Ketua DSP, Presiden PKS, Sekjen DPP, Bendahara Umum DPP. Selain di tingkat pusat, maka ada lembaga yang berfungsi sejenis di level provinsi dan kabupaten/kota, yang diberi nama DPTW atau DPTD. DPT di wilayah atau kabupaten kota diketuai oleh Dewan pertimbangan di levelnya masing-masing, dan beranggotakan Majelis Pertimbangan, Dewan Pengurus, dan Dewan Syari'ah di level wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Sebagai eksekutif partai, Dewan Pengurus Pusat memiliki hirarki di bawah Majelis Syura dan DPTP. Dengan komando dibawah Presiden, maka DPP bertugas untuk menetapkan dan mensosialisasikan panduan DPP; melaksanakan Manhaj tarbiyah (sistem pembinaan dan pengkaderan) partai dan mengontrol pelaksanaannya; melakukan pembekuan struktur organisasi atau kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan partai, atas persetujuan DPTP; dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 bulan kepada DPTP.

Sebagaimana partai politik lainnya, dewan pengurus yang dimiliki PKS juga berjenjang dari pusat sampai di level desa. DPP di Jakarta, DPW di masing-masing provinsi, di DPD di level kabupaten atau kota, di level kecamatan ada Dewan Pengurus Cabang, dan terakhir di tingkat desa ada Dewan Pengurus Ranting (DPRa). Di setiap jenjang dewan pengurus ada lembaga-lembaga dan badan yang dibentuk untuk menunjang kerja-kerja kepartaian. Terutama di level DPP, masing-masing lembaga dan badan memiliki ketua dan sekretaris, dan bertanggung jawab kepada presiden partai.

Satu hal yang menarik untuk dicatat adalah adanya perubahan struktur dan hirarki pengambilan kebijakan di dalam tubuh PKS. Setidaknya ada dua perubahan yang cukup signifikan dalam struktur kepartaian PKS, yang uniknya mengikuti perubahan AD/ART PKS, tertanggal sebelum dan sesudah Agustus 2005. Pertama, di dalam AD/ART baru muncul satu lembaga yang berfungsi sebagai badan pekerja kebijakan Majelis Syura yang bernama Dewan Pimpinan Tinggi Pusat atau DPTP.

Kedua, AD/ART PKS terbaru juga merombak akronim DPP, dari Dewan Pimpinan Pusat menjadi Dewan Pengurus Pusat.

Perubahan mendasar AD/ART PKS menjadi menarik karena di satu sisi muncul satu lembaga baru dan di sisi lainnya, merombak lembaga lama. Sebagai badan pekerja pelaksana keputusan strategis Majelis Syura, maka sebagai konsekuensinya lembaga baru itu, DPTP, menjalankan seperangkat tugas untuk menerjemahkan keputusan strategis itu tersebut menjadi operasional dan *workable*. Kehadiran DPTP lantas membawa konsekuensi bagi perubahan posisi dan wewenang DPP. DPP yang sebelumnya kepanjangan Dewan Pimpinan Pusat, dengan begitu banyak kewenangan strategis, maka ketika berubah menjadi Dewan Pengurus Pusat, kewenangan yang melekat pada dirinya lebih pada kewenangan teknis-manajerial kepartaian semata.

Hal ini bisa dibandingkan dengan kewenangan DPP sebelum perubahan AD/ART PKS, di mana DPP, sebagai dewan tanfidziah (eksekutif) partai, memiliki kewenangan dan tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai. Meski tidak disebutkan secara spesifik dalam AD/ART lama, namun dalam praktek lapangannya, makna eksekutif di sini adalah menjalankan keputusan syura yang telah digariskan oleh Majelis Syura. Perubahan ini bersifat mendasar karena telah menggeser peran-peran eksekutif dari DPP ke DPTP.

Yang menarik di sini adalah DPTP diketuai oleh Ketua Majelis Syura. Artinya, Ketua Majelis Syura, sebagai pemimpin tertinggi jama'ah, yang merupakan ketua "legislatif", maka jika Ketua Majelis Syura memegang kendali DPTP, maka Ketua Majelis Syura adalah ketua "eksekutif" partai sekaligus. Ketua Majelis Syura dalam AD/ART lama hanya memimpin perumusan kebijakan strategis partai, maka dengan AD/ART yang baru ketua Majelis Syura justru 'turun gunung' memimpin anggota DPTP untuk melaksanakan kebijakan yang dibuatnya sendiri.

Singkat kata, jika menggunakan logika trias politica, maka sejatinya yang bisa disebut sebagai eksekutif adalah DPTP, bukan DPP. Jika Presiden, sebagai ketua DPP terdahulu adalah pemimpin pelaksana kebijakan strategis partai, maka presiden partai sekarang ini tak lebih dari "kepala kesekretariatan" partai. Akhirnya, pembagian kekuasaan yang telah mencerminkan tumbuhnya demokrasi di dalam tubuh PKS selama ini, runtuh seketika tatkala ada konsentrasi kekuasaan pada satu sosok, ketua Majelis Syura.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ada begitu banyak kontroversi yang mengitari perubahan AD/ART ini. Oligarki kekuasaan yang muncul di tubuh PKS menjadi salah satu implikasi dari perubahan peraturan-perundangan tertinggi partai tersebut. Hal ini semakin diperkuat, dengan raibnya satu pasal di dalam AD/ART yang baru soal pembatasan masa jabatan ketua, baik Majelis Syura, DPTP, DPP, DSP, dan MPP, dengan ketentuan berhak menjabat selama 2 periode, sebagaimana tertuang dalam AD/ART lama. Ketentuan yang ada hanyalah masa khidmat semua anggota masing-masing lembaga tersebut yang dibatasi 5 tahun, tanpa ada ketentuan pembatasan jumlah perodesasinya.

## Jaringan Informal

Salah satu kelebihan menonjol dari kelembagaan PKS adalah jaringan lembaga informal yang diikat secara ideologis olehnya. PKS memiliki begitu banyak jaringan informal yang mewujud dalam bentuk NGO (LSM), lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan sebagainya. Jejaring itu membentang memasuki segala ruang masyarakat untuk turut aktif melakukan advokasi, pemberdayaan, pengislaman terhadap mereka, melalui penyelarasan nilai dan program dengan nilai dan kerja-kerja PKS.

Apa yang dikerjakan PKS berikut para kader di bawah naungannya itu merupakan upaya tercepat dalam menembus tabir sosial yang selama ini masih cukup kuat dan telah membentuk jarak antara partai politik, dalam hal ini PKS, dengan kebutuhan masyarakat. Partai politik jelas akan sangat kewalahan, jika stukturanya yang ramping, dengan sedikit departemen, dan pola kerjanya yang "relatif" lebih formal ketimbang LSM, turut dipaksa untuk melayani kebutuhan masyarakat secara khusus dan sektoral. Bagi PKS, hadirnya berpuluh-puluh atau bahkan ratusan NGO, lembaga pendidikan, institusi bisnis, yang memiliki benang merah pada level pemikiran dan kesesuaian pada tingkat aksi, sungguhlah sangat memudahkan peran yang dimainkan oleh PKS.

Jika ada suatu pertanyaan, partai apa yang memiliki paling banyak jaringan NGO dan lembaga swadaya lainnya dan turut serta berjuang secara informal di bawah naungan partai politik, dengan gagah Mahfudz Sidik (Sidik, 2005) berkata: itu pasti PKS. Walaupun belum ada survey langsung, namun ia meyakini, dari penampakan dan cara kerjanya bisa dipastikan bahwa PKS lah partai politik dengan jaringan terbanyak, baik dalam ragam bentuk maupun penyebarannya. Dari amatannya, di setiap daerah yang baru saja terkena musibah, pastilah PKS dan jaringan NGO-nya menjadi aktor terdepan dalam upaya recoverynya. Bukan itu saja, lihatlah jikalau ramadhan tiba, pastilah PKS dan segala jaringannya secara gencar menyerukan ibadah, mengelola aneka kegiatan keislaman, mengelola dana ZISWAF, hingga penyaluran santunan bagi anak faqir-miskin dan yatim.

Apa yang diidentifikasi oleh Sidik tersebut sungguh tidak mengada-mengada. Fenomena itu riil adanya dan bahkan jika jujur, kita akan mengakui bahwa PKS dengan segala keseriusan jaringannya itu telah mengisi ruang kosong dakwah dan advokasi keagamaan selama ini di masyarakat. Suatu ruang kosong akibat "ditinggal" oleh ormas keagamaan semisal NU, Muhammadiyah, Persis, ataupun lembaga dakwah secara khusus. Meski kegiatannya terkesan "sepele" untuk ukuran NU ataupun Muhammadiyah, karena kegiatan-kegiatan itu kerap juga menjadi agenda mereka dan karenanya hari-hari ini mulai ada penurunan intensitasnya, namun tetap saja ada satu dan lain hal berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh beragam lembaga dakwah "milik" PKS. Hal ini bisa dibuktikan dengan menyaksikan langsung kegiatan mereka yang seloah-olah tak pernah padam dengan aneka aksi sosial sebagaimana kerap kita temui di suatu kampung atau kecamatan dengan atribut PKS dibelakang mereka. Kader-kader demikianlah yang disebut Anis Matta sebagai tidak pernah diam karena senantiasa bekerja di tengah-tengah masyarakat.

Selain aksi bersifat insidental dan tergantung pada suatu momen tertentu, jaringan PKS juga tidak hentinya-hentinya merengsek masuk, mendekati ke masyarakat, melalui lembaga pendidikan dan NGOnya. Mereka aktif bekerja setiap harinya di tengah masyarakat dan senantiasa mencari alternatif-alternatif baru untuk menarik simpati masyarakat. Jika NU memiliki lembaga pendidikan (LP) Ma'arif, dan Muhammadiyah memiliki begitu banyak sekolah dan universitas Muhammadiyah, PKS juga tidak tinggal diam dengan satu gagasan alternatif mengenai pendidikan Islam. Lahirlah sekolah Islam Terpadu: sebuah label pada pendidikan Islam yang bergerak mulai dari TK sampai SMA. Sekolah model ini kian menjamur di perkotaan dan berdiri di hampir semua kota /kabupaten di tanah Jawa, dan sedang serius juga digarap di luar Jawa, dan seiring waktu, posisinya kian diperhitungkan oleh lembaga pendidikan lainnya karena mereka membawa hawa dan suasana baru.

Di lembaga-lembaga ini pendidikan Islamnya kental terasa. Sedari dini, saat anak-anak baru suka-sukanya belajar menyanyi dan bermain di bangku TK, mereka diperkenalkan dengan wawasan keislaman dan bahkan pada tata cara berpakaian Islami. Pengenalan Islam kian berlanjut dan menemui kenaikan kualitasnya di setiap jenjang pendidikannya. Hal ini tentunya diparalelkan dengan misi dakwah dan tarbiyah yang getol menggarap masyarakat menuju suatu komunitas Islam secara kultural, dari level pendidikan paling bawah suatu generasi. Dari tahun ke tahun mereka kian mendapat simpati masyarakat Islam. Hal tersebut akan terasa wajar jika melihat ketidakseriusan atau masih lemahnya output dari lembaga-lembaga pendidikan milik organisasi Islam lainnya. Melalui pola pendidikannya semacam itu, khas, berkarakter, dan menawarkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan Indonesia, bisa jadi mereka akan menjadi *trend setter* di kalangan lembaga pendidikan di kelasnya.

Di samping lembaga pendidikan formal swasta, PKS juga memiliki begitu banyak jaringan lembaga pendidikan informal dan nonformal, seperti lembaga bimbingan belajar (bimbel). Banyak lembaga bimbingan belajar itu didirikan oleh aktivis gerakan Tarbiyah dan karenanya memiliki afiliasi politik dengan PKS. Salah satu yang termasyhur adalah Nurul Fikri (NF). Damanik (2002: 152-154) menuturkan, NF awalnya didirikan pada tahun 70-an oleh Yusuf Asmara Nurasa dengan penggabungan beberapa jenis bisnis, mulai dari percetakan, bimbingan belajar, dan semacam kursus bagi anak-anak sekolah. Baru ketika sejumlah mantan aktivis masjid Rahman Hakim UI pada tahun 80-an bergabung menjadi staf pengajar di lembaga bimbingan belajar itu, dan pendirinya meninggal dunia, mulailah ada penggarapan serius dan lebih profesional, khususnya bidang bimbingan belajar. Pola pendekatan pada bimbingan itu, dan ini yang tekesan baru di banding bimbel lainnya, tidak hanya didekati dengan metode pendidikan konvensional semata, namun juga dengan memasukkan beberapa mutan nilai Islam. Contoh paling bisa diraba adalah NF menerapkan materi Bimbingan Informasi Pendidikan (BIP) dengan menekankan pada aspek psikologis dalam bingkai nilai-nilai Islam dalam metode belajarnya. Bahkan sejak tahun 90-an lembaga ini telah memisahkan kelas laki-laki dan perempuan: suatu kenyataan tak lazim pada fenomena pendidikan di kota.

Pergesekan NF dengan PKS, terutama berangkat dari staf pendidik dan pengajarnya yang merupakan aktivis gerakan Tarbiyah juga. Tokoh-tokoh pendiri NF dan beberapa staf pengajarnya, kemudian terlibat melahirkan PK. Beberapa dari mereka yang turut menjadi deklarator PK adalah Fahmi Alaydrus, Suharna. Tak mengherankan jika NF menjadi medium penyemaian benih para aktivis dakwah kampus di berbagai perguruan tinggi, terutama kampus negeri. NF menghimpun mantan aktivis dakwah sekolah, semisal Rohis (seksi Kerohanisan Islam) di sekolah-sekolah mereka, dan mempersiapkannya untuk melanjutkan dakwahnya di kampus-kampus. Metodenya pun sangat sederhana: dari mulut ke mulut atau dengan sedikit selebaran. Karena di NF, berbeda dengan bimbel lainnya, selain mengikuti bimbingan belajar, mereka juga mendapatkan tempaan tarbiyah untuk melanjutkan perjuangan mereka di kampus nantinya.

Damanik (2002: 156) melanjutkan, sebab kesuksesannya itu maka NF berkembang tidak hanya di Jakarta namun juga merambah ke kota-kota lainnya. Sampai sekarang NF menjadi salah satu bimbingan belajar terkemuka di Indonesia, khususnya bagi para aktivis Islam yang sedang mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama kampus-kampus *bonafide*. Sampai hari ini, NF telah berkembang cepat dan memiliki lebih dari 29 cabang di berbagai kota, khususnya di tanah Jawa. Jika jumlah siswanya rata-rata setiap angkatannya berkisar antara 8000 sampai 10.000 anak, betapa pesatnya aktivis tarbiyah di kampus-kampus. Setelah sukses menggeluti usaha bimbingan belajar, kini NF juga merambah ke bidang kursus komputer, bahasa Inggris dan lain-lain. NF juga mempunyai program pengembangan Pesantren Islam Terpadu yang tengah mereka kembangkan di kawasan Banten. Bahkan, kini NF juga tengah mempersiapkan konsep perguruan tinggi Islam alternatif.

Banyak sekali ruang yang dimainkan oleh jaringan PKS di masyarakat. Jika dalam dunia pendidikan secara pelan namun pasti jaringan PKS bisa meraih simpati masyarakat, akan sama halnya dengan jaringan yang mengambil segmen dakwah Islam. Sidik (2005, bandingkan dengan Damanik, 2002: 160-164) menarasikan sebuah NGO pertama yang bergerak di bidang pembinaan dan pelayanan dakwah Islam untuk masyarakat, Khoiru Ummah. Damanik menyebut tahun 1989 NGO itu didirikan oleh beberapa ustadz yang kerap memberikan ceramah-ceramah di berbagai kampus: Yusuf Sufendi, Mukhlis Abdi, Abdullah Muadz, Rahmad Santoso, dan lain-lain. Mereka tetap menggarap sektor kampus pada awalnya. Dari jaringan dakwah kampus ini pada akhirnya mereka bisa menembus ke perkantoran di Jakarta dan kota-kota besar lainnya dengan melibatkan para eksekutif di dalamnya, serta ke segala penjuru tanah air. Ligo' atau halaqoh, dan sejenis instrumen kaderisasi lainnya telah banyak dilakukan di perkantoran atau ruang kerja-kerja lainnya sewaktu istirahat siang atau waktu yang ditentukan oleh mereka sendiri. Mantan aktivis dakwah kampus yang bekerja di beberapa perusahaan besar, seperti perminyakan di Riau, Bontang, atau di Free Port Papua inilah yang mengundang para ustadz dari Khoiru Ummah untuk memberikan ceramah agama di tempat-tempat mereka.

Hasil dari persemaian dakwah kampus yang selama ini dikelola oleh Khoiru Ummah telah melahirkan banyak jaringannya di Kaltim, Riau, Bali, NTT, juga Papua,

dan daerah-daerah lainnya. Mereka terus mereproduksi aktivis dakwah melalui lembaga dakwah yang mereka kelola itu. Dalam rentang waktu beberapa tahun saja, NGO ini telah besar dan berperingkat nasional. Yang lebih membanggakan tentu saja karena hadirnya telah mengilhami kemunculan begitu banyak, ratusan jumlahnya, lembaga dakwah sejenis di berbagai daerah. Sayap dakwah semacam inilah yang disebut oleh Sidik sebagai NGO klasik di PKS, karena memang pada awalnya gerakan tarbiyah hanya berkuat pada kegiatan dakwah semacam ini.

Selain masuk langsung di aras dakwah kemasyarakatan, ada juga model lembaga seperti Studi dan Informasi Dunia Islam Kontemporer (SIDIK) yang khusus bergerak dalam bidang pengkajian dan pemikiran, dan secara khusus menjadi *think tank* bagi kelompok dakwah ini. Didirikan pada tahun 1992 oleh tokoh-tokoh gerakan Tarbiyah, Abu Ridho AS., Al Muzammil Yusuf, serta Habib Abu Bakar al Habsyi—kesemua nama itu kini duduk di lembaga legislatif dari PKS. Pada fase selanjutnya dengan suntikan energi lainnya, seperti Mahfudz Sidik, perspektif sosial dalam melihat realitas kelslaman makin mendapat porsi lebih.<sup>54</sup> Kini, nama terakhir juga masuk ke parlemen mewakili PKS, dan sekaligus menjabat sebagai kepala Litbang PKS.

Lembaga ini banyak melakukan aktivitas pengkajian, terutama seminar, diskusi, pelatihan, penerbitan dan sebagainya. Kesemua aktivitas itu terutama diorientasikan untuk menyuguhkan isu-isu ihwal dunia Islam Internasional, dari segala aspeknya, sesuai dengan cara pandang mereka ke hadapan masyarakat. Mereka mengisi satu kevakuman pemberitaan media lain. Dengan publikasi audiovisual, mereka membuat film-film seputar perjuangan perjuangan umat Islam di Palestina, Bosnia, dan sekitarnya, dan disebarkan ke khalayak. Di aras media cetak mereka memproduksi jurnal, *Jurnal Dunia Islam*. Karena publiksi tersebut berbentuk jurnal, maka segmen pasarnya tentunya juga berasal dari kalangan yang relatif *well educated*.

Sebagaimana juga jaringan perintis lainnya, kehadiran SIDIK memberikan warna baru bagi perkembangan dakwah di kalangan aktivis gerakan dakwah. Kini, saat pameran buku atau acara-acara pameran lainnya, dengan mudah dijumpai aneka penerbitan dan lembaga serupa yang menjual aneka buku dan kaset-kaset dakwah Islam. Jumlah mereka bisa mencapai ratusan lembaga yang setiap kali ada acara PKS akan berpartisipasi memeriahkan acara tersebut dengan aneka produk publikasinya, mulai dari seri tilawah Al-qur'an, nasyid, siroh nabawiyah, sampai dengan "dialog" Islam dengan Kristen.

Jikalau di atas dibicarakan begitu banyak LSM dakwah yang bergerak di jalur konvensional, yakni menggarap masyarakat Islam yang "Islamnya" kurang, maka beberapa tahun belakangan ini lembaga dakwah jaringan PKS kian progressif saja. Mereka telah keluar dari jalur konvensional dan mulai menggarap orang-orang yang baru masuk Islam (mua'allaf). Salah satu NGO yang bergerak di bidang ini adalah Muallaf Foundation di Denpasar Bali (Da'watuna Edisi 5/Th. 01/2004).

Seperti diungkap oleh Slamet Adi Prayitno, Direktur Muallaf Foundation, lembaga ini berdiri setelah melihat semakin meningkatnya minat orang nonmuslim di Bali masuk Islam. Data itu ia peroleh setelah melakukan survey selama hampir dua tahun di KUA, khususnya di kota Denpasar dan Kuta. Dengan data itu di tangan dan setelah melihat lemahnya pembinaan muallaf di Bali, terutama dari pihak KUA yang terkesan acuh akan keberlanjutan Islam para muallaf, maka ia bersegera mendirikan lembaga dakwah "baru" semacam ini. Dengan 11 orang di bawah koordinasinya, maka pada Februari 2002 didirikanlah Yayasan Muallaf Foundation (YMF).

Setelah berdiri, YMF lantas merumuskan tiga kelompok yang menjadi sasaran dakwahnya: *pertama*, seperti tertera dalam papan namanya, maka fungsi utama dari lembaga ini adalah membimbing orang yang baru masuk Islam (muallaf), *kedua*, lembaga ini juga memerankan fungsi klasik lembaga dakwah, yakni masuk ke komunitas masyarakat Islam yang tidak tahu Islam, dan memberikan wawasan keislaman sebagaimana Islam yang mereka pahami. *Ketiga* dan ini yang luar biasa, orang yang belum masuk Islam (Islamisasi). Ketiga sasaran ini yang digarap oleh YMF. Fungsi pertama dan kedua, selama ini memang telah banyak dilakukan oleh jama'ah Tarbiyah dan melahirkan hasil cukup bagus bagi mereka. Namun, jika ada tambahan fungsi, terutama poin ketiga, tak pelak semakin menegaskan "kecurigaan" Islamisasi yang ditunjukkan oleh para kader PKS. Justru pada poin ketiga inilah, satu persoalan serius di tengah masyarakat plural semacam ini menjadi terancam. Jika mereka menolak Kristenisasi dan segala jenis ekspansi agama lainnya, maka ekspansi Islam ke tengah masyarakat non-muslim pastilah akan memicu perselisihan tak berkesudahan seputar isu ekspansi keagamaan.

Selanjutnya jaringan PKS yang bisa diidentifikasi adalah jaringan media. Jaringan ini juga bersifat massif karena telah memunculkan banyak publikasi media, terutama cetak, baik dalam bentuk majalah maupun buku. Salah satu media dalam bentuk majalah tertua yang memiliki persinggungan ideologis dengan gerakan dakwah, PKS sekarang ini, tentu saja adalah Sabili. Majalah ini didirikan oleh aktivis dakwah generasi pertama, seperti M. Zainal Muttaqin dan Rahmat Abdullah. Corak "radikal" majalah ini tak lepas dari sentuhan tokoh pendirinya, terutama yang pertama disebut. Tokoh ini jugalah yang memulai gerakan dakwah di kampus UI, terutama. Karena memiliki tradisi jurnalistik cukup kuat, maka ia mengembangkan Sabili dan memimpinnya selama dua periode. Sedangkan Rahmat Abdulloh, selain dikenal sebagai anggota legislatif dari PKS, ia dikenal juga sebagai tokoh dakwah yang santun, bersahaja, dan gigih. Karenanya ia mendapat julukan syaih Tarbiyah di lingkungan PKS. Kelihainnya dalam menorehkan tinta juga berperan besar dalam pengembangan Sabili.

Secara khusus, media ini menginformasikan perkembangan dakwah dari segala penjuru dunia, serta pemikiran-pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun. Bahasanya yang lugas dan temanya yang sangat spesifik Islam, dengan segmen khas kaum muda muslim, maka majalah tersebut begitu laris dibaca oleh kalangan Islam, khususnya para aktivis dakwah. Sebagaimana ditulis oleh Damanik, Sabili pernah mendapatkan prestasi sebagai majalah ke-2 paling banyak dibaca di Indonesia setelah majalah gadis. Data ini merupakan hasil survey dari AC Nielsen. (Dakwatuna, ibid.)

Setelah sekian lama bertengger di puncak sebagai majalah Islam paling laris dibaca oleh kalangan aktivis dakwah, sekarang telah banyak bermunculan majalah serupa, dengan format hampir sama: berbentuk mungil, ditulis ringan, dan menyampaikan informasi seputar dakwah dan politik. Mereka antara lain majalah Saksi—majalah yang “sangat” PKS, karena menjadi penyuar keluar dinamika dan prestasi perpolitikan PKS, baik di level nasional maupun lokal. Banyak anggota legislatif maupun pejabat teras partai duduk di jajaran dewan redaksinya; Abu Ridho, Mahfudz Sidik, Mashadi. Hampir setiap edisi yang dikeluarkan, terutama di kolom taujih, didapati tulisan pendek presiden PKS. Di kolom lainnya, siyasah Tarbawiyah, juga memuat tulisan Mahfudz Sidik secara rutin, dengan tema seputar politik PKS dan dakwah. Tak ketinggalan, majalah ini juga menyorot masalah seputar keislaman dan politik Islam di belantika Internasional. Selain majalah Saksi, ada majalah Da’watuna, Tarbawi, dan beberapa lainnya. Di kalangan remaja, pelajar, juga ada majalah Annida. Ia dikemas secara *gaul*, namun Islami. Ia beredar luas di berbagai sekolah menengah, bahkan juga kampus. Semua majalah itu lahir dari rahim sama: gerakan Tabiyah di Indonesia.

Selain majalah, dunia perPKS-an juga diramaikan dengan aneka penerbitan buku. Hari-hari ini, penerbitan mereka telah mendominasi penerbitan buku berjenis keislaman. Mulai dari yang “berbobot” intelektual cukup, dengan penyajian buku-buku politik Islam, sejarah pemikiran, sampai dengan buku-buku yang menyajikan cerita-cerita ringan seputar wacana keislaman anak muda, rumah tangga, anak-anak, dan seterusnya. Dalam konteks penerbitan buku bernuansa gerakan Tabiyah ini lagi-lagi Abu Ridho, dengan beberapa kawannya, menjadi *trend setter* melalui pendirian Al-ishlahy Press. Buku-bukunya pun sejenis peta dan produk pemikiran para aktivis IM, semacam tulisan Said Hawwa, Mustafa Masyhur (Mursyid ‘Aam kelima IM), dan lain-lain.

Pada fase selanjutnya, muncullah penerbit-penerbit sejenis dengan model pengelolaan yang lebih profesional. Di antara mereka adalah Gema Insani Press, Pustaka Al-Kaustar, Robbani Press, dan lain-lain. Generasi paling belakang didapati juga beberapa penerbit seperti I’tishom, Era Intermedia, Asy-Syamil, Pustaka Tarbiyatuna, Tarbawi Press, dan sebagainya. Dengan menjamurnya penerbitan buku dan majalah semacam itu, siapapun tak akan kesulitan untuk mendapatkan pemikiran IM, melalui tulisan-tulisan tokohnya, penulis-penulis yang mengulas IM, ataupun aktivitas dakwah secara umum. Kesemua jenis penerbit tersebut hampir mengangkat tema sama; wacana keislaman, harokah, dan politik Islam. Perkembangan ini bagi perwajahan media di Indonesia sungguhlah luar biasa. Satu kekuatan politik bertradisi keislaman dan ideologi sama, memiliki begitu banyak media, dengan kesamaan isu, dan semuanya survive, merupakan sebuah prestasi tersendiri.

Mungkin masih banyak lagi jenis lembaga yang menjadi jaringan informal PKS. Bisa jadi jaringan itu juga mewujud para personalitas kader yang terkenal militan itu. Di setiap ruang di mana mereka bekerja, berkarya, ataupun belajar, pastilah mereka tak sungkan untuk menunjukkan kebanggaan *atribute* mereka sebagai kader PKS. Mereka bekerja untuk turut ambil bagian dalam syiar dakwah dan mengembangkan organisasi, terselubung maupun secara terbuka. Yang bersifat

personal biasanya dalam bentuk kelompok-kelompok pengajian kecil di lingkungan mereka masing-masing. Majalah *Da'watuna* banyak mengulas kegiatan dakwah perseorangan maupun kelompok di berbagai daerah di Indonesia.

Semua jenis NGO dan lembaga bisnis "berpanji dakwah" yang memiliki korelasi dengan PKS, langsung maupun tidak, jelas memberikan kontribusi besar dan positif bagi pengembangan dakwah Islam ala mereka dan bagi PKS sebagai partai politik dan organisasi dakwah sekaligus. Ditegaskan oleh Sidik (2003), mereka bukan *underbow* PKS, melainkan hanya memiliki titik temu pada aras fikroh dengan para aktivis pengelolanya. Kemudian dalam berbagai kesempatan mereka diorganisir untuk aksi bersama dalam ikatan PKS ataupun gerakan Tarbiyah secara umum. Hal demikianlah yang disebut oleh Sidik sebagai jaring-jaring (informal) PKS.

PKS jelas berkepentingan dengan hadir dan makin merebaknya lembaga-lembaga tersebut untuk semakin menopang eksistensi dan kiprahnya. Oleh karena itu, Sidik (2003) mengutarakan, PKS sebagai organisasi dakwah yang berjalan di atas manhaj Islam, secara sadar mendukung eksistensi beragam LSM ini. Sebutan akrab bagi LSM ini dalam wacana dakwah PKS adalah *wajihah* atau *muassassah*, dan memiliki fungsi sebagai sarna memperpanjang dan memperluas *ihitak sya'bi* atau jangkauan sosial. Di era ketika dakwah belum terorganisir secara formal dan dfan terbuka, jangkauan sosial dakwah akan lebih mudah bila memlaui sarana LSM. Begitupun di era jahriyah-jamahiriyah (jelas, terbuka) seperti sekarang ini. Segmen masyarakat dan segala aspek kehidupannya yang tidak atau belum bisa dijangkau dengan organisasi partai akan menjadi mudah bila disentuh dengan sarana LSM. Berangkat dari prestasi tersebut, maka sebutan partai politik "plus" (LSM) pun mendarat ke tubuh PKS.

## **Bab 4**

# ***Policy Orientations* dan Dinamika Internal Partai**

Kekuatan PKS diyakini bertumpu pada dua variable utama: kader dan ideologi yang menopang sekaligus diperjuangkan olehnya. Pertama, sebagai partai kader segala perilaku politik PKS senantiasa ditopang oleh kerja-kerja kaderisasi untuk menciptakan kader-kader yang handal sebagai *stakeholders* utama penguatan dan pengembangan partai. Tanpa adanya kader dan sistem kaderisasi yang handal dan kontinyu, PKS dipastikan stagnan, bahkan mengalami kemunduran.

Kedua, ideologi dan sistem nilai. Dengan pondasi ideologi yang begitu kokoh mengikat tiap benak dan hati setiap kadernya, arah dan tujuan partai dalam tiap tahapan perjuangan nilai dan kepentingannya telah begitu jelas. Ideologi lah yang memungkinkan PKS semakin giat menawarkan solusi atas segala problema kebangsaan yang tak kunjung tuntas, melalui perluasan orbit dakwahnya. Ideologi, yang dikawal oleh Dewan Syariah Partai di segala tingkatan, pulalah yang selama ini menjaga bangunan PKS relatif tidak terombang-ambing oleh benturan antara realitas politik dengan basis nilai dan ideologinya, yang kerap kali tidak sejalan itu.

Chapter kali ini akan melihat orientasi politik elit (qiyadah) PKS; pilihan-pilihan kebijakan dan sekaligus antisipasi dampak kebijakan, sebagai mekanisme pengambilan keputusan publik (Hupe and Hill, 2006), terutama dari dan untuk para kadernya. Cara pandang PKS terhadap suatu permasalahan, penyikapan serta pembuatan kebijakan (policy making) untuk merespon persoalan tersebut menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan PKS akan diarahkan.

Perilaku politik (political behavior) PKS yang mengarah ke arah moderat dari sisi keyakinan keagamaan, dan nasionalis-sekuler dari sisi orientasi dan capaian politiknya, semakin menunjukkan diri sebagai partai yang siap berbenah. Kesiapan untuk membenahi dirinya itu tentu saja terkait dengan keyakinan PKS bahwa partai yang dikawal oleh kader-kader muda Tarbiyah ini telah siap untuk memimpin negeri multikultural ini. Oleh karena itu, berbagai hampatan psikologis dan politik yang merintang jalan PKS untuk meraih kekuasaan yang lebih luas dan besar lantas diurai dan dipecahkan satu persatu.

Gugusan respon terhadap problematika di luar PKS yang melahirkan kebijakan politik lantas berdialektika harapan dan imaginasi politik para kader, simpatisan, dan publik secara luas, menghasilkan satu dinamika yang menarik. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua kebijakan politik akan menghasilkan respon bagus dari basis konstituen atau publik. Meski telah melalui mekanisme yang ketat dan sistematis dalam pengambilan kebijakan sebagaimana menjadi aturan main PKS,

tetap saja menyisakan *feedback* yang ada tidak semulus yang diharapkan. Ketidakpuasan kebijakan bukan saja datang dari pihak luar partai, para kader sendiri acapkali risau, mengapa pilihan kebijakan yang ditetapkan partai tidak sebagaimana yang mereka harapkan.

Sebagai konsekuensi dari diskusi orientasi kebijakan PKS, beragam dampak kebijakan yang secara langsung maupun tidak, jangka pendek maupun panjang, yang sudah atau mulai dirasakan para kader partai tersebut juga akan menjadi pembahasan lanjutan di chapter ini. Beragam respon kader atas pilihan kebijakan yang telah digariskan partai menghadirkan sesi dinamika internal yang khas, yang mulai berkembang dan mengalami resonansi yang semakin besar dari hari ke hari.

### **1) Moderasi PKS: Mendukung di antara Pragmatisme dan Idealisme**

PKS pada dasarnya menerima 'secara diam-diam' beragam komentar atau hasil riset dan survey yang mengatakan bahwa suara pemilih Indonesia yang sepaham dan mendukung cita-cita Islamisasi di Indonesia hanya memiliki prosentase yang kecil. Meski kerap mengkritik hasil lembaga survey seperti LSI yang disebut Mabruki telah 3 kali melakukan kesalahan hasil survey terkait dengan PKS<sup>55</sup>, PKS setidaknya mempertimbangkan hasil-hasil survey LSI yang mengatakan bahwa karena tidak ada perkembangan pemilih yang mendukung agenda-agenda politik Islam, maka partai-partai Islam yang sudah dilekatkan dengan platform Islam akan mengalami kerugian karena tidak bisa memperebutkan suara yang lebih besar, yakni suara non Islam.

Jika partai-partai nasionalis sekuler bisa memperebutkan suara di atas 70% maka partai-partai Islam hanya akan memperebutkan segmen di bawah 20% (LSI, Prospek Islam Politik, 2006). Realitas pemilu 2004 menunjukkan, partai-partai berideologi Islam seperti PKS, PBB, dan PPP masing-masing belum meraih suara berarti atau hanya sekitar 18%. Mereka jauh tertinggal oleh partai sekuler (Golkar, PDIP, Demokrat).

Paralel dengan riset LSI tersebut, PKS melukiskan gambaran masyarakat Islam Indonesia bahwa berkisar 70%an muslim Indonesia bercorak moderat dan tidak memiliki agenda politis memperjuangkan tegaknya negara Islam, karena telah meyakini finalitas Pancasila dan NKRI (PKS, 2008). Kecenderungan pemilih muslim yang bersepakat dengan gagasan Pancasila dan NKRI tentu saja mayoritas berafiliasi dengan ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, yang dari awal peletakan pondasi keormasannya telah ikrar setia dengan Pancasila dan NKRI. Artinya, sejauh dua ormas terbesar tersebut masih kuat kecil kemungkinan mayoritas muslim Indonesia mendukung pengumandangan syari'at Islam atau negara Islam sebagai pengganti Pancasila.

Sebagaimana diulas sebelumnya, agenda-agenda Islamisasi politik yang dijual PKS diawal pendiriannya tampak tidak laku. Saat itu PK terpuruk dan

---

55

dipandang sebelah mata oleh para pengamat politik, karena mendengungkan satu corak keislaman yang banyak dinilai ahistoris dalam sejarah Indonesia. Belajar dari realitas politik yang tidak menguntungkan jika PKS terus maju dengan agenda-agenda perjuangan politik Islamnya, maka satu-satunya jalan jika ingin meraih suara yang lebih besar untuk bisa meraih kekuasaan politik di pemerintahan adalah 'membelokkan' arah perjuangannya.

Salah satu strategi PKS yang cukup menarik dalam memutar haluan perjuangan Islam tentu saja adalah interupsi terhadap perjuangan piagam Jakarta dan melaunching piagam Madinah, satu penghalusan target politik, sebagaimana didiskusikan di bab sebelumnya. Siasat ini tentu saja didorong untuk menunjukkan komitmen PKS untuk tidak mengganggu gugat bangunan kenegaraan-kebangsaan yang diyakini menjadi pilihan terbaik bagi bangsa yang plural semacam Indonesia.

Lebih jauh dari itu, peta Islam PKS harus jelas jika ingin meraup suara lebih luas lagi. Asumsinya, jika PKS di hadapan masyarakat Islam sendiri masih menyisakan problema apalagi bagi masyarakat di luar Islam pada umumnya. Oleh karena itu, Anis Matta menjelaskan kepada publik bahwa PKS sudah moderat dari dulu, karena sikap dasar Islam itu moderat. Islam yang dianut oleh PKS adalah Islam jalan tengah.<sup>56</sup>

Islam jalan tengah atau moderat sebagaimana penegasan Anis Matta menjadi penting bagi PKS untuk menunjukkan dirinya sebagai kekuatan Islam yang mampu merangkul semua kekuatan politik di Indonesia. Seteleha penerimaan publik berjalan lancar, tentu saja tahapan selanjutnya adalah obsesi dalam pemilu 2009, yakni mendapatkan minimal 20% suara pemilih. Sebagaimana berkali-kali Tiffatul Sembiring, Presiden PKS periode 2005-2010, katakan bahwa PKS akan melanjutkan ekspansi ke basis massa nasionalis dan sekuler yang segmen pemilihnya masih besar untuk dipertarungkan. Kalau PKS berkuat dengan segmen Islam kental—sebagaimana selama ini dijalankan—target Munas 2005 untuk mencapai minimal 20 persen suara sulit tercapai.<sup>57</sup>

Ekspressi Islam moderat ala PKS ini sungguh menarik untuk dicermati. PKS tidak lagi mengusung symbol-simbol agama atau secara eksplisit mengusung perjuangan penegarakan syari'ah sebagaimana masih diwacanakan oleh partai Islam lainnya seperti PBB. Meski secara subtansial PKS adalah Islam, yang masih diperlihatkan secara kuat oleh para kadernya, baik dalam perilaku keagamaan, atau cara berpenampilan para kader yang nyaman dengan pakaian yang dianggap Islami, secara formal strategi kampanyenya PKS tidak lagi mengusung isu-isu Islam. Ideologi Islam PKS sudah ke tengah, sehingga tidak memperjuangkan Islamisasi di jalur formal", ujar Mabururi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat <http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-sayonara-konservativisme.htm>, diakses 24, November 2008

<sup>57</sup> Lihat <http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/29/time/143932/idnews/823310/idkanal/10>, diakses 24 November 2008

<sup>58</sup> Wawancara dengan Mabururi, via telpon,

Dengan ungkapan sayonara konservatisme: satu istilah yang dimaksudkan sebagai gaya lama PKS dalam berpenampilan, berinteraksi, dan 'berselera' hidup, maka Islam moderat juga bagian dari deklarasi PKS untuk merambah ke arah yang bisa diterima dan menerima siapa saja. Sebagai contoh, jika celana jeans bagi gerakan Tarbiyah dulu adalah bagian dari westernitas, maka Islam jalan tengah PKS 'menghalalkan' aneka pakaian yang dulunya dianggap sebagai gaya barat itu. Jika dahulu musik non nasyid haram diperdengarkan kepada para kader, maka kini group band musik pop atau rock sengaja diundang PKS untuk memeriahkan event yang digelar dalam acara berpartai. Jika dahulu PKS tampak 'alergi' dengan simbol kemewahan seperti mobil berharga ratusan juta rupiah, maka kini beberapa petinggi PKS begitu *pede* mengendarai mobil mewah sejenis alphard atau Harrier.

Pada akhirnya, Islam moderat adalah Islam yang lentur: satu ikhtiar PKS untuk lebih gesit bergerak mendekati dan mengambil hati seluruh lapisan sosial dan strata ekonomi. Sebuah berislam yang menuntut para kadernya untuk berpikir dan bertindak, meminjam istilah Hilmi aminuddin, di "sini" dan "kini", yang diproyeksikan merangkul semua kelompok sosial-politik-ekonomi-budaya di Indonesia untuk pemenangan pemilu 2009. PKS meyakini perubahan ideologi Islam yang semakin ke tengah itu adalah sebuah kebutuhan, dan karenanya harus ditahapkan secara serius dan sistematis oleh setiap kader partai.

Trademark Islam moderat yang diusung PKS tentu saja masih merupakan *on going process*. Publik juga masih meraba sejauh mana "Islam Tengah" tersebut dioperasionalkan bukan saja di level kampanye dan jargon, tapi juga menjadi basis teologi PKS. Jika merujuk pada hasil survey LSI tentang kekuatan electoral partai-partai Islam menjelang pemilu 2009 yang diterbitkan pada bulan September 2008 ini publik belum sepenuhnya merasakan perubahan Islam 'baru' PKS tersebut. Hasil survey LSI tersebut masih menunjukkan bahwa PKS tetap saja dipersepsi publik sebagai partai yang paling Islami.

PKS pun tampak kecewa mendapati dirinya masih dipersepsi sebagai partai paling Islam oleh publik. Sebagaimana dinarasikan Mabruri, PKS mempertanyakan metodologi yang dipakai LSI terutama terkait dengan cara pengukuran dan definisi Islam dalam konteks tersebut. Bagi PKS, LSI seolah mengabaikan sama sekali strategi PKS yang enggan mengusung isu-isu keislaman dalam komunikasi politiknya kepada masyarakat. Mengomentari hasil riset LSI tersebut, PKS 'mengendus' adanya nuansa pesanan yang tampak kental dalam proyek survey tersebut.<sup>59</sup>

Hal senada disampaikan Ahmad Razikun, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PKS. Sejurus dengan Mabruri, Razikun mempertanyakan pengukuran yang digunakan LSI untuk melihat beragam tipologi partai. Bagi PKS, karena LSI tidak clear mendefinisikan apa hakekat partai Islam, maka hasil survey itu layak untuk diragukan. Razikun lantaran menggambarkan tampilnya PDIP dengan citra Islaminya. "Taufik

---

<sup>59</sup> Mabruri, *ibid*. Skeptisisme PKS pada LSI didasarkan pada beberapa kesalahan dari hasil survey LSI beberapa tempo sebelumnya. LSI pernah meleset memprediksi PKS tidak akan tembus electoral treshold pada pemilu 2004. Partai Islam juga diprediksi oleh LSI akan mengalami penurunan pada pemilu 2004. Justru sebaliknya, PKS yang partai Islam itu berhasil membanting prediksi LSI itu.

Kiemas saja sekarang pake kopiah dan baju koko. Identifikasi mana partai Islam atau tidak kini lantas menjadi absurd," terang Razikun.<sup>60</sup>

Keinginan PKS untuk tidak distigma sebagai partai Islam, yang kerap kali dikaitkan dengan serentetan agenda Islamisasi dibelakangnya atau corak eksklusifnya, seolah tak bisa dibendung. Belajar dari pengalaman sebelumnya dimana publik senantiasa menempatkan PKS sebagai partai Islam eksklusif yang akhirnya berbuah tidak terlalu manis bagi pencapaian politik PKS, maka mengeser ke tengah ideologi Islam adalah sebuah strategi pemasaran politik untuk menampilkan diri lebih terbuka dan inklusif.

Corak keberagaman eksklusif yang dulunya melekat pada diri PKS membawa konsekuensi juga bagi munculnya image negatif PKS sebagai partai yang agresif dan kurang beretika dalam dakwah. Militansi PKS dalam memperluas dakwah ditangkap secara berbeda oleh publik yang pada akhirnya mencuatkan pandangan agresif tersebut. Sebagai gambaran, jika ada masjid yang kurang semarak dengan beragam kegiatan keagamaan dan sosial, maka ditangan kader-kader PKS, masjid itu di'hidupkan' dan dikelola sepenuhnya, dengan secara pelan 'meminggirkan' para pengelola sebelumnya. PKS-isasi masjid pun terjadi. Selanjutnya, pengendalian seluruh aktivitas masjid secara pelan, termasuk ritual keagamaannya, yang belum tentu sesuai dengan cara masyarakat dalam berIslam, tak pelak menimbulkan ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat.

Kini, ketika PKS melauching satu corak keberagaman yang lebih moderat, yang disebut Anis Matta sebagai "Islam Jalan Tengah", maka determinasi dakwah PKS diperluas spektrumnya dan dipercantik paras dan pendekatannya. PKS tidak hanya bermain di wilayah kantong-kantong keislaman modern, tapi juga telah merambah ke wilayah nasionalis-sekuler dan Islam tradisional. Beragam segmen masyarakat juga digarap, mulai dari kaum muda, wanita, profesional, pengusaha, dan seterusnya. Kecerdikan PKS dalam merumuskan strategi ini dilengkapi dengan beragam program yang secara efektif bisa menembus ke pusat kantong massa, seperti program PKS Mendengar, Gerakan Peduli Tetangga, dst.

Melengkapi beragam program yang telah ditetapkan, di level struktur PKS, Munas PKS 2005 mengamanatkan DPP untuk membentuk organisasi-organisasi yang menjadi ujung operasional departemen-departemen. Menurut Rama Pratama<sup>61</sup>, ada dua fungsi lembaga seperti ini, sebagai wadah berhimpun dan ujung tombak perekrutan. Meski tugas terakhir tidak menjadi target utama, tapi Rama memastikan bahwa dengan adanya sayap massa tersebut, pintu-pintu kaderisasi semakin luas.

Misalnya departemen ekonomi, membuat lembaga penelitian untuk menghimpun banyak peneliti dan para ekonom, yang tidak musti dijejali ideologi PKS. Kerjasama mewujudkan cita-cita bersama adalah kata kunci berhimpun. Departemen Pemuda, ada JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Departemen

---

<sup>60</sup> <http://www.detiknews.com/read/2008/09/24/235928/1012697/10/provokasi-lsi-bikin-pks-berbenah>, diakses pada 26 November 2008

<sup>61</sup> Wawancara dengan Rama Pratama, Juni 2008

Mahasiswa, sudah ada KAMMI. Departemen wanita punya wadah berhimpun namanya Salima, yang menghimpun majelis taklim, pengajian ibu-ibu dan kaum putri, dst. Rama sendiri ditugaskan PKS untuk membentuk wadah berhimpun dengan nama Gema Keadilan, yang mengorganisir pemuda lingkungan, kaum muda yang memiliki aktivitas diluar pendidikan dan profesional.

Rama memaparkan, wadah-wadah yang dibentuk PKS ini bercorak terbuka dengan menggunakan pendekatan massa. Apa yang dikatakan terbuka oleh Rama adalah dalam konteks kegiatannya, meski tetap tertutup secara organisasinya, karena dikelola oleh para kader. "Massanya terbuka, organisasinya tertutup", ujar Rama. Pembentukan wadah ini menggunakan logika umum partai massa, meski di satu sisi, sebagai partai kader, kewajiban untuk mentahapkan kaderisasi harus senantiasa ditahapkan. Sebagai wadah berhimpun, organisasi seperti Gema Keadilan ini tidak terikat secara ideologis dengan PKS, tapi terikat secara personal, emosional dengan PKS.

Apa yang dilakukan PKS dengan membentuk wadah berhimpun massa tersebut tentu saja karena sebuah tuntutan untuk menjawab target perolehan suara 20% yang telah digariskan partai. Rama melakukan kalkulasi, Jika PKS mengandalkan kader semata, maka PKS hanya akan memperoleh peningkatan suara secara linear. Dengan fakta di tahun 1999 PKS dapat 1,4 persen dan pemilu 2004 PKS meraih 7 persen suara, maka jika dikalkulasi secara linear maka pada tahun 2009 nanti PKS hanya akan memperoleh suara paling banyak 13%. Oleh karena itu, PKS membutuhkan lompatan-lompatan strategi sehingga target 20% yang telah digariskan partai bisa diwujudkan. Rama melanjutkan, jika konsisten ingin meraih kemenangan politik, sebagaimana digariskan Majelis Syuro dengan target 20% itu, maka realitas politik menuntut adanya sisi pragmatisme yang tidak bisa dielakkan dari kerja-kerja politik PKS.<sup>62</sup>

Demikianlah gambaran dari perilaku politik PKS yang sedikit atau banyak diturunkan dari perubahan corak partai terkait dengan bangunan keislaman jalan tengah yang sekarang dirayakan oleh PKS. Islam Jalan Tengah sebagaimana didesign petinggi PKS memungkinkan para kader dan operator lapangan politik PKS memperluas daya jangkau rekrutmen dan kaderisasi. Bahkan, lebih jauh dari itu, logika massa yang selama ini dipertentangkan dengan logika kader dalam berbagai literature ilmu politik, tampak dikaburkan dalam tubuh PKS. Islam Jalan tengah yang relative bercorak terbuka, menunjukkan 'rasa' moderat dan lentur pada diri PKS. Islam yang lebih bercitarasa 'nasionalistik', akomodatif, dan fleksibel, sehingga berbekal itu PKS lebih bisa diterima di banyak kalangan.

Namun, strategi politik dan ijtihad siyasi yang begitu cantik tersebut menimbulkan tafsir baru sekaligus kekhawatiran bagi para kader dan juga pemerhati PKS: apakah PKS masih bersetia dengan partai kader di dalam jama'ahnya atau telah bergerak mengikuti logika partai massa, yang tentu saja menuntut keterbukaan di beberapa level, sekaligus menganankirikan para kader dalam *policy orientationnya*.

---

<sup>62</sup> Wawancara Rama Pratama, ibid.

Lagi-lagi ini terkait dengan bangunan ideologi Islam yang sedari awal PKS tetapkan: sebuah ideologi politik yang menyandarkan pada militansi kader jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun. Apakah dengan berislam yang lebih ke tengah, moderat, dan pastinya lebih terbuka, tidak akan memiliki implikasi bagi kian pudarnya militansi dan ideologi para kader, yang selama ini menjadi penyangga soliditas dan kekuatan PKS?

Abu Ridho, pengawal ideologi gerakan Tarbiyah Indonesia, menyadari bahwa telah terjadi pelunturan ideologis yang menyebabkan degradasi moral pada sebagian kader di dalam tubuh partainya. Meski mereka yang dianggap luntur ideologinya itu punya alasan sendiri, Ridho tetap merasakan ada yang salah di dalam tubuh partainya, meski tidak parah dan masih bisa diobati. Satu polemik yang muncul menjelang Musyawarah nasional di Bali awal tahun 2008, soal partai terbuka, adalah satu gambaran bahwa ada perubahan orientasi ideologi yang selama ini dianut oleh PKS. Isu tersebut rencananya akan dimasukkan dalam salah satu agenda yang akan dibahas dalam Munas tersebut.

Bagi Abu Ridho, sebetulnya wacana partai terbuka, yang membuat partai dihujani berjuta pertanyaan oleh para kader, hanyalah wacana dan obsesi beberapa orang saja. Sebut saja misalnya, Anis Matta (Sekjen PKS), Dr. Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syari'ah PKS), Mahdufdz Sidiq (Ketua Litbang DPP PKS). Meski pada akhirnya debat soal keterbukaan partai yang sempat mencuatkan isu perpecahan di dalam tubuh PKS itu dihentikan, dengan dikeluarkannya bayanat dari DSP, yang uniknyanya ditandatangani sendiri oleh Dr. Surahman.<sup>63</sup>

DSP<sup>64</sup> mengklarifikasi simpang siur berita tentang keinginan partai menjadi terbuka tersebut dengan menyatakan bahwa istilah "terbuka" tidak pernah menjadi keputusan PKS sebagai slogan. PKS tetap sebagai partai dakwah yang berazaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Bagi DSP, istilah terbuka sebagai usulan, wacana, dan beberapa wawasan yang disampaikan oleh para kader dari daerah minoritas, sedang dikaji dan dalami, apakah hal ini layak untuk di ambil sebagai bahan pertimbangan, yang pada akhirnya nanti akan dibahas dalam sidang-sidang Majelis Syuro mendatang. Mengenai keterbukaan komunikasi adalah merupakan keniscayaan dan tuntutan profesionalitas.

Berbeda dengan bayanat DSP PKS, Ridho<sup>65</sup> meyakini bahwa wacana partai terbuka dimaksudkan oleh para pengusulnya itu sebagai pertama, upaya PKS untuk memiliki massa yang banyak untuk target kemenangan pemilu. Kedua, keterbukaan partai ini terkait soal pendanaan partai. Dengan merubah partai menjadi terbuka, aliran dana dari berbagai sumber diharapkan akan lebih terbuka untuk masuk ke partai. Misalnya adanya harapan dari beberapa elit partai untuk memasukkan kalangan pengusaha 'Cina' menjadi bendahara partai.

---

<sup>63</sup> Wawancara Abu Ridho, 25 Juni 2008 di Jakarta.

<sup>64</sup> Bayanat Dewan Syariah Pusat DPP PKS, lihat <http://pksbali.org/bayanat-mukernas-2008/>

<sup>65</sup> Wawancara Abu Ridho, *ibid*.

Menampik keyakinan para penganut paham 'keterbukaan' partai, Ridho meyakini bahwa PKS telah memiliki trademark yang kuat sebagai partai kader, yang selama ini dijalankan secara benar oleh para kadernya. Karena itu, partai kader harus mencerminkan sistem kaderisasi yang kuat dan tidak harus berorientasi massa. "Tidak jujur, jika partai kader perilaku dan mentalnya adalah partai massa", tegas Ridho. Justru dengan wacana keterbukaan ini, dua basis utama PKS, kaum 'fundamentalis', mereka yang mendukung PKS karena dianggap bisa menyalurkan aspirasi Islam, dan 'kaum sekuler kota', mereka yang memilih PKS karena melihat ada anak-anak muda terpelajar, modern, dan *capable*, akan lari dari PKS.

Menanggapi para kritikus dari internal partai yang merisaukan kondisi kekinian yakni mengarah pada pragmatisme dakwah untuk sekedar kemenangan 2009, Rama sendiri punya asumsi kuat bahwa sebagai kader dirinya hanya menjalankan tugas partai. Dia juga merasa tidak punya kapasitas untuk membantah atau membesar-besarkan sebagian kalangan di dalam partai yang tidak setuju atau khawatir tentang perilaku politik PKS yang kian moderat, bahkan terkadang pragmatis. Dengan menyadari bahwa ada friksi internal soal strategi PKS ini, Rama menyatakan akan terus bekerja untuk memenangkan pemilu 2009.

"Bukankah dulu, sebagaimana dalam pengajian di ruangan 3x4 (ruang kaderisasi), diajarkan bahwa kita harus menjadi ikan yang walaupun ada di air laut kita tetap tidak asin. Meskipun bercampur kita tidak terwarnai. Lha, terus bagaimana praktek aplikasinya kalau kita terus-terusan di ruangan 3x4, kalau kita tidak keluar. Rasulullah berdakwah juga dengan terbuka" tegas Rama<sup>66</sup>.

Rama meyakini bahwa sebagai partai dakwah, PKS harus berpikiran maju, menyongsong kemenangan yang telah digariskan pemimpin partai. PKS harus terus menjalankan program, terus menambah program dan jangkauan wilayahnya, menambah terus kemenangan di pilkada. "Makanya pada suatu waktu, kader itu harus dibenturkan dengan realitas pragmatis" misalnya menghimpun seluas-luasnya pendukung dalam pilkada, termasuk pelacur sekalipun," ungkap Rama.<sup>67</sup>

## 2) Case Koalisi Politik, Pilpres dan Pilkada

Persoalan menarik untuk dikaji dalam orientasi kebijakan PKS adalah koalisi politik yang dilakukan PKS dalam perebutan kekuasaan politik, baik di level nasional maupun di level daerah, provinsi atau kabupaten kota. Sebagaimana partai lainnya, PKS telah begitu siap untuk terlibat aktif dan masuk ke dalam pemerintahan, terutama di level daerah. Hampir semua pilkadal di daerah diikuti secara serius oleh PKS, baik dengan cara mencalonkan kandidat secara mandiri, dimunculkan sendiri dan hanya didukung oleh PKS, ataupun dengan jalan koalisi dengan partai-partai lainnya. Pun demikian dengan persiapan pemilihan presiden. PKS secara dini telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk digadang-gadang sebagai kandidat calon presiden yang diusung partai dakwah ini.

---

<sup>66</sup> Wawancara Rama, Op.cit.

<sup>67</sup> Wawancara Rama, ibid.

PKS telah membuang jauh-jauh stigma yang selama bertahun-tahun melekat pada dirinya, terutama saat masih PK, yakni sebagai 'kritikus' tajam di parlemen. Lebih khusus lagi, setelah menambah slogan "profesional", di belakang "bersih dan peduli", PKS telah menyiapkan kader-kadernya atau kandidat yang diusungnya untuk mampu secara profesional menjadi pemimpin, di semua lapisan kekuasaan.

Pemaknaan profesional sebagaimana dirumuskan oleh PKS (PKS, 2008:57) adalah dimilikinya kompetensi inti, kecakapan managerial, kemampuan berpikir strategis, dan sikap terbuka (open minded). Dengan slogan baru ini, PKS ingin menjawab keraguan publik dengan menunjukkan kapasitas dan kapabilitas kader-kader PKS sesuai jabatannya jika diberi kesempatan untuk memimpin nanti.<sup>68</sup>

Anis Matta<sup>69</sup> secara meyakinkan mengungkapkan kepada publik bahwa telah tiba saatnya bagi PKS untuk tampil di depan. Sebagai ilustrasi, terutama dalam konteks pemilihan presiden, PKS diibaratkan oleh Anis sebagai makmum yang tepat berdiri di belakang imam. "Sewaktu-waktu imam batal, kita siap menggantikannya," ujar sekjen PKS, yang merangkap sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu Nasional PKS ini.<sup>70</sup>

Keseriusan PKS untuk meraih kepemimpinan politik, terutama di mulai dari daerah, diperlihatkan PKS dengan berbagai keberhasilannya di ajang pilkadal. Sampai Juni 2008, PKS telah memegang rekor partai politik yang paling banyak memenangkan pertarungan politik di pilkada dengan 94 kemenangan yang diraih PKS dari 154 pilkada yang diikuti PKS, baik secara mandiri ataupun koalisi dengan partai-partai lain.<sup>71</sup> Kemenangan terus dikumpulkan PKS dan partai yang berkoalisi dengannya, seperti di akhir tahun 2008 dengan H Ishak Mekki-H Engga Dewata di kabupaten Ogan Komering Ilir Sumsel, Soekarwo-Saefullah Yusuf di Jawa Timur, dan seterusnya.

Setelah berbagai kemenangan pilkadal di raih PKS, maka posisi politik PKS semakin melambung. PKS tidak lagi dipandang sebelah mata oleh partai-partai lainnya. Kondisi ini kian kuat, ketika misalnya pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, 8 Agustus 2008 lalu. PKS secara eksklusif mengajukan Adang Daradjatun-Dhani Anwar sebagai calon gubernur-wakil gubernur untuk maju dalam putaran pilgub di DKI. Tak tanggung-tanggung, PKS melawan kaukus partai politik yang berjumlah 20 partai yang secara eksklusif juga mengusung Fauzi Bowo-Prijanto.

Meski kalah dalam pilkada DKI, PKS merasa terhormat karena kalah dari 'keroyokan' aliansi 20 partai. Adang-Dhani meraih 1.534.092 suara atau 42,17% kalah dari Fauzi Bowo-Prijanto yang berhasil meraih 57,83% atau 2.103.889 suara. Bahkan dibanyak kesempatan disebutkan bahwa sejatinya PKS bukan kalah, bahkan

---

<sup>68</sup> Wawancara Maburri, op.cit.

<sup>69</sup> Lihat <http://smsplus.blogspot.com/2008/11/anis-mata-saatnya-pks-di-depan.html>, diakses pada 25 November 2008

<sup>70</sup> Di dalam struktur DPP PKS periode 2005-2010, ada Badan Pemenangan Pemilu, Bappilu, yang diketuai oleh Ahmad Razikun. Namun, pada tahun 2007 dibentuk juga TPPN, satu *taskforce* yang merumuskan dan melaksanakan kerja-kerja pemenangan pemilu, di bawah kepemimpinan Anis Matta.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Tifatul Sembiring, 26 Juni 2008.

mengalami kemenangan karena berdasarkan pada perhitungan matematis, suara yang diraih PKS dalam pilgub kemaren adalah 47%an melonjak 100% lebih dari perolehan suara partai pada pemilu 2004, yang sebesar 20%. Lebih lanjut, pilkada DKI di mata PKS menghasilkan dua pemenang, Fauzi-Prijanto dan PKS.<sup>72</sup>

Pilkada Jakarta memang menjadi special di mata PKS. Pertama munculnya kesan “dikeroyok” oleh partai-partai lain, karena diduga terkait dengan nuansa kekhawatiran partai-partai lain bahwa PKS adalah partai yang potensial besar yang akan mampu menjadi kuda hitam di pertarungan pilgub DKI, apalagi sebelumnya di pemilu 2004 PKS menjadi pemenang pemilu di Jakarta. Soliditas kader dan militansi kader dalam kampanye door to door adalah salah satu alasan mengapa PKS harus diwaspadai untuk bisa mengambil alih kepemimpinan politik di Jakarta. Konsekuensinya, jika muncul beberapa pasangan kandidat, maka bisa jadi PKS akan menumbangkan para kandidat lain di pilgub Jakarta.

Padahal realitas politik yang membuka segala kemungkinan belum tentu sesuai dengan apa yang dibayangkan. Tidak ada keniscayaan jika kandidat gubernur-wakil gubernur DKI lebih dari dua pasang, perolehan suara yang dikumpulkan Adang-Dani akan bisa meraih angka sama sebagaimana yang diperolehnya kala itu. Bahkan bisa jadi, suara Adang-Dani lah yang terbelah, jika muncul kandidat lain, selain Fauzi Bowo-Prijanto.

Kedua, jika dikaitkan dengan ideologi. Menjelang masa kampanye, muncul isu-isu yang mengatakan bahwa pasangan PKS akan melaksanakan aturan yang dilekatkan pada ‘syari’ah Islam’ jika menguasai Jakarta. Munculnya beragam isu terkait dengan rencana penutupan tempat hiburan malam atau penciptaan perda-perda syari’at, menjadikan partai-partai lain harus bergerak bersama memangkaskan rencana PKS berkuasa di Jakarta. Artinya, di mata PKS, banyak kalangan masih menaruh curiga dengan isu ‘syariat’ yang kerap kali masih dilekatkan kepadanya.

Padahal berkali-kali Adang menampik tudingan jika dirinya menang penutupan hiburan malam atau pembatasan jam bagi perempuan untuk keluar malam akan menjadi kebijakannya, bahkan jika disesak PKS sekalipun<sup>73</sup> Justru Adang yang notabene bukan kader PKS bisa jadi akan menjadi satu variabel independen dalam relasinya dengan PKS terkait isu kebijakan yang bernuansa syariat atau kemunculan perda yang anti keberagaman.

Singkat kata, sebetulnya tidak ada pola yang konstan antara ideologi PKS atau yang kerap dipersepsi militan dan eksklusif dengan kandidat yang diusung. Dasar dukungan terhadap kandidat atau koalisi telah melampaui tembok normatif ideologis yang selama ini menjadi dasar pijakan PKS. Dalam konteks koalisi dalam pertarungan pilkada, PKS tampaknya telah melampaui tembok normatif ‘ideologis’ yang dulunya menjadi prasyarat PKS dalam menggalang koalisi. Perubahan ini akan

---

<sup>72</sup> Lihat <http://smsplus.blogspot.com/2007/08/dua-pemenang-pilkada-dki.html>, diakses pada 25 November 2008

<sup>73</sup> Lihat <http://www2.kompas.com/ver1/Pilkada/0706/04/124555.htm>, diakses pada 28 November 2008

begitu terasa jika kita bandingkan pola koalisi PKS dewasa ini, misalnya dengan zaman PK atau PKS pada masa awal-awal kiprahnya. Misalnya dahulu bisa ditelusuri alasan PK lebih tertarik untuk bergabung dengan PAN dalam fraksi reformasi, dan tidak bergabung dengan partai-partai lain meski berbasis ideologi Islam seperti PBB, PNUI serta PPP. Atau mengapa PK saat itu tidak bergabung dengan partai berbasis massa Islam lainnya seperti PKB.

Satu hal yang bisa dicatat sebagai alasan adalah karena PAN—meski mengklaim dirinya sebagai partai terbuka, namun tetap ditopang oleh kokohnya basis suara dan aspirasi Muhammadiyah—adalah partai yang memiliki ideologi terdekat dengan PK, yang diharapkan bisa memberi warna “Islam modern” di parlemen. Kedekatan ideologis ini diperkuat dengan adanya persilangan antara kader PKS dengan aktivis Muhammadiyah, baik di level elit seperti Hidayat Nurwahid, Anis Matta, dan seterusnya, maupun di aras terendah kader bawah.<sup>74</sup> Jawaban itu pula yang bisa menjelaskan mengapa pada akhirnya, setelah muncul dinamika hebat di internal partai,<sup>75</sup> PKS lebih memilih Amin Rais-Siswono Yudhohusodo ketimbang Wiranto-Salahuddin Wahid di putaran perdana pilpres 2004.

Atau jika menilik lebih dalam orientasi kebijakan PKS saat itu, bisa dikatakan bahwa PKS tetap memegang teguh alasan-alasan ideologis dalam setiap kebijakannya. Dengan kata lain, sebagai partai dakwah yang memiliki pondasi ideologi yang kokoh, PKS kala itu tidak pernah mengabaikan sedikitpun faktor ideologi dalam segala kebijakannya, termasuk menjalankan koalisi. Hal ini berbeda dengan kondisi kekinian PKS yang menunjukkan adanya kelonggaran dalam menjalankan koalisi.

Beberapa tahun ini, publik bisa melihat betapa lincahnya PKS berkoalisi dengan partai Golkar, PDIP, Demokrat, atau partai-partai lain yang tidak masuk spektrum ‘ideologi Islam’ atau partai yang berbasis Islam. Bahkan di beberapa tempat, PKS secara meyakinkan juga terlibat dalam koalisi bersama dengan mengikutsertakan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang secara ideologis berseberangan dengan ideologi

---

<sup>74</sup> Persoalan persilangan atau kader ganda ini tampaknya lebih menguntungkan PKS, ketimbang Muhammadiyah. Selain kader yang banyak ‘tercuri’, aset-aset Muhammadiyah juga kerap dimanfaatkan untuk menunjang kampanye PKS. Menghadapi sepak terjang PKS di lingkungan Muhammadiyah yang sudah dianggap sebuah ancaman bagi keberlangsungan organisasi, PP Muhammadiyah sampai mengeluarkan sebuah Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat (PP) Nomor: 149/Kep/I.O/B/2006, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Sekretarisnya, Prof. Dr. Din Syamsuddin dan Drs. H. A. Rosyad Sholeh. Dalam SK tersebut, PP Muhammadiyah secara lugas menghimbau kepada warganya untuk menjaga aset-ases persyarikatan untuk tidak digunakan untuk mendukung aktivitas PKS dengan bersikap kritis dan menjaga jarak terhadap partai politik yang mengatasnamakan dakwah itu.

<sup>75</sup> Syamsul Balda menceritakan kejadian munculnya wacana mendukung Amien Rais atau Wiranto, pada pilpres 2004. Semua anggota Majelis syuro memutuskan mendukung Amin Rais. Tapi entah bagaimana Anis Matta tetap mengusung Wiranto, dan Ust. Hilmi mendukung keputusan Anis Matta, dan selanjutnya memveto keputusan Majelis Syuro. Perdebatan yang muncul menjadi luar biasa karena berlarut-larut dan sempat membelah majelis Syuro. Hidayat, Salim Assegaf dan Abu Ridho ngotot untuk mendukung Amin Rais. Sampai Ust. Salim Assegaf marah dan menggebrak meja karena kebijakan mendukung Wiranto dianggap telah melanggar syariah. Implikasi politik di internal PKS adalah, Ust. Salim di “dubeskan” ke Arab Saudi, sehingga tidak mengganggu Hilmi Aminuddin di PKS. Beberapa bulan kemudian, Hidayat Nurwahid menjadi Ketua MPR. Bagi Syamsul, itu diluar skenario politik yang disiapkan PKS sama sekali. Di dalam PKS, tanpa melalui Musyawarah Nasional, Hidayat diberhentikan dari presiden partai, untuk selanjutnya digantikan dengan Tifatul Sembiring. Dengan kata lain, Hidayat ‘dipecat’ dari presiden PKS. Wawancara Syamsul Balda, op. cit.

PKS, di dalamnya, misalnya di Papua dan kota Tangerang. Hal ini disebutkan oleh Mabruri sebagai *strategic partnership* yang berarti PKS bisa berkoalisi dengan siapa saja dan dari golongan mana aja selama bisa bersinergi dengan golongan tersebut.<sup>76</sup> Jadi, ideologi bukan menjadi ukuran koalisi dalam pilkada.

Melangkah lebih jauh, dalam praktek politiknya PKS tidak selalu mengusung kandidat dalam pilkada dari kader yang telah begitu banyak dihasilkan dari kaderisasi PKS atau gerakan Tarbiyah. Dengan *strategic partnership* itu pula, PKS lebih bisa menerima kandidat dari non kader, sehingga bisa memperluas jaringan dalam perjuangan partai.

Jika ditelisik lebih lanjut, ada beberapa pola pemasangan kandidat yang diterapkan PKS dalam pertarungan pilkada. Pertama, kombinasi pasangan antara kader-non kader, misalnya Nurmahmudi Ismail-Syihabuddin Ahmad di kota Depok, Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Jawa Barat, dan pasangan Zulkieflimansyah-Marissa Haque di Banten. Kedua, kombinasi yang berkebalikan dari yang pertama, yakni pasangan non kader-kader seperti Adang Daradjatun-Dani Anwar di Jakarta, Syamsul Arifin-Gatot Pudjo Nugroho di Sumatera Utara, dan juga di Lampung, dimana PKS mendukung pasangan Zulkifli Anwar-Ahmad Sumaryanto, pasangan Burhanudin Husin & Teguh Sahono di Kabupaten Sampar, Riau, dan beberapa pasangan lain di berbagai daerah di Indonesia.

Ketiga, mengusung pasangan kandidat yang keduanya justru bukan berasal dari kaderisasi partai. Sebagai contoh di Sumatera Selatan, PKS, bersama PDIP, dan Demokrat, mengusung Syahril Oesman-Helmy Yahya, atau di Jawa Tengah, PKS menjatuhkan pilihan pada pasangan Sukawi Sutarip-Sudarto. Hal sama juga terjadi di Jawa Timur, dimana pasangan non kader, Soekarwo-Saefullah Yusuf, atau di Sulawesi Selatan, Amin Syam-Mansyur Ramli didorong oleh PKS.

Mengusung kandidat dari non kader bukanlah menjadi masalah bagi partai dakwah ini. Bisa jadi hal ini adalah buah dari perluasan strategi PKS yang lebih terbuka untuk merangkul pihak-pihak di luar PKS guna mewujudkan mimpi dan harapan bersama PKS. Bagi Tifatul<sup>77</sup>, dasar pencalonan pasangan kandidat yang diusung PKS dalam pertarungan pilkadal dilandasi tiga hal, pertama alasan kapasitas moral, kedua visi yang diusung, dan ketiga adalah kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan calon pemilih pada khususnya. Artinya, meski berangkat dari luar PKS, seorang calon gubernur atau bupati/walikota yang telah diusung PKS, diyakini telah memiliki tiga kriteria tersebut.

Bagi PKS, dukungan dalam pilkada lebih kepada personal bukan institusi yang membawahinya. Jika kandidat yang diusung PKS itu adalah kader partai tertentu, tidak dapat dinafikan terdapat kecenderungan kandidat tersebut membela kepentingan-kepentingan partainya. Tetapi, bagi PKS, hal itu dapat diantisipasi manakala telah dilakukan kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu dengan kandidat atau partai pendukung lain. Karena itu, PKS mengharuskan dirinya mengenal benar

---

<sup>76</sup> Wawancara Mabruri, Op. Cit.

<sup>77</sup> Wawancara Tifatul Sembiring, op. cit.

pribadi yang akan didukung, bagaimana komitmennya, bagaimana perilakunya, dan apa visinya. Pada intinya kompetensi dan kesalihan (integritas) pribadi menjadi pertimbangan prioritas bagi koalisi tersebut dijalankan.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, PKS berprinsip bahwa koalisi yang digalang dalam pilkada, baik dengan kita punya tingkatan, ideologis, strategis, taktis dan teknis. Bagi Tiffatul, koalisi di pilkadal hanya bersifat taktis dan teknis semata, tidak lebih dari itu. Berbeda dengan Tifatul, penjelasan DSP perihal koalisi yang dijalankan PKS dengan kandidat atau partai lain bermakna strategis, bukan ideologis. Hal ini bermakna, dukungan tersebut tidak dalam rangka merusak nilai-nilai ketauhidan, dan melestarikan kemusyrikan serta kemungkaran.

PKS berharap, dengan koalisi taktis atau strategis itu perubahan sebisa mungkin untuk dilakukan. Atau jika dipandang dari kepentingan dakwah, maka DSP berkeyakinan, dengan mengusung atau mendukung seorang kandidat itu diharapkan dapat merealisasikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi ummat dan da`wah atau untuk mencegah dan mengurangi kemungkaran yang akan timbul. Secara gamblang, mabruri mengatakan, jika PKS selama ini membiayai dakwah dari kantong sendiri, maka dengan kemenangan pilkada diharapkan dakwah bisa dijalankan dengan biaya negara.<sup>79</sup>

Namun, orientasi kebijakan PKS yang lebih terbuka dalam merangkul kandidat dalam pilkada tersebut menuai kritik dari banyak kadernya sendiri. Hal ini karena akan mengaburkan jati diri PKS sebagai partai kader, yang seharusnya lebih pede mengusung kadernya sendiri ketimbang kader partai lain. "Apa bedanya PKS dengan Golkar dan PDIP sekarang", gugat Balda.<sup>80</sup>

Alih-alih untuk memperluas orbit dan memperlancar kepentingan dakwah, koalisi dengan para kandidat di luar kader PKS, yang kerap kali berbeda secara ideologis dengan PKS itu, justru lebih banyak nuansa pragmatisme dan keuntungan finansial jangka pendeknya. Di banyak pilkada, PKS tidak mengusung kadernya sendiri sebagai gubernur atau bupati/walikota, atau bahkan mengusung pasangan kandidat yang keduanya bukan dari kader, bagi Balda adalah karena faktor uang semata. Hal ini didasarkan pada realita bahwa di PKS sekarang ini muncul sebutan mahar (mas kawin) dari calon kandidat kepada PKS untuk kepentingan pilkadal.<sup>81</sup>

Realitas pragmatisme politik yang telah menjadi maenstream di PKS ini telah menyebabkan banyak kader di daerahnya masing-masing mengalami kebingungan. Misalnya respon kader terhadap kandidat yang diusung PKS dan Demokrat dalam pilgub Jawa Tengah yang diproses pengadilan sebagai tersangka korupsi dana APBD

---

<sup>78</sup> Lihat, BAYAN DSP PKS NOMOR : 16/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Dhawabit Syari'ah dalam Koalisi.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Mabruri, Op. Cit.

<sup>80</sup> Wawancara Syamsul Balda, Op. Cit.

<sup>81</sup> Menurut Balda, PKS tiba-tiba mengusung Adang karena kuat dugaan Adang memberikan 200 Milyar kepada PKS. Hal sama juga dilakukan PKS ketika menawarkan 'perahu'nya kepada Agum Gumelar seharga 300 M untuk dicalonkan di pilgub Jawa Barat. Meski pada akhirnya tawaran itu batal, karena Agum lebih memilih PDIP ketimbang PKS.

kabupaten Semarang, Sukawi Sutarip, terbelah antara mendukung dan anti.<sup>82</sup> Hal sama ditemukan di Sumatera Selatan, di mana Syahril Oesman, gubernur *incumbent* yang didukung maju kembali oleh PKS, bersama PDIP dan PPP, menyebabkan para kader di Sumsel terbelah, untuk terus mendukung kandidat yang diusung PKS. Seperti di Sumatera Selatan, kader PKS terbelah antara yang terus mendukung Syahril Oesman-Helmy Yahya dan yang menentang Syahril, seraya meminta PKS mencabut dukungan tersebut.<sup>83</sup>

Selain Sukawi, ada beberapa kandidat lain yang diindikasikan korupsi, seperti Thaib Armain,<sup>84</sup> di Maluku Utara yang juga didukung oleh PKS, bersama dengan Partai Demokrat, PBB, PKB, dan sejumlah parpol kecil.<sup>85</sup> Selanjutnya, ada nama Ali Mazi, bekas Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga cukup lama terbelit masalah isu korupsi HGB Hotel Hilton, didukung PKS, bersama Golkar dan PKB, yang dipasangkan dengan Abdul Samad, MA, pada pilkada Sultra tahun 2007 lalu. Nama-nama yang terkait dengan kasus korupsi tersebut, tak pelak meruntuhkan semangat sebagian kader, yang masih membayangkan PKS kuat memegang jargon “bersih” dan “peduli” itu.

Bagi PKS, bisa jadi semangat untuk memperluas kemenangan dakwah melalui kandidat kepala daerah yang diduga kuat terlibat korupsi tidak menjadi persoalan, selagi mereka bersedia berkomitmen untuk turut memperluas dakwah, tidak akan mengubah citranya sebagai partai dakwah. Namun, citra PKS sebagai partai yang bersih dan peduli, lambat laun bergeser dengan citra ‘ambisi’nya untuk meraih kekuasaan, dengan mengusung para kandidat yang justru mencederai jargon yang telah melekat pada PKS itu.

Bagi ideolog gerakan Tarbiyah seperti Abu Ridho, perubahan citra yang mendorong PKS untuk memperluas jaringan dan terbuka dalam koalisi, termasuk mendukung kandidat di luar PKS, apalagi yang terindikasi korupsi, untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dalam rangka pilkada atau pemilu 2009, adalah satu kesalahan. Bahkan Ridho menyesali sebagian elit PKS yang menggampangkan masalah tersebut, dengan beberapa kali komentar, “Partai Golkar yang berkali-kali dihantam kasus korupsi juga tetap menang kok”. Jika sudah seperti itu, lanjut Ridho, namanya adalah kejahatan.<sup>86</sup>

### 3) Faksi ‘Keadilan’ versus Faksi ‘Kesejahteraan’

---

<sup>82</sup> KAMMI Daerah Semarang, Selasa (25/3) ini menggelar unjuk rasadi depan gedung KPUD Jateng. Selain menolak calon gubernur/wakil gubernur yang berindikasi korup, mereka juga meminta agar calon gubernur periode 2008-2013 harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jateng minimal tiga tahun terakhir. Lihat, <http://wap.kompas.com/read/xml/2008/03/25/12194520/cagub.minimal.ber-ktp.jateng.tiga.tahun>. Selama ini KAMMI turut mengusut dana tak terduga Kota Semarang, yang melibatkan Sukawi Sutarip. Periksa, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0705/26/opi10.htm>

<sup>83</sup> Lihat <http://www.inilah.com/berita/politik/2008/08/21/45255/kader-pks-terbelah-soal-syahril/> diakses pada 20 November 2008

<sup>84</sup> Periksa <http://www.ppatk.go.id/berita.php?nid=3181> di akses pada tanggal 20 November 2008

<sup>85</sup> Lihat <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/29/19553729/thaib-gani.akhirnya.dilantik>

<sup>86</sup> Wawancara Abu Ridho, op. cit.

Belakangan, orientasi kebijakan PKS yang sedikit banyak telah keluar dari alur ideologisnya, semakin menyembulkan friksi di internal PKS. Kondisi semacam ini tak bisa disembunyikan lagi, karena dalam banyak kesempatan, elit-elit PKS dalam berbagai komentar ke publik menyangkut kebijakan yang telah dilakukan PKS sendiri, kerap menunjukkan adanya silang-sengketa pendapat, yang semakin menunjukkan bahwa di dalam tubuh PKS ada ketidakkompakan.

Semenjak PKS cenderung terbuka dan ingin merangkul semua pihak untuk menciptakan 'lompatan dakwah', maka PKS terbelah menjadi dua kubu. Yang pertama adalah mereka yang masih mengimajinasikan PKS sebagai partai dakwah 'murni', dan menginginkan PKS kembali lagi memegang teguh ideologi jama'ah sebagaimana saat masih dalam format PK. Sayap yang lebih cenderung bergerak dengan meneguhkan sisi konservatisme ideologis ini biasa disebut sebagai faksi "Keadilan". Yang kedua adalah mereka yang menginginkan PKS relatif terbuka, moderat, dan lebih menyeret ideologi PKS ke tengah. Sayap yang kerap kali bercorak progresif ini biasa disebut sebagai "faksi Kesejahteraan".

Nama masing-masing faksi itu sebenarnya adalah penegasan friksi yang diambil dari dua istilah yang dipakai untuk nama partai, "keadilan dan kesejahteraan". Dua faksi dalam tubuh PKS ini semakin mengemuka ke tengah publik tatkala dalam launching buku platform PKS Sri Mulyani, menteri Keuangan RI yang menjadi pembahas platform PKS dari sisi kebijakan ekonomi, mengatakan dirinya melihat di dalam PKS ada dua faksi, yakni Keadilan dan Kesejahteraan. Selanjutnya dia mengaku jujur bahwa beberapa kader dari faksi kesejahteraan kerap datang ke kantornya.<sup>87</sup>

Setelah bedah buku platform PKS tersebut, kontan saja istilah faksi kesejahteraan dan keadilan yang sebetulnya telah muncul sejak perubahan nama PK ke PKS semakin populer di telinga publik. Ketimpangan perilaku politik dan tak tunggalnya orientasi kebijakan elit PKS selama ini semakin meneguhkan adanya pembelahan di dalam tubuh PKS. Jika dalam praktek politiknya faksi keadilan lebih teguh memegang ideologis jama'ah, misalnya lebih suka mengusung ideologi Islam, dan lebih jujur dan 'lugu' mengakui bahwa tujuan jama'ah adalah menegakkan Islam di negeri ini, maka faksi kesejahteraan lebih canggih mensiasati orientasi jama'ah dalam hal Islamisasi Indonesia atau lebih suka menunjukkan PKS selayaknya partai lain di Indonesia, yang menjunjung tinggi komitmen terhadap Pancasila dan NKRI.

Secara garis besar dua faksi tersebut bisa digambarkan dengan orientasi faksi keadilan yang lebih bersabar dalam membangun pondasi dan kekuatan partai, menumbuhkan kekuatan kader hingga suatu saat nanti telah tiba masa untuk mengambil alih kekuasaan, maka faksi kesejahteraan lebih lugas dalam mempercepat menyongsong kekuasaan, dan senantiasa berkata bahwa 2009 adalah puncak kemenangan PKS.

---

<sup>87</sup> Wawancara Syamsul Balda, Op. Cit.

Jika faksi keadilan menginginkan PKS untuk tetap bertumpu pada kekuatan kader dalam jama'ah dan berorientasi pada partai kader, maka faksi kesejahteraan meski tetap mengaku sebagai partai kader, tapi juga membuka sayap politik di dalam partai yang memungkinkan terjadinya penyerapan massa secara besar-besaran ke dalam partai. Jika faksi keadilan lebih tegas dalam membedakan antara dana politik yang 'halal', yakni dari iuran kader-kader partai dan sumbangan dari orang saleh, dengan dana politik yang 'syubhat' (abu-abu") yang cenderung haram, misalnya dari kandidat yang menggunakan perahu politik PKS dalam pilkada atau konglomerat yang berkepentingan dengan kebijakan PKS, maka faksi kesejahteraan lebih pragmatis soal asal-usul dana politik tersebut. Dana BUMN, mahar politik dalam pilkada, sumbangan konglomerat yang diindikasikan korupsi, dan seterusnya.

Pada akhirnya, muncul ilustrasi, bahwa kesederhaan dan 'zuhud' lekat dengan kader-kader di faksi keadilan, selanjutnya 'kemewahan' dan "orientasi kesejahteraan individu dan kekuasaan" bercokol dibenak para kader di faksi kesejahteraan. Namun di sisi lain, faksi keadilan bercorak kaku dan konservatif, sedangkan faksi kesejahteraan fleksibel dan progressif.

Keterbelahan besar di dalam PKS ini secara jujur diakui oleh Fitra Arsil. Baginya, dua faksi tersebut memang ada, meski keduanya sebenarnya punya kontribusi dalam memajukan PKS ke depan.<sup>88</sup> Sepak terjang sayap kesejahteraan, yang disebut Mabruki berisi 'kaum muda' yang bercorak lebih dinamis ini, memang dibutuhkan partai, karena bisa menutup kekurangan 'sayap tua' dalam kerja-kerja jaringan politik PKS.<sup>89</sup>

Bagi Mabruki, *strategic partnership* yang digagas sebagai salah satu dari 7 butir cara pemenangan pemilu itulah yang menjadi pangkal munculnya perbedaan cara mengelola partai ini. Salah satu buah dari kerja-kerja faksi kesejahteraan ini misalnya adalah keberhasilan PKS dalam menarik para investor politik untuk mensupport pemenangan pemilu PKS. Mabruki mengakui bahwa bagaimanapun PKS butuh kantong-kantong besar untuk mendanai partai, karena dana dari kader sendiri kerap tidak cukup untuk membiayai partai, terutama jika dipakai untuk menggelar even-even besar. Dan hari ini, sebagaimana keyakinan sebagian elit PKS, tentu saja yang memiliki dana besar adalah para pengusaha Tionghoa.<sup>90</sup>

Terkait dengan gengarnya kader-kader "faksi kesejahteraan" yang gemar mengakses dana dari luar partai secara besar-besaran untuk menyongsong pemilu 2009, Abu Ridho merasakan ada yang salah dalam orientasi perjuangan partainya belakangan. Baginya, ada kecenderungan sebagian kader untuk *hailah* (mengelak) dari aturan-aturan agama, sehingga esensi kebenaran agama dikaburkan untuk meraih keuntungan tertentu. Ridho memberikan ilustrasi, misalnya upaya untuk

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Fitra Arsil, pada 28 Juli 2008

<sup>89</sup> Wawancara Mabruki, *ibid.*

<sup>90</sup> Mabruki menjelaskan, anak-anak muda yang diorganisir oleh Anis Matta itu berhasil menghadirkan ketua Masyarakat Tionghoa Indonesia (Matakin) dan INTI persaudaraan cina untuk selalu datang dalam rapat pemenangan pemilu PKS untuk menyupport PKS. Karena mereka pintar berjudi, maka mereka bersedia investasi di awal kepada PKS, karena mereka melihat PKS akan jadi partai besar. Bagi PKS, hal seperti ini tidak masalah selagi sesuai dengan aturan main internal. Wawancara Mabruki, *op. cit.*

memberikan alasan bahwa 'merampok' bank milik pengusaha Tionghoa dibenarkan karena dianggap sebagai dana rampasan perang dari orang kafir. Atau juga sebagian kader yang meyakini bahwa mengambil uang BUMN untuk aktivitas dakwah dan akan dikembalikan ke masyarakat melalui partai dakwah tidak melanggar syar'iat, dan seterusnya.<sup>91</sup>

Bagi Ridho, meraup dana banyak dengan cara yang tidak bisa dibenarkan oleh syari'ah justru akan merusak citra dan ideologi partai. Ridho membantah thesis para kader faksi kesejahteraan, yang sekaligus pengusung isu keterbukaan partai, bahwa dengan dana besar otomatis partai akan besar. Ridho yakin, PKS tidak otomatis meraih suara signifikan, meski dananya melimpah. Dengan mengutip hadiz nabi, "Berzuhudlah kamu terhadap dunia, Allah yang akan mencintai kamu. Berzuhudlah kamu dari apa yang dimiliki manusia, maka kamu akan dicintai manusia". Ridho melanjutkan, jika hadis itu dibahasakan dalam dunia politik maka akan berbunyi, "dengan tidak *kemaruk* pada uang-uang yang tak halal, maka kamu akan mendapatkan konstituen yang banyak".<sup>92</sup>

Demikianlah perdebatan yang muncul dari dua faksi di dalam tubuh PKS dewasa ini. Masing-masing faksi telah kokoh pada pendiriannya dalam hal mengelola dan membawa partai menuju kemenangan dakwah. Kondisi ini tentu saja membuka tabir keretakan internal PKS, yang sekian lama seolah rapat tertutup oleh kokohnya ideologi yang membangun soliditas gerakan dakwah, sejak era underground movement yang mereka tempuh. Berbagai kebijakan politik mutakhir setidaknya menggambarkan adanya silang pendapat di antara dua kubu tersebut. Bahkan tak jarang, sengketa pendapat itu secara lugas mereka tampilkan di berbagai media.

Kasus menarik yang berhasil memancing diskusi publik itu adalah iklan politik yang ditayangkan PKS untuk mengenang hari Pahlawan, 10 November, edisi tahun 2008. Iklan yang dimaksudkan adalah persembahan terima kasih untuk para guru bangsa dan pahlawan Indonesia, dengan menampilkan gambar Soekarno, Soeharto, M. Hatta, M. Natsir, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asya'ari, Jenderal Soedirman, dan Bung Tomo, dan komitmen PKS untuk meneruskan perjuangan mereka.

Inti perdebatan adalah munculnya gambar Soeharto, presiden Indonesia yang dijatuhkan oleh gelombang demonstrasi tahun 1998 yang akhirnya menutup lembaran sejarah diktatorial Indonesia modern dan terbukanya sejarah reformasi politik di negeri ini, yang oleh PKS dianggap sebagai pahlawan. Melalui iklan tersebut, PKS dianggap banyak kalangan telah melupakan sejarah, bahkan berkhianat kepada reformasi 1998,<sup>93</sup> yang sebenarnya PKS—melalui sayap mahasiswa gerakan tarbiyah saat itu, KAMMI—turut serta dalam demonstrasi menggulingkan Soeharto.

---

<sup>91</sup> Wawancara Abu Ridho, *ibid.*

<sup>92</sup> Wawancara Abu Ridho, *ibid.*

<sup>93</sup> Nada protes dilayangkan banyak kalangan, terutama yang menonjol adalah Fajroel Rahman dan Usman Hamid. Sebab iklan itu, kedua avitis itu menampik pemberian PKS Award "tokoh muda, calon pemimpin Indonesia" yang dianugerahkan kepada mereka. Lebih jauh, lihat <http://www.detiknews.com/read/2008/11/20/182539/1040390/10/usman-hamid-juga-tolak-pks-award>, diakses 21 November 2008

Iklan yang pada awalnya dirancang sebagai pesan moral mengajak rekonsiliasi nasional dan secara bersama merangkul semua elemen, terutama keluarga dan para pengikut sosok pahlawan yang telah ditampilkan oleh PKS, untuk selanjutnya bisa bersinergi membangun Indonesia masa depan itu, justru mencuatkan sengketa di antara elit partai. Sengketa ini terletak pada status Soeharto, apakah PKS telah mengakui Soeharto sebagai pahlawan atau tidak.

Dua pimpinan PKS, Tifatul dan Anis Matta berselisih paham soal status Soeharto. Jika Anis Matta mengatakan bahwa Soeharto telah disepakati oleh PKS sebagai pahlawan dan guru bangsa, maka Tifatul menolak dengan alasan sebagai partai reformis, PKS tidak mengakui Soeharto sebagai pahlawan. Bahkan Tifatul perlu klarifikasi kepada publik, bahwa para kader PKS tidak pernah mencuatkan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, karena tokoh ini dipandang masih menyisakan kontroversi. Bahkan secara pribadi, Tifatul tidak setuju jika mantan penguasa Orde Baru itu dianugerahi gelar pahlawan. Seraya menyitir perkataan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Tifatul berujar, "Soeharto itu besar jasanya, tapi dosanya juga banyak."<sup>94</sup>

Perselisihan dan sengketa pendapat yang kerap menyembul ke publik, apalagi terjadi di kalangan elit partai, tak pelak membuka lebar jurang komunikasi antara faksi-faksi di dalam tubuh PKS. Komunikasi politik yang kurang berhasil dijalankan secara baik tersebut, tentu saja hanyalah salah satu bagian dari implikasi logis dari perbedaan orientasi politik PKS, yang tentu saja berangkat dari perbedaan tafsir atas paradigma perjuangan untuk membawa PKS menuju kampiun dalam pemilu 2009. Lebih dari itu, perbedaan ini muncul dari keyakinan ideologis para kader partai dalam memaknai tahapan perjuangan dakwah yang selama ini didengungkan ke publik sebagai corak dan dasar para kader jama'ah Ikhwan Indonesia ini.

Jika ditelusuri para aktor yang ada dibelakang faksi-faksi di tubuh PKS tersebut, maka akan menunjukkan semakin akutnya peta kekuatan politik di tubuh PKS. Ilustrasi Herlambang, salah satu aktivis KAMMI, soal pertarungan kekuasaan di tubuh PKS menarik untuk dicermati. Faksi keadilan adalah para kader yang sebetulnya masih dominan di dalam tubuh jama'ah. Mereka adalah kader-kader di level bawah dan sebagian kader atas yang tetap teguh berada dalam barisan jama'ah. Sebagian diantara mereka masih loyal pada pimpinan partai dan jama'ah, namun sebagian besar telah mengalami kebingungan akan dibawa kemana gerak jama'ah ini. Sebagian lain telah menempuh jalan kritis terhadap partai dan turut serta mengorganisir kader-kader partai untuk kritis melalui pengajian-pengajian.<sup>95</sup>

Di seberang faksi keadilan, terdapat faksi kesejahteraan, yang meski berjumlah tidak banyak, namun telah menjadi maenstream di PKS. Hal ini disebabkan oleh terkonsolidasinya kekuatan mereka dipuncak pimpinan PKS dan sebagian

---

<sup>94</sup> Bandingkan antara <http://www.detiknews.com/read/2008/11/17/185241/-1038544/158/anis-matta-soeharto-sebagai-pahlawan-sudah-disepakati-internal-pks>, dengan <http://www.detiknews.com/read/2008/11/12/102901/1035517/10/pks:-beda-dengan-konsep,-iklan-soeharto-pahlawan-salah>. Keduanya diakses pada 27 November 2008

<sup>95</sup> Perbincangan dengan Herlambang, Kepala Litbang DPP KAMMI, 20 Juni 2008

memenuhi ruangan kantor legislatif, sehingga kekuatan ini mampu mempengaruhi kebijakan strategis partai. Kekuatan ini dibawah kendali Anis Matta, sekjen partai, yang dalam banyak hal didukung oleh ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin.

Hal ini dibenarkan oleh Syamsul Balda. Balda secara lugas mengatakan bahwa di bawah kendali Hilmi dan Anis Matta, maka berbagai kebijakan partai belakangan ini tidak lagi mencerminkan kepentingan dakwah karena ambisi pribadi lebih dominan ketimbang kepentingan kader dalam jama'ah.<sup>96</sup> Dan karena itu, Ridho dan sayap konservatif dalam faksi Keadilan menilai bahwa faksi kesejahteraan telah melenceng dari perjuangan dakwah.<sup>97</sup>

Pola menjalankan kekuasaan yang dikendalikan oleh kekuatan progressif-kesejahteraan ini terlihat *ajeg*: membuka keran keterbukaan partai, merangkul banyak kalangan untuk meraup dana partai dan mempercepat perolehan kekuasaan, dan orientasi massa untuk lompatan kemenangan dalam pemilu 2009. Kreatifitas dan semangat untuk secara cepat memperluas orbit dakwah inilah yang sebetulnya kuat tertanam dalam benak sayap progressif PKS ini. Dan Anis Matta, yang disebut Mabruri sebagai penulis dan orator handal, sekaligus motivator ulung di dalam PKS ini,<sup>98</sup> adalah sosok yang begitu inspiratif bagi banyak kader dan mampu menampung energi kaum muda partai, yang imaginatif dan kreatif, sekaligus.

Tentu saja tidak mudah menilai sebuah kekuatan ideologis yang begitu kokoh selama ini mudah terjerembab dalam 'kedangkalan' berpolitik. Begitu gegabah jika hanya karena alasan orientasi kesejahteraan personal sebagian elitnya, bangunan jama'ah yang telah puluhan tahun menunjukkan sisi soliditasnya terkerosi oleh orientasi kepentingan jangka pendek, sebagaimana dituduhkan oleh para pengkritik di dalam tubuh partai sendiri. Artinya, dibutuhkan sebuah taksiran sejauh mana kekuatan aktor di dalam tubuh jama'ah mampu merusak tatanan yang telah baku, sebagaimana digariskan gerakan induknya, al-Ikhwan al-Muslimun.

Selain itu, lebih dari sekedar partai biasa, mekanisme kontrol secara kelembagaan sebagaimana di sebutkan oleh Tifatul, melalui Dewan Syari'ah Partai di setiap jenjang kepengurusan, dari pusat hingga daerah, yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua perilaku politik kader, maka penyelewengan yang

---

<sup>96</sup> Lebih lanjut, Balda memaparkan kepentingan pribadi yang mempengaruhi kebijakan partai bisa digambarkan dari 70% calon legislative (caleg) PKS 2009 adalah mereka yang loyal pada kedua pemimpin tersebut. Di dalam 70 % caleg dari PKS tersebut terdapat para istri elit PKS seperti istrinya Anis Matta. Kondisi ini lebih mencerminkan zaman Soeharto dulu, di mana kerabat penguasa didorong untuk jadi anggota legislatif. Di luar itu, para kader yang awalnya kritis dibungkam dengan menjadikan mereka caleg. Hilmi dan Anis Matta dan para pengikutnya juga leluasa menentukan calon pimpinan daerah yang mau bayar ke PKS, menjalankan loby-loby ke SBY, mendatangi pejabat BUMN untuk dimintai uang dan seterusnya. Pada akhirnya, sebut Balda, gerakan tarbiyah ini seolah dipimpin mafia. Wawancara Balda, op. cit.

<sup>97</sup> Wawancara Abu Ridho, op. cit. Dengan bebreapa kali berbicara lantang seperti ini, Abu Ridho, salah satu peletak dasar ideologi jama'ah Ikhwan di Indonesia, mengaku siap menerima segala konsekuensinya. Tampaknya apa yang diutarakan ini menemui titik terang, ketika Abdi Sumaiti (nama asli Abu Ridho) tidak ditemukan dalam nama-nama kader PKS yang tersebut dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diusulkan PKS.

<sup>98</sup> Wawancara Mabruri, Op. Cit.

disebutkan oleh faksi kesejahteraan tersebut setidaknya bisa diredam. Sama halnya ketika Rama menyebut dirinya sebagai kader, maka ada para Syaikh yang membentuk dirinya, sekaligus *menjewernya* jika kader seperti dirinya tersebut berbuat kesalahan. Tentu saja DSP pulalah yang akan mengembalikan lagi ke *track* yang benar, sebagaimana digariskan partai.

Mengomentari penilaian tersebut, Balda memaparkan bahwa sebagai gerakan ideologis yang tumbuh dan dijalankan seperti multi level marketing, maka konsekuensi logisnya adalah pucuk level mempengaruhi berjuta jaringan di bawah. Jika level puncaknya bekerja giat dan bagus maka downline nya akan bagus. Kondisi ini terjadi saat dimulainya perintisan gerakan dakwah yang dipimpin Hilmi sampai berakhirnya PK. Namun jika kepalanya membusuk, maka jaringan dibawahnya juga akan membusuk. Hari ini, sebutnya, penyimpangan-penyimpangan telah dimulai dari puncak pimpinannya, Hilmi Aminuddin, bersama para pengikutnya, dibawah kendali Anis Matta. Maka bisa dipastikan, sekujur tubuh dan jaringan yang dibentuk akan terimbas oleh perilaku menyimpang dari orang nomor satu di dalam tubuh jama'ah, sekaligus partai ini.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Balda, *ibid.* Balda melihat bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Hilmi itu dimulai dari kasus di Departemen Kehutanan kala menterinya adalah Nurmahmudi Ismail. Kala itu, Nurmahmudi menerima dana-dana dari para pengusaha untuk membiayai partai, dan diizinkan oleh Hilmi. Kesimpulan yang ditarik Hilmi adalah menarik uang dari kekuasaan itu mudah sekali. Kontras dengan pendanaan PKS sebelumnya yang sebagian besar ditarik dari iuran kader. Akhirnya, yang terpikir oleh beliau adalah memperbanyak menteri, menambah jumlah kader berkuasa, untuk mempermudah menarik dana untuk keperluan partai. Justru sekarang di PKS, jika ada anggota DPR PKS yang mengembalikan uang suap maka tidak diapresiasi.

## Daftar Pustaka

- Atabik Ali dan Zuhdi Muhdhor, *Qomus Al-'Ashriy, Arabiy-Indonisiy, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003
- Baswedan, Anies R.(2007) " Indonesian Politics In 2007: The Presidency, Local Elections And The Future Of Democracy ", Bulletin of Indonesian Economic Studies,43:3,337
- Dakhidae, Daniel, Partai-Partai Politik Indonesia, " Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah, Partai Politik Indonesia; Ideologi, Strategi dan Program, Tim Penelitian dan Pengembangan, Kompas, Edisi Pemilu, Cet I, April 1999.
- Durverger, Maurice, Political Parties " Their Organisation and activity in the Modern State", translated by Barbara and Robert North with a forwarded by D. W., Brogan, London, 2<sup>nd</sup> edition revised, 1959, hal, 63
- Erawan, Ketut Putra, Ph.D, Mission Possible?:Reformasi Kepartaian di Indonesia, makalah dan bahan kuliah sistem kepartaian Indonesia, Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2008.
- , The Party Logics in Indonesia, Paper Presentasi, Northern Illinois University, 2002.
- E.E. Schatterschneider. 1942. Party Government New York: Holt, Rinehart and Winston, dikutip dalam Norris, Pippa (2004), Building Political Parties, Report Commisioned by the International IDEA
- Herbert Kitschelt, Movement Parties, dalam HandBook of Party Politics, Katz, Richards and Crotty, William (ed), Sage, 2006.
- Klingemann, Hans-Dieter; Richard I. Hofferbert, dan Ian Budge (1994), Parties, Policies, and Democracy, Westview Press, Ltd., Colorado.
- Marwan Batubara dkk, *Skandal BLBI, Ramai-Ramai Merampok Negara*, Haekal Media Center, Jakarta, 2008) dan Ishak Rafiq, *Catatan Hitam Lima Presiden*, Ufuk Publishing House,2008. Mitchell, R.P, Masyarakat al-Ikhwan al-Muslimun, Intermedia, Solo, 2005.
- Qordhowi " Islam abad 21: Refleksi abad 20 dan Agenda Masa Depan, Pustaka al-Kautsar
- Robertson, David (1967) A Theory of Political Party Competition, John Wiley&Sons, Ltd. Great Britain

### Narasumber

- Wawancara dengan Samsul Balda, Jakarta, 24 Juli 2008
- Wawancara dengan Abu Ridho, Jakarta, 25 Juni 2008.
- Wawancara dengan Mutammimul Ula, 9 Juni 2008.
- Wawancara dengan Ahmad Mabruri, 10 Juni 2008
- Wawancara Tifatul Sembiring, 26 Juni 2008
- Wawancara dengan Rama Pratama, Jakarta, 10 Juni 2008
- Wawancara dengan Fitra Arsil, pada 28 Juli 2008
- wawancara dengan Herlambang, Kepala Litbang DPP KAMMI, 20 Juni 2008
- wawancara dengan Dr. Daud Rasyid MA, Bandung, Juni 2008
- wawancara dengan Muhammad Zuhriif Hudaya, Dipl.Rad, Koordinator daerah pemenangan pemilu PKS, Jakarta, 20 Juni 2008
- Korespondensi dengan Yoyoh Yusroh, DPP PKS, Jakarta, 20 Juni 2008.

### **Keputusan Organisasi**

Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat (PP) Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006

Bayan DSP PKS NOMOR : 16/B/K/DSP-PKS/1429 tentang Dhawabit Syari'ah dalam Koalisi.

### **Surat kabar dan Situs Internet**

CIRIS News Edisi I, Agustus 2008

Republika 27 Mei 1998

<http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>.

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/03/20/0042.html>

<http://www.mpr.go.id/index.php?section=fraksi&id=10&periode=1999-2004>, di akses pada 18 November 2008

<http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>, diakses pada 23 Oktober 2008

<http://pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111>, ibid.

[http://www.transparansi.or.id/berita/berita-januari2003/berita2\\_220103.html](http://www.transparansi.or.id/berita/berita-januari2003/berita2_220103.html), diakses pada 21 September 2008

<http://www.freelists.org/archives/ppi/12-2004/msg01428.html>, diakses pada 24 Oktober 2008, *op. cit.*

<http://pk-sejahtera.org/organisasi.php?op=deklarasi> 1998, diakses pada 29 Agustus 2008

<http://smsplus.blogspot.com/2008/11/pks-sayonara-konservativisme.htm>, diakses 24, November 2008

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/08/tgl/29/time/143932/idnews/823310/idkanal/10>, diakses 24 November 2008

<http://www.detiknews.com/read/2008/09/24/235928/1012697/10/provokasi-lsi-bikin-pks-berbenah>, diakses pada 26 November 2008

<http://pksbali.org/bayanat-mukernas-2008/>

<http://smsplus.blogspot.com/2008/11/anis-mata-saatnya-pks-di-depan.html>, diakses pada 25 November 2008

<http://smsplus.blogspot.com/2007/08/dua-pemenang-pilkada-dki.html>, diakses pada 25 November 2008

<http://www2.kompas.com/ver1/Pilkada/0706/04/124555.htm>, diakses pada 28 November 2008

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0705/26/opi10.htm>

<http://www.inilah.com/berita/politik/2008/08/21/45255/kader-pks-terbelah-soal-syahrial/> diakses pada 20 November 2008

<http://www.ppatk.go.id/berita.php?nid=3181> di akses pada tanggal 20 November 2008

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/29/19553729/thaib-gani.akhirnya.dilantik>

<http://www.detiknews.com/read/2008/11/20/182539/1040390/10/usman-hamid-juga-tolak-pks-award>, diakses 21 November 2008

<http://www.detiknews.com/read/2008/11/17/185241/-1038544/158/anis-matta-soeharto-sebagai-pahlawan-sudah-disepakati-internal-pks>,

<http://www.detiknews.com/read/2008/11/12/102901/1035517/10/pks:-beda-dengan-konsep,-iklan-soeharto-pahlawan-salah>. Diakses pada 27 November 2008

